



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK  
TAHUN ANGGARAN 2023



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI  
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI  
KULIT, KARET DAN PLASTIK**

Jl. Sokonandi 9 Yogyakarta, Telp (0274) 563655, 512929

## KATA PENGANTAR

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan terpercaya. Dalam rangka itulah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga akan menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, dan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sejalan dengan itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari Eselon II keatas untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan Strategis yang di rumuskan sebelumnya. Untuk memenuhi kewajiban tersebut diatas, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) menyusun Laporan Kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 150/M.IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Menteri PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam laporan ini disampaikan pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis BBSPJIKKP Tahun 2021-2024. Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Akuntabilitas Kinerja juga merupakan alat pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja BBSPJIKKP.

Demikian kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja BBSPJIKKP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Kepala BBSPJIKKP

Hagung Eko Pawoko

## KATA PENGANTAR

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan terpercaya. Dalam rangka itulah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga akan menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, dan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sejalan dengan itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari Eselon II keatas untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan Strategis yang di rumuskan sebelumnya. Untuk memenuhi kewajiban tersebut diatas, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) menyusun Laporan Kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 150/M.IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Menteri PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam laporan ini disampaikan pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis BBSPJIKKP Tahun 2021-2024. Selain sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Akuntabilitas Kinerja juga merupakan alat pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja BBSPJIKKP.

Demikian kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja BBSPJIKKP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 26 Januari 2024

Kepala BBSPJIKKP



Hagung Eko Pawoko

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Seiring dengan semangat reformasi birokrasi publik, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) sebagai salah satu lembaga pemerintah di bawah Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian juga melakukan pembaharuan terhadap peran dan tugas pokok organisasinya. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik sebelumnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja BBSPJIKKP TA 2023, terdapat 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dan 13 (tigabelas) Indikator kinerja untuk melaksanakan kinerjanya yaitu :

1. Sasaran Kegiatan I : Meningkatkan Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas, dengan 1 indikator kinerja yaitu Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi ;
2. Sasaran Kegiatan II : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan 2 indikator kinerja yaitu Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 dan Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri;
3. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri, dengan 4 indikator kinerja yaitu Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi, Meningkatnya PNPB layanan jasa industri, Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan dan Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa;
4. Sasaran Kegiatan IV : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan 1 indikator kinerja yaitu Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker;
5. Sasaran Kegiatan V : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan, dengan 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri;
6. Sasaran Kegiatan VI : Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional, dengan 2 indikator kinerja yaitu Rata-rata indeks profesionalitas ASN;
7. Sasaran Kegiatan VII : Penguatan Layanan Publik, dengan 1 indikator kinerja yaitu Nilai minimal indeks layanan publik;

8. Sasaran Kegiatan VIII : Penguatan Akuntabilitas Organisasi, dengan 2 indikator kinerja yaitu Nilai minimal akuntabilitas kinerja dan Nilai minimal laporan keuangan.

Secara umum, BBSPJIKKP telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BBSPJIKKP tahun 2023. Rincian atas capaian target kinerja BBSPJIKKP tahun 2023 disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023. berikut adalah rangkuman capaian target kinerja BBSPJIKKP tahun 2023.

Tabel 1.1. Target dan Capaian Kinerja BBSPJIKKP TA 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Fisik (%)		
					Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6 Persen	66,025 persen	100	100
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.	2 Perusahaan	2 Perusahaan	100	100
		2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2 Perusahaan	2 Perusahaan	100	100
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	6 Persen	45,84 Persen	100	100
		2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	20 Persen	41,79 Persen	100	100
		3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan	5 Persen	48,91 Persen	100	100
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	78 Persen	82,28 Persen	100	100
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen	100 Persen	100	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Fisik (%)	
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,8	Indeks 3,849	100	100
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks 78	Indeks 83,16	100	100
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks 3,6	Indeks 3,9	100	100
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai 77	Nilai 77,25	100	100
		2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai 91	Nilai 97	100	100

Dari total pagu anggaran DIPA tahun 2023 sebesar Rp 23.648.636.000 (Dua puluh tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), total anggaran yang terserap hingga akhir tahun 2023 telah mencapai Rp 23.252.853.110 (Dua puluh tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah) atau sebesar 98,33%. Jumlah penerimaan anggaran PNBPN BBSPJIKKP tahun 2023 adalah sebesar Rp 5.965.483.946 dengan capaian sebesar 107,14% atas target penerimaan PNBPN yang ditetapkan sebesar Rp 5.568.042.000.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	1
1.2 Peran Strategis Organisasi.....	
1.3 Struktur Organisasi.....	4
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Rencana Strategis .....	7
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	13
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023.....	20
2.4 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>43</b>
3.1 Analisis Capaian Kinerja Organisasi.....	43
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2023.....	43
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra Balai TA. 2021 – 2024.....	144
3.1.3 Capaian Program Prioritas Nasional TA.2023.....	150
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	156
3.2.1 Realisasi Anggaran Keuangan (RM).....	157
3.2.2 Realisasi Anggaran Keuangan PNBK.....	173
3.3 Analisis Sumber Efisiensi Sumber Daya Secara Umum .....	180
3.4 Penghargaan yang Diperoleh Tahun 2023.....	186
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>188</b>
4.1 Kesimpulan.....	188
4.2 Permasalahan dan Kendala .....	188
4.3 Saran dan Rekomendasi.....	189
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja TA. 2023	
Pengukuran Perjanjian Kinerja TA. 2023	
Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA. 2023	
Realisasi Renstra BBSPJIKKP TA 2021-2024	
Realisasi Program Prioritas Nasional TA 2023	

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Target dan Capaian Kinerja BBSPJIKKP TA 2023	iv
Tabel 1.2	Daftar Jabatan Fungsional Tertentu di BBSPJIKKP	5
Tabel 2.1	Pemetaan sasaran kegiatan BBSPJIKKP	8
Tabel 2.2	Sasaran Kegiatan BBSPJIKKP 2021-2024	11
Tabel 2.3	Rincian Anggaran Berdasarkan Output/ Sub Output dan Komponen Kegiatan TA 2023	21
Tabel 2.4	Revisi Anggaran BBSPJIKKP per KRO Tahun 2023	27
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja BBSPJIKKP Tahun 2023	29
Tabel 3.1	Matriks Alur IKU Kementerian Perindustrian, BSKJI dan Balai Besar Berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian TA. 2021-2024	44
Tabel 3.2	Capaian Rencana Aksi Per Triwulan TA. 2023	50
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 1	54
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 2	52
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 3	59
Tabel 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 4	60
Tabel 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan I	62
Tabel 3.8	Rincian Capaian Indikator Kinerja 1.1	64
Tabel 3.9	Performansi sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan/konsultansi	66
Tabel 3.10	Perbandingan capaian kolaborasi BBSPJIKKP dengan industriTA 2019 - 2023	69
Tabel 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan II	73
Tabel 3.12	Rincian Capaian Indikator Kinerja II.1	74
Tabel 3.13	Perbandingan capaian perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	77
Tabel 3.14	Rincian Capaian Indikator Kinerja II.2	80
Tabel 3.15	Perbandingan capaian perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	81
Tabel 3.16	Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan III	85
Tabel 3.17	Rincian Capaian Indikator Kinerja III.1	87
Tabel 3.18	Perhitungan modal pembuatan pakan ikan dari limbah fleshing	90
Tabel 3.19	Hasil Pelaksanaan Kegiatan DAPATI di CV PSM	93



	Halaman	
Tabel 3.20	Perbandingan capaian produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi tahun 2022-2023	95
Tabel 3.21	Rincian kegiatan DAPATI Tahun 2022	96
Tabel 3.22	Peningkatan Realisasi jumlah PNBP BBSPJIKKP TA. 2023	99
Tabel 3.23	Realisasi jumlah PNBP per Layanan dan Volume Layanan TA 2022-2023	100
Tabel 3.24	Perbandingan Capaian Indikator III.2	101
Tabel 3.25	Rincian Capaian Indikator III.3	105
Tabel 3.26	Perbandingan capaian Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan TA 2021-2024	106
Tabel 3.27	Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri	110
Tabel 3.28	Perbandingan capaian persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Tahun 2021 – 2023	110
Tabel 3.29	Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan IV	113
Tabel 3.30	Perbandingan rekomendasi hasil pengawasan internal ditindaklanjuti oleh satker 2020-2023	115
Tabel 3.31	Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan V	118
Tabel 3.32	Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri Tahun 2017 - 2023	119
Tabel 3.33	Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis VI	122
Tabel 3.34	Perbandingan capaian rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 - 2023	124
Tabel 3.35	Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan VII	126
Tabel 3.36	Nilai Self Assesmen Indeks Layanan Publik	128
Tabel 3.37	Kategori penilaian indeks pelayanan publik	129
Tabel 3.38	Perbandingan capaian indeks minimal layanan publik tahun 2021-2023	129
Tabel 3.39	Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan VIII	133

	Halaman
Tabel 3.40 Rincian Realisasi Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis Jasa Teknis	134
Tabel 3.41 Perbandingan capaian nilai akuntabilitas kinerja satker di lingkungan BSKJI	135
Tabel 3.42 Perbandingan capaian nilai laporan keuangan Tahun 2020 – 2023	141
Tabel 3.43 Perbandingan capaian nilai laporan keuangan satker di lingkungan BSKJI	141
Tabel 3.44 Capaian Kinerja Renstra BBSPJIKKP TA. 2021-2024	145
Tabel 3.45 Capaian Program Prioritas Nasional BBSPJIKKP TA. 2023	150
Tabel 3.46 Perbandingan target dan realisasi output program PN	151
Tabel 3.47 Realisasi Keuangan Berdasarkan Renstra BBSPJIKKP TA. 2021 – 2024	158
Tabel 3.48 Realisasi keuangan berdasarkan indikator Perjanjian Kinerja TA. 2023	159
Tabel 3.49 Rincian realisasi anggaran per sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja TA 2023	163
Tabel 3.50 Realisasi Anggaran Per Triwulan	163
Tabel 3.51 Realisasi Anggaran Kegiatan TA 2023	166
Tabel 3.52 Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2017 - 2023	169
Tabel 3.53 Pagu dan Realisasi Keuangan PNBP Tahun 2023	173
Tabel 3.54 Rincian Realisasi Penerimaan PNBP Berdasarkan Layanan Jasa Tahun 2023	173
Tabel 3.55 Realisasi PNBP TA 2017 - 2023	174
Tabel 3.56 Rincian PNBP Tahun 2018 – 2023	175
Tabel 3.57 Jumlah Pelanggan Berdasarkan Layanan TA 2018-2023	178
Tabel 3.58 Jumlah Sampel/ Alat/ Sertifikat /Pelatihan / Riset/ Konsultasi TA 2017-2023	178
Tabel 3.59 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Berdasarkan Kinerja Anggaran TA. 2023	181
Tabel 3.60 Nilai Kinerja Satker TA 2023 Berdasarkan Aplikasi SMART DJA	185

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi BBSPJIKKP Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2022	6
Gambar 2	Peta Strategis BBSPJIKKP 2021-2024	9
Gambar 3	SPK antara OPTIKJI, BBSPJIKKP dan CV Northy	65
Gambar 4	SK Kepala BBSPJIKKP penunjukan tim pelaksana pendampingan di CV Northy	65
Gambar 5	Pendampingan/mentoring di CV Northy	65
Gambar 6	SPK antara BBSPJIKKP, PT Inastek dan ATMI Solo	67
Gambar 7	Pelaksanaan kegiatan kolaborasi dengan PT Inastek dan ATMI Solo	68
Gambar 8	<i>Rubber anti vibration</i>	68
Gambar 9	Surat Penawaran Kepala BBSPJIKKP kepada PT Dasaplast Nusantara	75
Gambar 10	Surat Direksi PT Dasaplast Nusantara	75
Gambar 11	Kegiatan sosialisasi dan bimtek awareness INDI 4.0 di PT Dasaplast Nusantara	75
Gambar 12	Surat Direksi PT Tri Usaha Pratama Sejahtera	76
Gambar 13	Kegiatan sosialisasi dan bimtek awareness INDI 4.0 di PT Tri Usaha Pratama Sejahtera	76
Gambar 14	SPK dengan PT Karunia Catur Perkasa	81
Gambar 15	SPK dengan PT Surya Poly Packaging	81
Gambar 16	SPK antara BBSPJIKKP dan UD Berkah	92
Gambar 17	SK Tim Pelaksana Konsultasi Teknsi Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing IKM UD Berkah	92
Gambar 18	Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit pada UD Berkah	91-92
Gambar 19	Kompon siap dicetak	94
Gambar 20	Penandatanganan SPK dengan CV PSM	94
Gambar 21	Sosialisasi pemantauan proses	95
Gambar 22	Kunjungan tim pusat OPTIKJI	95
Gambar 23	Persentase Pagu BBSPJIKKP Berdasarkan Jenis Belanja	156
Gambar 24	Nilai Kinerja Anggaran BBSPJIKKP TA 2023	185
Gambar 25	Piagam Penghargaan Sebagai Badan Publik Informatif Kategori Instansi Vertikal DIY Tahun 2023	186
Gambar 26	Piagam Penghargaan Terbaik III Arsiparis Teladan	187

## DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1	Realisasi Anggaran TA 2017 – 2023	169
Grafik 2	Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Balai Lain Tahun 2023	170
Grafik 3	Realisasi Pagu Penerimaan dan Penggunaan PNBP TA 2018 – 2023	175

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Tugas dan Fungsi BBSPJIKKP**

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). BSKJI ini merupakan transformasi BPPI setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2020 tentang Perindustrian, dimana semula tugas pokok BPPI adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang industri, setelah berubah menjadi BSKJI mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan dan penyusunan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. sedangkan tugas untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sudah tidak muncul di dalam perpres ini.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035, Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024, Renstra BSKJI Tahun 2021 – 2024, dan adanya perubahan tusi di BSKJI dan satker dibawahnya dari sebelumnya melaksanakan litbangyasa menjadi melaksanakan layanan jasa industri, maka arah kebijakan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik tahun 2021 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran balai dalam pengembangan industri

Sebagai mitra industri, balai mempunyai kewajiban untuk mengembangkan industri terutama di bidang kulit, karet dan plastik agar mempunyai daya saing. sebagai lembaga inkubasi melakukan pendampingan dan pembinaan untuk wira usaha baru, pemberian konsultasi dalam pemecahan permasalahan industri serta penerapan teknologi yang dalam

pelaksanaannya dengan berkolaborasi dengan instansi lain adalah upaya untuk meningkatkan pengembangan industri.

2. Mengembangkan layanan jasa industri

Perubahan tuisi dari sebelumnya menjalankan litbangyasa menjadi pelayanan jasa industri, secara langsung merubah arah kegiatan yang sekarang berfokus pada pelayanan jasa industri. BBSPJIKKP berusaha sebanyak mungkin melayani industri yang membutuhkan layanan, melalui pengembangan jenis layanan jasa yang ada maupun jenis layanan baru yang mempunyai potensi pasar yang menjanjikan dan bisa dilakukan oleh BBSPJIKKP.

3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan jasa industri kulit, karet, dan plastik dengan memperkuat sumber daya dan organisasi.

Agar pelayanan jasa industri dapat maksimal perlu adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan jasa, upaya yang dapat dilakukan melalui penguatan sumber daya baik SDM maupun sarana prasarana layanan jasa, serta struktur organisasi yang kaya fungsi, fleksibel dan adaptif.

4. Meningkatkan jejaring dengan pengguna layanan jasa, lembaga / negara donor, institusi pembina industri terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menjaga keberlangsungan layanan jasa dan meningkatkan kapabilitas layanan, hubungan yang baik dengan stakeholder perlu dibina dan diperluas.

5. Meningkatkan pelayanan prima.

Keberhasilan layanan jasa kepada pelanggan tidak terlepas dari umpan balik yang diberikan oleh pelanggan, salah satunya tentang penilaian kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa yang mereka terima. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya melalui peningkatan capaian aspek-aspek layanan publik sehingga layanan jasa yang diberikan dapat memuaskan pelanggan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, bahwa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik adalah salah satu unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri

dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kulit, karet, dan plastik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBSPJIKKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri kulit, karet, dan plastik;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri kulit, karet, dan plastik;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## **1.2. Peran Strategis Organisasi**

Visi BBSPJIKKP adalah Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam bidang industri, dengan harapan peran BBSPJIKKP sebagai salah satu unit pelaksana teknis dapat membantu dan melaksanakan harapan masyarakat khususnya masyarakat industri dalam mengembangkan pertumbuhan industri serta dapat membuka perluasan lapangan kerja baru, melalui potensi yang

dimiliki BBSPJIKKP dapat membantu industri melalui layanan jasa sebagai berikut :

1. Layanan Pengujian
2. Layanan Kalibrasi
3. Layanan Sertifikasi
4. Layanan Pelatihan Teknis
5. Layanan Konsultasi/Bimbingan Teknis
6. Layanan Audit Teknologi
7. Layanan Pemeriksa Halal
8. Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) Gas Rumah Kaca
9. Lembaga Inspeksi Teknis
10. Layanan Miniplant Kulit
11. Layanan Miniplant Karet
12. Layanan Uji Profisiensi
13. Jasa Teknis Lainnya

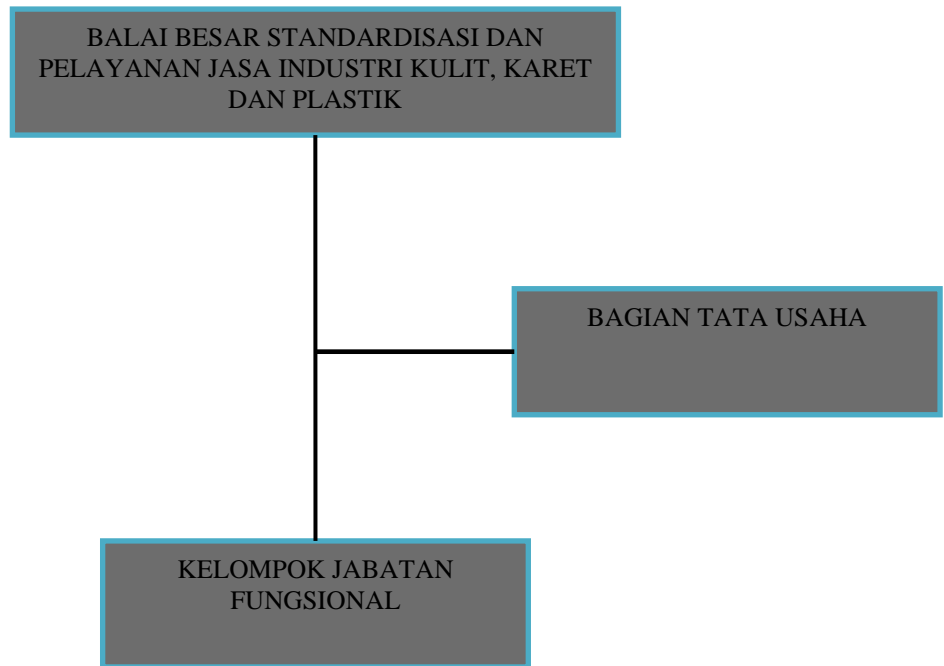
### **13.1. Struktur Organisasi**

Terhitung sejak dialih fungsikan pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Perindustrian sesuai Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1340 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemindehan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan tanggal 27 Desember 2020, dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, bahwa struktur organisasi BBSPJIKKP terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, terdapat 2 struktural yaitu Kepala Balai dan Kepala Bagian Tata Usaha. Selain 2 (dua) pejabat struktural tersebut, lingkungan BBSPJIKKP dipenuhi oleh jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Adapun jabatan fungsional yang ada di BBSPJIKKP sebagai berikut:



Tabel 1.2 Daftar Jabatan Fungsional Tertentu di BBSPJIKKP

NO	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JENJANG JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Perekayasa	Ahli Utama	1
		Ahli Madya	0
		Ahli Muda	0
		Ahli Pertama	2
2.	Pembina Industri	Ahli Utama	0
		Ahli Madya	2
		Ahli Muda	10
		Ahli Pertama	3
3.	Teknisi Litkayasa	Penyelia	0
		Mahir	2
		Terampil	5
4.	Asesor Manajemen Mutu Industri	Ahli Utama	1
		Ahli Madya	2
		Ahli Muda	8
		Ahli Pertama	6
5.	Penguji Mutu Barang	Ahli Madya	1
		Ahli Muda	3
		Ahli Pertama	4
		Penyelia	2
		Mahir	1
		Terampil	10
		Pemula	1
6.	Analisis SDMA	Ahli Muda	1
		Ahli Pertama	1
7.	Pranata Komputer	Ahli Muda	1
		Ahli Pertama	1
		Penyelia	1
		Mahir	1
8.	Arsiparis	Ahli Muda	1
		Mahir	1
9.	Perencana	Ahli Muda	1
10.	Analisis Anggaran	Ahli Muda	1
11.	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Ahli Muda	1
12.	Pengelola Barang dan Jasa	Ahli Muda	1
13.	Pranata Keuangan APBN	Penyelia	1



Gambar 1. Struktur Organisasi BBSPJIKKP Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2022

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024. Renstra ini merupakan suatu komitmen perencanaan yang disesuaikan untuk dijadikan sebagai acuan/alat bantu, serta merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

#### **2.1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) BBSPJIKKP Tahun 2020-2024 merupakan pedoman bagi BBSPJIKKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 2020-2024. Pada akhir tahun 2023, BBSPJIKKP menyusun Revisi Renstra periode 2021-2024 yang mengacu kepada Renstra Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri (BSKJI) periode 2021-2024. Adapun Tujuan BBSPJIKKP yang akan dicapai hingga tahun 2024 yaitu : “Meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas”.

Pengembangan sasaran kegiatan BBSPJIKKP sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Perindustrian (Renstra Kemenperin Revisi 2020-2024) yang diturunkan menjadi sasaran strategis BSKJI. Penentuan sasaran kegiatan BBSPJIKKP perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BBSPJIKKP yang sesuai dengan tujuan BSKJI yaitu:

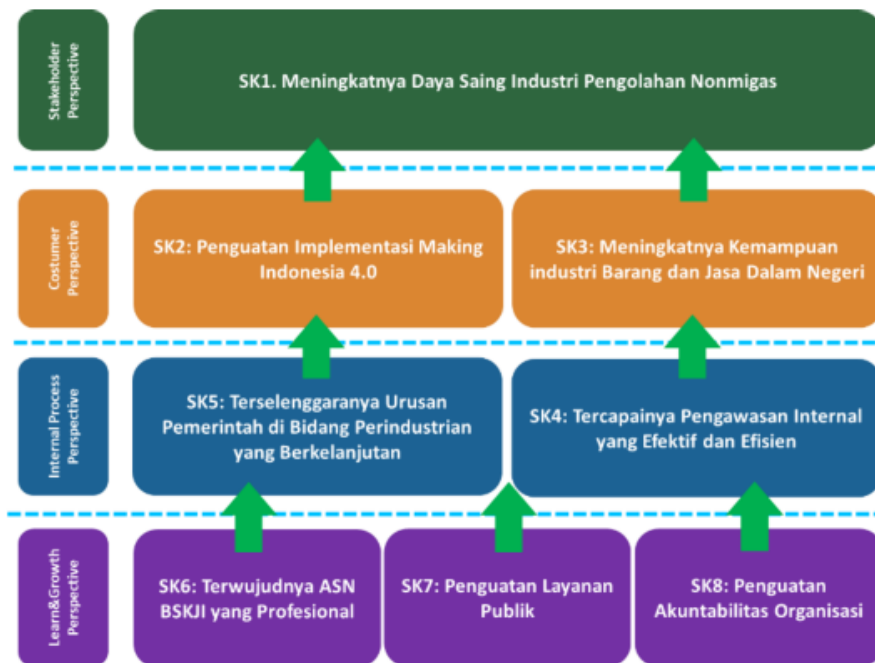
- T1 : Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri
- T2 : Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3 : Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- T4 : Meningkatkan *good governance*

Pengembangan sasaran kegiatan BBSPJIKKP sesuai dengan 13 sasaran strategis Kemenperin yang diturunkan menjadi 9 sasaran program BSKJI (Renstra BSKJI 2021-2024) dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pemetaan sasaran kegiatan BBSPJIKKP

Acuan SS Kemenperin	Acuan SP BSKJI	Sasaran Kegiatan BBSPJIKKP	Tujuan BBSPJIKKP
SS1	SP1	SK 1 : Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SS2	SP2	SK 2 : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SS3	SP3	SK 3 : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS9	SP6	SK 4 : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS8	SP5	SK 5 : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS10	SP7	SK 6 : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	T4
SS11	SP8	SK 7 : Penguatan Layanan Publik	T3
SS12/13	SP9	SK 8 : Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 8 sasaran kegiatan BBSPJIKKP yang ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran program BSKJI. Penyusunan kedelapan sasaran kegiatan BBSPJIKKP pada kerangka perspektif BBSPJIKKP ditunjukkan pada Gambar 2 yang dapat dijadikan sebagai acuan peta strategi BBSPJIKKP dalam perencanaan strategis 2021-2024.



Gambar 2. Peta Strategis BBSPJIKKP 2021-2024

Berikut uraian mengenai sasaran strategis BBSPJIKKP untuk tahun 2021-2024.

### **PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN**

#### **Sasaran Kegiatan 1 :**

Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (Persen)

### **PERSPEKTIF PELANGGAN**

#### **Sasaran Kegiatan 2 :**

Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 (Perusahaan)
2. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri (Perusahaan)

**Sasaran Kegiatan 3 :**

Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
2. Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri
3. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan
4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

**PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL**

**Sasaran Kegiatan 4 :**

Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (Persen)

**Sasaran Kegiatan 5 :**

Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri (Indeks)

**PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI**

**Sasaran Kegiatan 6 :**

Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN (Indeks)

**Sasaran Kegiatan 7 :**

Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Nilai minimal indeks layanan publik (Nilai)

**Sasaran Kegiatan 8 :**

Penguatan Akuntabilitas Organisasi, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja (Nilai)
2. Nilai minimal laporan keuangan (Nilai)

Indikator kinerja tujuan juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai adalah pada periode 2021-2024 adalah :

- a. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
- b. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0
- c. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri
- d. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
- e. Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri
- f. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan
- g. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

Keseluruhan sasaran kegiatan BBSPJIKKP dan pemetaannya terhadap keempat tujuan BBSPJIKKP yang ditunjukkan pada tabel 2.2. Sesuai indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan, maka keempat tujuan BBSPJIKKP memiliki indikator kinerja sebagai berikut :

T1 : "Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri", memiliki target capaian sebesar 51% pada tahun 2021 dan meningkat hingga 62% pada tahun 2024.

T2 : "Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri", memiliki target capaian sebesar 46% pada tahun 2021 dan meningkat hingga 49% pada tahun 2024.

T3 : "Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri", memiliki target capaian sebesar 60% pada tahun 2021 dan meningkat hingga 70% pada tahun 2024.

T4 : "Meningkatkan *good governance*", memiliki target capaian sebesar 57% pada tahun 2021 dan meningkat hingga 76% pada tahun 2024.

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan BBSPJIKKP 2021-2024

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target			
			2021	2022	2023	2024
T1		Peningkatan kemampuan infrastruktur ( <i>hard</i> dan <i>soft</i> ) penunjang	51	54	58	62

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target			
			2021	2022	2023	2024
		pertumbuhan industri (Persen)				
T1	SK2	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 (Perusahaan)	0	0	2	2
T1	SK2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri (Perusahaan)	2	3	2	3
T1	SK3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi (Persen)	5	5	6	7
T1	SK3	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri (Persen)	5	5	20	23
T1	SK3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan (Persen)	N/A	N/A	5	7
T1	SK3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (Persen)	72	75	78	80
T2		Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	46	48	48	49
T2	SK1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (Persen)	N/A	N/A	6	7
T2	SK5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri (indeks)	3.7	3.75	3.8	3.85
T3		Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	60	63	67	70



Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target			
			2021	2022	2023	2024
T3	SK7	Nilai minimal indeks layanan publik (indeks)	3.01	3.51	3.6	3.7
T4		Peningkatan <i>good governance</i>	57	62	68	76
T4	SK4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (Persen)	100	100	100	100
T4	SK6	Rata-rata indeks profesionalitas ASN (indeks)	74	76	78	81
T4	SK8	Nilai minimal akuntabilitas kinerja (nilai)	82	82.3	77	80.1
T4	SK8	Nilai minimal laporan keuangan (nilai)	90	90	91	92

## 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja (Renkin) BBSPJIKKP yang disusun ini menyajikan indikator-indikator kinerja sasaran maupun kegiatan. Pada saat penyusunan, indikator kinerja yang ditetapkan merupakan indikator kinerja yang dianggap terbaik. Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman serta referensi-referensi tambahan, indikator-indikator yang tidak sesuai nantinya akan mengalami perubahan.

Sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renkin diambil dari dokumen Renstra. Pada saat penyusunan Renstra, sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran yang dianggap terbaik. Namun demikian, seperti juga pada indikator kinerja, peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengakibatkan sasaran-sasaran yang ditetapkan menjadi kurang tepat dan perlu disempurnakan. Sasaran-sasaran tersebut mempunyai hubungan yang erat dalam kaitannya dengan tujuan masing-masing.

Rencana Kinerja yang akan dijabarkan ini merupakan Rencana Kinerja Tahun 2023 hasil revisi karena adanya perubahan atau revisi pada Renstra BSKJI pada bulan Oktober 2023 sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai penjabaran dari perencanaan strategis, sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2023 untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

### **PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN**

#### **Sasaran Kegiatan 1 :**

Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (Persen) dengan target 6 persen.

Kegiatan kolaborasi sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak. Pihak pertama adalah UPT, pihak kedua dan seterusnya adalah pihak di luar BSKJI seperti perusahaan industri, pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, dan pihak lain yang dapat bekerjasama dalam upaya peningkatan produktivitas/efisiensi industri.

Kegiatan kolaborasi adalah kegiatan yang didukung oleh tiga pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas/efisiensi industri, dimana kegiatan dapat berbentuk problem solving industri, bimbingan/pendampingan teknis atau kegiatan lain yang dapat diukur outcome-nya. Hasil kegiatan kolaborasi termasuk tidak terbatas pada spesifikasi, rancangan, model atau prototipe.

Outcome hasil kolaborasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri.

### **PERSPEKTIF PELANGGAN**

#### **Sasaran Kegiatan 2 :**

Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 (Perusahaan) dengan target 2 perusahaan

Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan

kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi khususnya di era industri 4.0. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan Balai – Balai sebagai penyedia layanan jasa industri.

Kegiatan fasilitasi industri 4.0 dapat berupa assesmen, pelatihan (manager transformasi 4.0, awareness industri 4.0 dan pelatihan terkait 4.0 lainnya), pendampingan, konsultasi, dan bimbingan transformasi industri 4.0.

2. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri (Perusahaan) dengan target 2 perusahaan

Dalam dokumen Making Indonesia 4.0, terdapat 10 prioritas nasional salah satunya adalah akomodasi standar berkelanjutan. Standar berkelanjutan berhubungan erat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, salah satu tujuan dari Standarisasi Industri adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, Kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, standarisasi industri sangat relevan dan merupakan bagian penting dalam penguatan Making Indonesia 4.0.

Kegiatan fasilitasi standarisasi industri dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standarisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses, standar berkelanjutan).

### **Sasaran Kegiatan 3 :**

Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi (Persen) dengan target 6 persen.

Optimalisasi teknologi serta rekayasa proses dan produk dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahan baku sumber daya alam atau hasil industri hulu menjadi pendukung utama produk industri manufaktur dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan BSKJI dalam

meningkatkan kapabilitas industri khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultasi.

Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan system manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri.

Outcome kerjasama jasa konsultasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi industri/system manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan DAPATI.

2. Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri (Persen) dengan target 20 persen.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis serta layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBPN tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja layanan UPT BSKJI.

Melalui kegiatan peningkatan PNBPN layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

3. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan (Persen) dengan target 5 persen

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis, serta layanan jasa industri.

Yang dimaksud dengan hasil layanan jasa industri adalah penjumlahan seluruh hasil Jasa Pelayanan dalam tahun berjalan, dengan satuan sebagai berikut:

1. JPT Pengujian (satuan: laporan hasil uji)
2. JPT Kalibrasi (satuan: laporan hasil kalibrasi)
3. JP Pelatihan Teknis (satuan: orang yang dilatih)
4. JP Sertifikasi (satuan: sertifikat/hasil surveillance)

5. JP Inspeksi Teknik (satuan: laporan hasil inspeksi)
  6. JP Konsultansi (satuan: laporan hasil konsultansi)
  7. JPT Teknologi Proses dan Mesin (satuan: laporan hasil teknologi proses dan mesin)
  8. Jasa RBPI (satuan: laporan hasil RBPI)
  9. JPT lainnya (satuan: order)
4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (Persen) dengan target 78 persen
- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dihitung berdasarkan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker, dengan rumus:  $RP3DN = RAP3DN / TotAP3DN$
- RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Satker  
RAP3DN = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.  
TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.
- Adapun akun terpilih yang dihitung dalam formula ini adalah akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

#### **PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL**

##### **Sasaran Kegiatan 4 :**

Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (Persen) dengan target 100 persen
- Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

#### **Sasaran Kegiatan 5 :**

Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri (Indeks) dengan target indeks 3,8

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, dan nilai indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik.

#### **PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI**

#### **Sasaran Kegiatan 6 :**

Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN (Indeks) dengan terget indeks 78

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di Satker BBKPP, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019

### **Sasaran Kegiatan 7 :**

Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Nilai minimal indeks layanan publik (Nilai) dengan target nilai 3,6

Dalam peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023, terdapat Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

### **Sasaran Kegiatan 8 :**

Penguatan Akuntabilitas Organisasi, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja (Nilai) dengan target nilai 77

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja

Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

2. Nilai minimal laporan keuangan (Nilai) dengan target nilai 91

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan *desk review* dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.

### **2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023**

Kegiatan-kegiatan dalam Rencana Kinerja BBSPJIKKP Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Renstra BBSPJIKKP Tahun 2021 – 2024, Renstra BSKJI Tahun 2021 – 2024, dan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020 – 2024.

Pagu BBSPJIKKP TA 2023 adalah sebesar Rp 23.648.636.000 (Dua puluh tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sumber dana : Rupiah murni sebesar Rp 18.331.234.000 dan PNBPN sebesar Rp 5.317.402.000.



Adapun rincian dari masing-masing jenis anggaran berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO) dan Komponen kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rincian Anggaran Berdasarkan Output/ Sub Output dan Komponen Kegiatan TA 2023

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Jumlah
<b>247199</b>	<b>BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK</b>	<b>23.648.636.000</b>
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	3.079.130.000
6077	Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	3.079.130.000
6077.AEC	Kerja sama	20.000.000
6077.AEC.003	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik	20.000.000
51	Penjajakan kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis	20.000.000
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	147.172.000
6077.AEF.005	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik	147.172.000
51	Partisipasi dalam pameran/ promosi	56.492.000
52	Diseminasi	48.840.000
53	Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan	41.840.000
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada industri	2.423.920.000
6077.BAD.007	Jasa pelayanan teknis pengujian industri kulit, karet dan plastik	468.326.000
51	Jasa pelayanan teknis pengujian	416.043.000

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Jumlah
52	Pemeliharaan akreditasi laboratorium uji	52.283.000
6077.BAD.015	Jasa pelayanan teknis kalibrasi industri kulit, karet dan plastik	84.183.000
51	Jasa pelayanan teknis kalibrasi	84.183.000
6077.BAD.027	Jasa pelayanan teknis sertifikasi industri kulit, karet dan plastik	996.960.000
51	Jasa pelayanan teknis sertifikasi	849.838.000
52	Jasa pelayanan sertifikasi profesi	23.417.000
53	Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi	123.705.000
6077.BAD.039	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri kulit, karet dan plastik	187.793.000
51	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	187.793.000
6077.BAD.044	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen industri kulit, karet dan plastik	12.379.000
51	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen	12.379.000
6077.BAD.085	Jasa pelayanan inspeksi teknis industri kulit, karet dan plastik	164.955.000
51	Jasa pelayanan inspeksi teknis	39.604.000
52	Pemeliharaan akreditasi lembaga inspeksi teknis	58.007.000
53	Jasa pelayanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca	12.772.000
54	Pemeliharaan akreditasi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca	54.572.000
6077.BAD.088	Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi Industri Kulit, Karet dan Plastik	70.900.000
51	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi	29.900.000
52	Pemeliharaan akreditasi lembaga uji profisiensi	41.000.000
6077.BAD.089	Jasa pelayanan pemeriksa dan pengujian produk halal industri kulit, karet dan plastik	400.534.000

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Jumlah
51	Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal	366.334.000
52	Pemeliharaan akreditasi lembaga pemeriksa halal	34.200.000
6077.BAD.093	Jasa Pelayanan Penyedia Material Acuan Standar	37.890.000
51	Miniplant Karet	37.890.000
6077.BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	33.148.000
6077.BDI.005	Pemanfaatan Teknologi Industri Kulit, Karet dan Plastik	33.148.000
51	Pemanfaatan paket teknologi/supervisi/konsultasi	33.148.000
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	378.930.000
6077.CAH.006	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri kulit, karet dan plastik	378.930.000
51	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	378.930.000
6077.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	75.960.000
6077.QDI.002	Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultasi	75.960.000
53	Jasa konsultasi program DAPATI	75.960.000
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen	20.569.506.000
6042	Kegiatan : Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri	20.569.506.000
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	19.542.131.000
6042.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	121.000.000
51	Pengelolaan Data dan Informasi	121.000.000

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Jumlah
6042.EBA.994	Layanan Perkantoran	19.421.131.000
1	Gaji dan Tunjangan	14.463.460.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.957.671.000
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	627.375.000
6042.EBB.951	Layanan Sarana Internal	627.375.000
51	Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	388.000.000
52	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	155.900.000
53	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	83.475.000
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	320.000.000
6042.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	320.000.000
51	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	320.000.000
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	80.000.000
6042.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	15.000.000
51	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	15.000.000
6042.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	15.000.000
51	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	15.000.000
6042.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	20.000.000
51	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	20.000.000
6042.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	14.408.000

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Jumlah
51	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP	14.408.000
6042.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	15.592.000
51	Penyelenggaraan Kearsipan	15.592.000

Dalam rangka mewujudkan Rencana Kinerja BBSPJIKKP tahun 2023, maka BBSPJIKKP mendapatkan dukungan keuangan melalui anggaran DIPA Tahun 2023 dengan nomor : SP DIPA-019.07.2.247199/2023 tanggal 30 November 2022. Pagu awal BBSPJIKKP Tahun 2023 adalah sebesar 23.628.746.000 (Dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan sumber dana Rupiah murni sebesar Rp 18.615.074.000 dan PNPB sebesar Rp 5.013.672.000,-. BBSPJIKKP telah melakukan revisi DIPA sebanyak 14 (empat belas) kali sehingga pagu akhir menjadi Rp 23.648.636.000. Revisi DIPA yang dilakukan oleh BBSPJIKKP yaitu:

1. Revisi DIPA ke-1 tanggal 27 Desember 2022 (Revisi DIPA kewenangan DJA) Pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global. Nilai pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) BBSPJIKKP adalah sebesar Rp 1.494.184.000 (Nota Dinas BSKJI Nomo 684/BSKJI/PR/XII./2022 tanggal 21 Desember 2022).
2. Revisi DIPA ke-2 tanggal 30 Januari 2023 (Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA)
3. Revisi DIPA ke-3 tanggal 22 Februari 2023 (Revisi DIPA kewenangan DJA) Revisi ini merupakan revisi penambahan pagu anggaran terkait kegiatan DAPATI yang semula berada pada DIPA BSKJI berpindah ke DIPA masing-masing satker termasuk BBSPJIKKP yang memperoleh pagu tambahan sebesar Rp 75.960.000.
4. Revisi DIPA ke-4 tanggal 18 April 2023 (Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA)
5. Revisi DIPA ke-5 tanggal 13 Juni 2023 (Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA)

6. Revisi DIPA ke-6 tanggal 11 Juli 2023 (Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA)
7. Revisi DIPA ke-7 tanggal 25 Juli 2023 (Revisi DIPA kewenangan DJA)  
Revisi ini merupakan revisi anggaran berupa penghapusan pagu blokir sebesar Rp 1.494.184.000.
8. Revisi DIPA ke-8 tanggal 5 September 2023 (Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA)
9. Revisi DIPA ke-9 tanggal 5 Oktober 2023 (Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA)
10. Revisi DIPA ke-10 tanggal 24 Oktober 2023 (Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA)
11. Revisi DIPA ke-11 tanggal 30 November 2023 (Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA)
12. Revisi DIPA ke-12 tanggal 11 Desember 2023 (Revisi penambahan pagu belanja pegawai sebesar Rp 1.134.384.000)
13. Revisi DIPA ke-13 tanggal 15 Desember 2023 (Revisi penambahan pagu PNBP sebesar Rp 303.730.000 dan revisi perubahan target PNBP 2023 semula Rp 5.250.000.000 menjadi Rp 5.568.042.000)
14. Revisi DIPA ke-14 tanggal 22 Desember 2023 (Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA)

Rincian revisi anggaran per output disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4 Revisi Anggaran BBSPJIKKP per KRO Tahun 2023

Kode	KRO	Pagu Awal (Rp.000)	Pagu Revisi 1 (Rp.000)	Pagu Revisi 2 (Rp.000)	Pagu Revisi 3 (Rp.000)	Pagu Revisi 4 (Rp.000)	Pagu Revisi 5 (Rp.000)	Pagu Revisi 6 (Rp.000)	Pagu Revisi 7 (Rp.000)
6077.AEC	Kerja Sama	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	147.172	147.172	147.172	147.172	147.172	147.172	147.172	147.172
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	1.879.715	1.879.715	1.879.715	1.879.715	1.879.715	1.879.715	1.879.715	1.879.715
6077.BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	33.148	33.148	33.148	33.148	33.148	33.148	33.148	33.148
6077.CAH	Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan	635.630	635.630	635.630	635.630	635.630	635.630	635.630	635.630
6077.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	-	-	-	75.960	75.960	75.960	75.960	75.960
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	19.901.931	19.901.931	19.901.931	19.901.931	19.901.931	19.901.931	19.901.931	18.407.747
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	611.150	611.150	611.150	611.150	611.150	611.150	611.150	611.150
6042.EBS	Layanan Manajemen SDM Internal	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Kode	KRO	Pagu Revisi 8 (Rp.000)	Pagu Revisi 9 (Rp.000)	Pagu Revisi 10 (Rp.000)	Pagu Revisi 11 (Rp.000)	Pagu Revisi 12 (Rp.000)	Pagu Revisi 13 (Rp.000)	Pagu Revisi 14 (Rp.000)
6077.AEC	Kerja Sama	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	147.172	147.172	147.172	147.172	147.172	147.172	147.172
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	1.879.715	1.879.715	2.136.415	2.136.415	2.136.415	2.423.920	2.423.920
6077.BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	33.148	33.148	33.148	33.148	33.148	33.148	33.148
6077.CAH	Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan	635.630	635.630	378.930	378.930	378.930	378.930	378.930
6077.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	75.960	75.960	75.960	75.960	75.960	75.960	75.960
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18.407.747	18.407.747	18.407.747	18.407.747	19.542.131	19.542.131	19.542.131
6042.EBB	Layanan Sarana Dan Prasarana Internal	611.150	611.150	611.150	611.150	611.150	627.375	627.375
6042.EBS	Layanan Manajemen SDM Internal	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

#### 2.4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun dan dengan dukungan pembiayaan yang telah disetujui dalam bentuk DIPA, maka ditetapkanlah kinerja yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja BBSPJIKKP tahun 2023 disusun sesuai dengan Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023 yang disusun dengan mempertimbangkan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan melakukan penyesuaian sasaran dan indikator kinerja yang dianggap masih relevan. Berdasarkan perencanaan kinerja BBSPJIKKP tahun 2023 yang telah disusun sebelumnya, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 BBSPJIKKP yang disusun adalah sebagai berikut sebagai berikut:



**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja BBSPJIKKP Tahun 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6	Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.	2	Perusahaan
		2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2	Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	6	Persen
		2	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	20	Persen
		3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan	5	Persen
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	78	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100	Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,8	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	3,6	Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77	Nilai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Satuan
		2	Nilai minimal laporan keuangan	91	Nilai

Dari 13 (tigabelas) indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja diatas, yang termasuk dalam Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
2. Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0
3. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri
4. Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi
5. Meningkatnya PNBP layanan jasa industri
6. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan
7. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

Untuk mencapai target dari indikator kinerja dari sasaran kegiatan tersebut diperlukan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, adapun perencanaan kegiatan untuk mendukung capaian perjanjian kinerja revisi tersebut sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBSPJIKKP Tahun 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1 Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6	Persen	10	Jan : Koordinasi internal (tim konsultasi)  Feb : Sosialisasi program Pinoti  Mar : Sosialisasi program Pinoti, seleksi administrasi, bootcamp industri dan seleksi	45	Apr : Koordinasi internal  Mei : Pengumuman tenan terpilih dan penandatanganan perjanjian kerjasama  Jun : mentoring	85	Jul : mentoring  Agt : mentoring  Sep : mentoring	100	Okt : Mentoring  Nop : Monitoring dan evaluasi kegiatan Pinoti  Des : Pelaporan kegiatan Pinoti

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
					5	Jan : - Feb : pembentukan tim kerja Mar : penjajagan kolaborasi dengan IKM	29	Apr : koordinasi persiapan project kolaborasi Mei : perbaikan proses creaming lateks Jun : perbaikan proses creaming, pemantauan mutu produk lateks pekat	71	Jul : perbaikan proses creaming lateks, pemantauan mutu produk lateks pekat, pengembangan produk busa lateks Agt : pemantauan mutu produk lateks pekat, pengembangan produk busa lateks Sep : awareness persyaratan peralatan pelindung diri	100	Okt : pemantauan mutu produk lateks pekat dan busa lateks Nop : monitoring Des : evaluasi dan pelaporan	
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	2	Perusahaan	20	Jan : identifikasi kebutuhan pelatihan Feb : peningkatan kompetensi SDM Mar : studi banding ke B4T dan optikji	50	Apr : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji) Mei : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji) Jun : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji)	80	Jul : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji) Agt : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji) Sep : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji)	100	Okt : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji) Nop : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji) Des : melakukan asesmen 4.0 ke industri (kerja sama dg B4T dan Optikji)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
		2	Perusahaan yang terfasilitasi standardisasi industri	2	Perusahaan	25	Jan : Pengkajian permohonan layanan konsultasi  Feb : Pembentukan tim  Mar : Persiapan materi	50	Apr : Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis  Mei : Pengkajian permohonan layanan konsultasi  Jun : Pembentukan tim dan persiapan materi	75	Jul : Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis  Agt : Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis  Sep : Pengkajian permohonan layanan konsultasi	100	Okt : Pembentukan tim dan persiapan materi  Nop : Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis  Des : Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	6	Persen	10	Jan : Penjaringan industri untuk kegiatan Dapati  Feb : Finalisasi rencana pelaksanaan kegiatan Dapati, penandatanganan surat perjanjian kontrak  Mar : Pelaksanaan kegiatan Dapati	50	Apr : Pelaksanaan kegiatan Dapati  Mei : Pelaksanaan kegiatan Dapati Jun : Pelaksanaan kegiatan Dapati	70	Jul : Pelaksanaan kegiatan Dapati  Agt : Pelaksanaan kegiatan Dapati.  Sep : Pelaksanaan kegiatan Dapati.	100	Okt : Pelaksanaan kegiatan Dapati  Nop : Monitoring dan evaluasi kegiatan Dapati  Des : Pelaporan kegiatan Dapati

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
		2	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	40	Persen	31.72	Jan : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN, target PNBPN Rp. 789.003.000  Feb : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN, target PNBPN Rp. 522.133.000  Mar : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN, target PNBPN Rp. 558.929.000	47.65	Apr : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN target PNBPN Rp. 340.174.000  Mei : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN target PNBPN Rp. 297.617.000  Jun : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN target PNBPN Rp. 300.946.000	79.48	Jul : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN target PNBPN Rp. 546.467.000  Agt : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN target PNBPN, Rp. 715.086.000  Sep : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN, target PNBPN Rp. 612.754.000	100	Okt : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN, target PNBPN Rp. 436.576.000  Nop : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN, target PNBPN Rp. 578.726.000  Des : - Pelaksanaan layanan jasa kepada pelanggan - Monitoring penerimaan PNBPN target PNBPN Rp. 193.461.000 dan target total PNBPN Rp. 5.889.872.000 , dan perhitungan peningkatan PNBPN dibandingkan dengan PNBPN tahun sebelumnya

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
		3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan	5	Persen	16	Jan : Menghitung hasil layanan jasa bulan Januari  Feb : Menghitung hasil layanan jasa bulan Februari  Mar : Menghitung hasil layanan jasa bulan Maret	38	Apr : Menghitung hasil layanan jasa bulan April  Mei : Menghitung hasil layanan jasa bulan Mei  Jun : Menghitung hasil layanan jasa bulan Juni	75	Jul : Menghitung hasil layanan jasa bulan Juli  Agt : Menghitung hasil layanan jasa bulan Agustus  Sep : Menghitung hasil layanan jasa bulan September	100	Okt : Menghitung hasil layanan jasa bulan Oktober  Nop : Menghitung hasil layanan jasa bulan November  Des : Menghitung hasil layanan jasa bulan Desember dan peningkatan jumlah hasil layanan jasa dibandingkan dengan tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	78	Persen	25	<p>Jan : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Feb: Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Mar: Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p>	50	<p>Apr : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Mei : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Jun : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p>	75	<p>Jul : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Ags : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Sep : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p>	100	<p>Okt :Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Nop :Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa</p> <p>Des : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa , dan menghitung capaian realisasinya.</p>
Laporan Akuntabilitas Kinerja BBSP/IKKP TA. 2023													



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100	Persen	25	Jan : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa  Feb: Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa  Mar: Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah	50	Apr : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa  Mei : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa  Jun : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	75	Jul : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa  Ags : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa  Sep : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	100	Okt :Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa  Nop :Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa  Des : Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa , dan menghitung capaian realisasinya.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
						disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa							
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,8	Indeks	20	Jan : Pengumpulan data responden Feb : Pengumpulan data responden Mar : Pengumpulan data responden	50	Apr : Pengumpulan data responden Mei : Persiapan Pelaksanaan Temu & Survey Pelanggan Jun : Pelaksanaan Temu & Survey Pelanggan	75	Jul : Pengumpulan data Survey Agt : Pengelompokkan data Survey Sep : Penghitungan data survey	100	Okt : Penyusunan Laporan hasil survey Nop : Perbaikan dan Finalisasi Laporan hasil Survey Des : Penggandaan Laporan hasil survey

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	Indeks	25	Jan : Monitoring data indeks profesionalitas ASN  Feb : Monitoring data indeks profesionalitas ASN  Mar : Monitoring data indeks profesionalitas ASN	50	Apr : Monitoring data indeks profesionalitas ASN  Mei : Monitoring data indeks profesionalitas ASN  Jun : Monitoring dan evaluasi data indeks profesionalitas ASN	75	Jul : Monitoring data indeks profesionalitas ASN  Ags : Monitoring data indeks profesionalitas ASN  Sep : Monitoring data indeks profesionalitas ASN	100	Okt : Monitoring data indeks profesionalitas ASN  Nov : Monitoring data indeks profesionalitas ASN  Des : Monitoring dan evaluasi data indeks profesionalitas ASN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	3,6	Indeks	20	Jan :Pengumpulan bahan data layanan baru BBSPJIKKP  Feb :Penyusunan bahan data layanan baru BBSPJIKKP  Mar :Koordinasi Internal	50	Apr : Penyusunan Standar Pelayanan Penyedia Uji Profesiensi  Mei :Penyusunan Standar Pelayanan Validasi, Verifikasi dan TKDN, serta Inspeksi  Jun : Penyusunan Standar Pelayanan Audit Teknologi	80	Jul : Penyusunan Standar Pelayanan Miniplant Penyamakan Kulit.  Agt :Penyusunan Standar Pelayanan Miniplant Karet  Sep :Penyusunan Standar Pelayanan Produksi Produk Kulit	100	Okt : Penyusunan Standar Pelayanan Jasa Lainnya  Nop :Review seluruh Standar Pelayanan  Des :Penetapan Standar Pelayanan BBSPJIKKP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77	Nilai	25	Jan : Menyusun laporan triwulan IV, Laporan Kinerja 2021, Perkin 2023 dan Rencana Kinerja 2023  Feb : Persiapan penyusunan laporan PP 39 triwulan I 2023  Mar : Penyusunan laporan PP 39 triwulan I TA 2023	50	Apr : Penilaian SAKIP, Penyusunan laporan PP 39 triwulan I TA 2023 dan Penilaian SAKIP  Mei : Persiapan penyusunan laporan PP 39 triwulan II 2023  Jun : Penyusunan laporan PP 39 triwulan II TA 2023	75	Jul : Menyusun dan melengkapi laporan PP 39 triwulan II TA 2023  Ags : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP  Sep : Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP, Penyusunan laporan PP 39 triwulan III TA 2023	100	Oktober : Menyusun dan melengkapi laporan PP 39 triwulan III TA 2023  November : Review Renstra, dan Penyusunan anggaran TA 2023  Desember : Menyusun dan melengkapi Renja TA 2023, persiapan penyusunan Laporan Triwulan IV TA 2023 dan LAKIP TA 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi								
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
					Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	Target Antara (%)	Rencana Kegiatan	
		2	Nilai minimal laporan keuangan	91	Nilai	25	Jan : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester II TA 2021  Feb : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester II TA 2021  Maret : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester II TA 2021	50	Apr : Penilaian Laporan Keuangan  Mei : Penilaian Laporan Keuangan  Jun : Penilaian Laporan Keuangan	75	Jul : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023  Agustus : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester I TA 2023  Sep : Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Triwulan III TA 2023	100	Oktober :Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Triwulan III TA 2023  November :Menyusun dan melengkapi laporan keuangan  Desember :Menyusun dan melengkapi laporan keuangan Semester II TA 2023

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Analisis Capaian Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja BBSPJIKKP merupakan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri mengenai tugas pokok dan fungsi, serta pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Penilaian atas pelaksanaan tupoksi dan capaian kinerja BBSPJIKKP dilakukan melalui pengukuran kinerja/analisis capaian kinerja. Pengukuran kinerja diawali dengan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, kemudian dilaksanakan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai capaian kerja dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut mencerminkan keberhasilan/kegagalan BBSPJIKKP dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBSPJIKKP.

##### **3.1.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2023**

Untuk capaian kinerja Kegiatan dengan alur berdasarkan IKU Renstra Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Matriks Alur IKU Kementerian Perindustrian, BSKJI dan Balai Besar Berdasarkan Renstra Kementerian Perindustrian TA.2021-2024

KEMENPERIN			BSKJI			BBSPJIKKP		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
SS1.	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SP1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
SS2.1	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan dengan nilai Indonesia industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) >3.0	SP2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Persentase jumlah perusahaan yang Produktivitas/efisiensi nya meningkat setelah pendampingan industri 4.0	SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0
								Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0
								Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri



KEMENPERIN			BSKJI			BBSPJIKKP		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
								Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi standardisasi industri
SS3.1	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa serta industri halal dalam negeri	Jumlah SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	SP3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SNI bidang ndustry yang diterapkan dan diberlakukan	SK3	Meningkatnya Kemampuan IndustriBarang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
					Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi			Meningkatnya PNBPlayanan jasa industri
		Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi			Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/ efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologiindustri melalui jasa konsultasi			Meningkatnya jumlahhasil layanan jasa yang digunakan oleh industri

KEMENPERIN			BSKJI			BBSPJIKKP		
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
SS7	Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di satker
		<b>NON IKU</b>			<b>NON IKU</b>			<b>NON IKU</b>
SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SP5.	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
					Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)			
SS9	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian	SP6.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan	Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen	SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif	

KEMENPERIN			BSKJI				BBSPJIKKP	
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Perindustrian		Efisien	Risiko mencapai minimal level 3		dan Efisien	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker			Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker			Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
SS10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	SP7.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	SP8.	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	SK7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik
					Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang terpadu dan terintegrasi			
					Indeks manfaat kerja sama			

KEMENPERIN			BSKJI				BBSPJIKKP	
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai laporan keuangan BSKJI	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal laporan keuangan
SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja

Berdasarkan matriks terdapat keterkaitan indikator kinerja BBSPJIKKP dengan IKU Kementerian Perindustrian dan BSKJI, dimana indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja BBSPJIKKP merupakan turunan dari Renstra BBSPJIKKP, yang diturunkan dari IKU Perjanjian Kinerja BSKJI, dan IKU BSKJI merupakan turunan IKU dalam Renstra Kementerian Perindustrian.

Seperti yang telah diungkapkan dalam Bab II, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulanan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun realisasi fisik per triwulan dari Rencana Aksi yang dimaksud adalah:

Tabel 3.2  
Capaian Rencana Aksi Per Triwulan TA. 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	TW I		TW II		TW III		TW IV	
						% Fisik		% Fisik		% Fisik		% Fisik	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6 persen	66,025 persen	1100,42%	10	10	45	45	75	85	100%	100%
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.	2 Perusahaan	2 Perusahaan	100%	20	5	50	30	80	80	100%	100%
		Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2 Perusahaan	2 Perusahaan	100%	25	25	50	50	75	75	100%	100%
3	Meningkatnya kemampuan industry barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	6 persen	45,84 Persen	764.00%	10	10	50	50,31	80,5	82	100%	100%
		Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	20 persen	41,79 Persen	208.95%	31,72	18,94	47,65	32,43	79,48	73,12	100%	100%
		Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan	5 Persen	48,91 Persen	978.20%	16	10,58	38	38.82	75	75	100%	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	TW I		TW II		TW III		TW IV	
						% Fisik		% Fisik		% Fisik		% Fisik	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	78 Persen	82,28 Persen	105.49%	25	13,3	50	34,7	75	75	100%	100%
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen	100 Persen	100%	20	20	40	40	80	80	100%	100%
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,8	Indeks 3,849	101.29%	20	30	50	50	75	75	100%	100%
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks 78	Indeks 83,16	106,61%	25	25	50	50	75	75	100%	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	TW I		TW II		TW III		TW IV	
						% Fisik		% Fisik		% Fisik		% Fisik	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks 3,6	Indeks 3,9	108.33%	20	20	50	30	80	80	100%	100%
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai 77	Nilai 77,25	100.32%	25	25	50	50	75	75	100%	100%
		Nilai minimal laporan keuangan	Nilai 91	Nilai 97	106.59%	25	25	50	50	75	75	100%	100%



Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa keseluruhan indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Penjelasan yang lebih lengkap akan diuraikan pada capaian per indikator.

Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat tetap mencapai target yang telah ditetapkan sebagai bahan tindak lanjut, evaluasi, dan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Adapun penjelasan hasil capaian kinerja Perjanjian Kinerja TA 2023 yang telah dilaksanakan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. TUJUAN 1 :**

##### **“Meningkatnya kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri”**

- a. Indikator Tujuan 1 : Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri

**Definisi :** Peningkatan kemampuan infrastruktur di dalam negeri dalam bentuk peralatan, sumber daya (hard) dan standardisasi (soft) yang dapat menunjang pertumbuhan industri

**Cara Perhitungan :** Indikator ini diukur berdasarkan rataan realisasi indikator-indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) sesuai tabel 2.1 yang dijelaskan pada sub-bab rencana strategis.

##### **1) Hasil yang telah dicapai**

Tujuan 1 terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan seperti yang dijabarkan pada tabel 3.3. Indikator peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri pada tahun 2023 memiliki target sebesar 58%. Nilai rataan realisasi indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) di tahun 2023 sebesar 376,11%. Berdasarkan data di atas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator-indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada Tujuan 1 akan dijelaskan pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 1

Tujuan 1	Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.	2 Perusahaan	2 Perusahaan	100%
			Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2 Perusahaan	2 Perusahaan	100%
	SK3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	6 persen	45,84 Persen	764%
			Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	20 persen	41,79 Persen	208,95%
			Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan	5 Persen	48,91 Persen	978,20%
			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	78 Persen	82,28 Persen	105,49%
<b>Nilai rata-rata realisasi indikator sasaran kegiatan</b>						<b>376,11%</b>

## 2) Analisis yang telah dicapai

Capaian peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri pada tahun 2023 telah berhasil mencapai target. Hal ini disebabkan seluruh indikator kinerja pada sasaran kegiatan BBSPJIKKP telah mencapai target. Indikator “Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0” dan “Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri masing-masing dapat mencapai target 2 perusahaan karena adanya pemenuhan

kebutuhan dan penyelesaian permasalahan dari industri yang sesuai dengan kompetensi balai. Adanya sarana dan SDM yang berkompeten juga sebagai faktor keberhasilan indikator ini. Selain itu koordinasi yang intens dengan industri juga menyebabkan hasil konsultasi yang diberikan oleh balai tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan industri. Indikator “Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industry melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi” telah berhasil mencapai target sebesar 45,84%. Capaian ini berdasarkan dari kegiatan program DAPATI. Keberhasilan indikator ini mencapai target karena dampak dari konsultasi yang diberikan yang dapat terukur serta berhasil meningkatkan efisiensi maupun produktivitas industri. Indikator “Meningkatnya PNBP layanan jasa industri” telah berhasil mencapai target sebesar 41,79%. Capaian ini berdasarkan peningkatan penerimaan PNBP yang diterima BBSPJIKKP tahun 2023 dibanding tahun 2022. Keberhasilan indikator ini mencapai target karena bertambahnya penerimaan dari layanan baru seperti uji profisiensi, inspeksi, layanan validasi dan verifikasi rumah kaca, pemeriksa halal, dan audit teknologi. Selain itu disebabkan adanya peningkatan penerimaan PNBP dari tahun sebelumnya pada layanan pengujian, sertifikasi, pelatihan, miniplant kulit, miniplant karet, dan konsultasi. Indikator “Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan” juga telah berhasil mencapai target sebesar 48,91%. Keberhasilan indikator ini mencapai target karena adanya peningkatan penerimaan PNBP di semua layanan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah hasil layanan jasa tahun 2023. Jumlah hasil layanan tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2022. Selain itu, keberhasilan ini disebabkan karena adanya promosi yang sangat intens dan meluas di tahun 2023 yang mengakibatkan meningkatnya permintaan jasa dari pelanggan. Indikator “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa” telah berhasil mencapai target sebesar 82,82%. Keberhasilan indikator ini mencapai target karena ketelitian pejabat pengadaan dalam memilih supplier dengan mengutamakan supplier barang dan jasa produksi dalam negeri. Selain itu, penelusuran informasi terkait produk-produk serta jasa dalam negeri dan pengendalian belanja

pemerintah oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan komunikasi antaran tim pengadaan dan bagian/bidang yang mengajukan pengadaan barang/jasa juga mendukung keberhasilan kinerja ini.

### 3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator-indikator tersebut. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target.

### 4) Rekomendasi

Perbaikan di tahun 2024 agar tercapai tujuan 1 adalah perlunya kunjungan ke calon pelanggan seperti industri dan instansi daerah untuk pemaparan mengenai kompetensi balai bagi pelanggan agar informasi kebutuhan permasalahan industri dapat lebih banyak diketahui dan diselesaikan oleh balai. Selain itu juga perlu memastikan kegiatan konsultasi dapat menghasilkan dampak yang terukur terutama dapat meningkatkan produktivitas, kualitas produk bahkan penjualan dari industri. Perbaikan lainnya berupa peningkatan layanan jasa teknis dengan melakukan mengoptimalkan Kembali Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta meningkatkan jenis layanan pada layanan baru seperti layanan validasi dan verifikasi Gas Rumah Kaca, pemeriksa halal, inspeksi teknis, dan audit teknologi.

## 2. TUJUAN 2 :

**“Meningkatnya aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri”**

### a. Indikator Tujuan 2 : Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri

**Definisi** : Peningkatan aktivitas-aktivitas pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan infrastruktur yang sudah ada di dalam negeri yang dapat berperan pada pertumbuhan industri dalam negeri.

**Cara Perhitungan** : Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata indikator-indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) sesuai tabel 2.1 yang dijelaskan pada sub-bab rencana strategis.

#### 1) Hasil yang telah dicapai

Tujuan 2 terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan seperti yang dijabarkan pada tabel 3.4. Indikator Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan

pada pertumbuhan industri pada tahun 2023 memiliki target sebesar 48%. Nilai rata-ran realisasi indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 2 (T2) di tahun 2023 sebesar 600,85%. Berdasarkan data di atas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator-indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada Tujuan 2 akan dijelaskan pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 2

Tujuan 2	Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6 persen	66,025 persen	1.100,42%
	SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,8	Indeks 3,849	101,29%
<b>Nilai rata-ran realisasi indikator sasaran kegiatan</b>						<b>600,85%</b>

## 2) Analisis hasil yang telah dicapai

Capaian Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri pada tahun 2023 telah berhasil mencapai target. Hal ini disebabkan seluruh indikator kinerja pada sasaran kegiatan BBSPJIKKP telah mencapai target. Indikator “Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi” telah mencapai target sebesar 66,025% karena adanya pemenuhan kebutuhan industri dengan penyelesaian permasalahan dari industri yang sesuai dengan kompetensi Balai. Adanya sarana dan SDM yang berkompeten juga sebagai faktor keberhasilan indikator ini. Selain itu koordinasi yang intens dengan industri juga menyebabkan hasil konsultasi yang diberikan oleh Balai tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan industri. Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa

industri” telah mencapai target indeks 3,849. Keberhasilan indikator ini mencapai target selain terjadinya peningkatan kualitas layanan, juga telah dilakukan pengkajian terhadap kuisisioner pelanggan, kontak lebih intens dengan pelanggan dalam pengisian kuisisioner serta menindaklanjuti atas keluhan dan saran pelanggan.

### **3) Kendala**

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator-indikator tersebut. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target.

### **4) Rekomendasi**

Perbaikan di tahun 2024 agar tercapai tujuan 2 adalah optimalisasi kerjasama di antara semua bagian di BBSJIKKP dalam rangka kegiatan kolaborasi antara balai dan industri, peningkatan kemampuan SDM balai dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program pendampingan konsultasi. Selain itu, perlunya melakukan kontak lebih intens dengan pelanggan terkait layanan yang diperlukan dan melakukan reviu terhadap hasil kuisisioner pelanggan serta menindaklanjuti atas keluhan dan saran pelanggan. Dengan semakin bertambahnya kolaborasi antara industri dengan balai serta semakin meningkatnya kepuasan pelanggan industri terhadap balai, maka diharapkan dapat tercapai salah satu tujuan BBSPJIKKP yaitu meningkatnya aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri.

## **3. TUJUAN 3 : “Meningkatnya kolaborasi penunjang pertumbuhan industri”**

### **a. Indikator Tujuan 3 : Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri**

**Definisi** : Peningkatan aktivitas-aktivitas kolaborasi antara pemerintah, swasta (asosiasi) dan akademisi yang dapat berkontribusi dan menunjang pertumbuhan industri dalam negeri.

**Cara Perhitungan** : Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rataan capaian indikator-indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3) yang telah dijelaskan pada sub-bab rencana strategis.

#### **1) Hasil yang telah dicapai**

Tujuan 3 terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan seperti yang dijabarkan pada tabel 3.5. Indikator Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri

pada tahun 2023 memiliki target sebesar 67%. Nilai rata-rata realisasi indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3) di tahun 2023 sebesar 108,33%. Berdasarkan data di atas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator-indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada Tujuan 3 akan dijelaskan pada tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 3

Tujuan 3	Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	SK7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks 3,6	Indeks 3,9	108,33%
<b>Nilai rata-rata realisasi indikator sasaran kegiatan</b>						<b>108,33%</b>

## 2) Analisis hasil yang telah dicapai

Capaian peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri pada tahun 2023 telah berhasil mencapai target. Hal ini disebabkan indikator kinerja “Nilai minimal indeks layanan publik” pada sasaran kegiatan “Penguatan Layanan Publik” telah mencapai target. Indikator ini telah berhasil mencapai target indeks 3,9. Keberhasilan indikator ini mencapai target adalah karena adanya peningkatan penerimaan PNPB di tahun 2023 yang menyebabkan penambahan sarana dan prasarana sehingga nilai pelayanan meningkat.

## 3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator-indikator tersebut. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target.

## 4) Rekomendasi

Perbaikan di tahun 2024 agar tercapai tujuan 3 adalah menindaklanjuti hasil evaluasi pelayanan publik sesuai dengan Permenpan RB No 1 Tahun 2022 seperti peningkatan sistem informasi pelayanan publik, peningkatan inovasi layanan publik, serta peningkatan sarana dan prasarana layanan publik. Dengan semakin meningkatnya indeks layanan publik maka akan semakin mempermudah dan menarik industri dalam layanan jasa teknis yang akan diberikan oleh balai sehingga diharapkan dapat tercapai salah satu tujuan

BBSPJIKKP yaitu meningkatnya kolaborasi penunjang pertumbuhan industri.

#### 4. TUJUAN 4 : Meningkatnya *Good Governance*

##### a. Indikator Tujuan 4 : Peningkatan *Good Governance*

**Definisi** : Peningkatan aktivitas-aktivitas pada internal BSKJI yang sejalan pada etika dan norma aparatur sipil negara serta aturan perundang-undangan yang berlaku dalam upayanya untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pengembangan standardisasi dan kebijakan jasa industri di dalam negeri.

**Cara Perhitungan** : Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rataan capaian indikator-indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4) yang telah dijelaskan pada sub-bab rencana strategis.

##### 1) Hasil yang telah dicapai

Tujuan 4 terdiri dari 3 (tiga) sasaran kegiatan seperti yang dijabarkan pada tabel 3.6. Indikator Peningkatan *Good Governance* pada tahun 2023 memiliki target sebesar 68%. Nilai rataan realisasi indikator sasaran kegiatan (SK) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4) di tahun 2023 sebesar 103,38%. Berdasarkan data di atas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator-indikator sasaran kegiatan yang termasuk pada Tujuan 4 akan dijelaskan pada tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Tujuan 4

Tujuan 4	Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya <i>Good Governance</i>	SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen	100 Persen	100%
	SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks 78	Indeks 83,16	.106,61%
	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai 77	Nilai 77,25	100,32%



Tujuan 4	Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
			Nilai minimal laporan keuangan	Nilai 91	Nilai 97	106,59%
<b>Nilai rata-rata realisasi indikator sasaran kegiatan</b>						<b>103,38%</b>

## 2) Analisis hasil yang telah dicapai

Capaian peningkatan *good governance* pada tahun 2023 telah berhasil mencapai target. Hal ini disebabkan seluruh indikator kinerja pada sasaran kegiatan telah mencapai target. Indikator “Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker” telah berhasil mencapai target sebesar 100 persen. Seluruh temuan audit kinerja telah ditindaklanjuti dan dokumen tindak lanjut telah diserahkan kepada Inspektorat Jenderal dengan bukti risalah pemutakhiran saldo data tindak lanjut hasil audit Itjen pada tanggal 5 Oktober 2023. Keberhasilan indikator ini mencapai target adalah karena adanya koordinasi terarah dalam menindaklanjuti semua temuan. Indikator “Rata-rata indeks profesionalitas ASN” telah berhasil mencapai target 83,16. Keberhasilan indikator ini mencapai target disebabkan pegawai selalu diingatkan untuk melakukan pengembangan kompetensi dan meng-upload sertifikat hasil pengembangan kompetensi ke dalam sistem aplikasi intranet. Adanya sistem reminder dari sub bagian kepegawaian untuk selalu meng-upload sertifikat juga merupakan alasan keberhasilan indikator. Indikator “Nilai minimal akuntabilitas kinerja” telah berhasil mencapai target nilai 77,25. Keberhasilan indikator ini mencapai target disebabkan adanya evaluasi berkala terhadap rencana strategis, rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan sehingga target kinerja BBSPJIKKP dapat tercapai. Indikator “Nilai minimal laporan keuangan” telah berhasil mencapai target nilai 97. Keberhasilan indikator ini mencapai target disebabkan adanya semakin tertib dan telitinya SDM di bagian keuangan dalam industry dan melaporkan laporan keuangan BBSPJIKKP.

## 3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator-indikator tersebut. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target.

#### 4) Rekomendasi

Perbaikan di tahun 2024 agar tercapai tujuan 4 adalah perlu adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala agar semua kegiatan dapat berjalan lancar dan mencapai target kinerja serta tidak terjadi temuan berulang Ketika audit kinerja dilakukan dan dapat mengurangi *human error*. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai secara kontinyu setiap tahun.

### 5. SASARAN KEGIATAN I : “Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas”

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan I

Sasaran Kegiatan I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6 persen	66,025 persen	1.100,42%

Sasaran kegiatan I ini dalam pengukuran ketercapaiannya terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi. Indikator ini memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2023, Adapun penjelasan capaian dari masing-masing indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

#### a. Indikator Kinerja I.1 : Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi

**Definisi** : Kegiatan kolaborasi sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak. Pihak pertama adalah satker, pihak kedua dan seterusnya adalah pihak di luar BSKJI seperti perusahaan industri, pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, dan pihak lain yang dapat bekerjasama dalam upaya peningkatan produktivitas/efisiensi industri.

Kegiatan kolaborasi adalah kegiatan yang didukung oleh tiga pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas/efisiensi industri, dimana kegiatan dapat berbentuk problem solving industri, bimbingan/pendampingan

teknis atau kegiatan lain yang dapat diukur outcome-nya. Hasil kegiatan kolaborasi termasuk tidak terbatas pada spesifikasi, rancangan, model atau prototipe.

Outcome hasil kolaborasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri.

Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai, atau dapat juga diambil dari kegiatan lain selama memenuhi syarat kolaborasi di atas.

**Cara Perhitungan** : Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum kegiatan kolaborasi (A) dan nilai performansi sesudah kegiatan kolaborasi (B).

$$\text{Produktivitas} = (B-A)/A \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = (A-B)/A \times 100\%$$

### 1) Hasil yang telah dicapai

#### **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Kolaborasi merupakan faktor utama untuk membentuk ekosistem inovasi dalam pemecahan masalah. Kementerian Perindustrian selalu berupaya untuk mendorong ekosistem inovasi melalui kolaborasi lintas sektor, diantaranya melibatkan pihak pemerintah (termasuk balai/pusat lain di Kemenperin), akademisi, dan/atau pelaku industri. Kolaborasi dinyatakan dengan dokumen perjanjian kerja sama.

Pada tahun 2023 BBSPJIKKP menargetkan 6 persen produktivitas perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi. Berdasarkan data di atas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator ini ditunjukkan pada tabel 3.8.

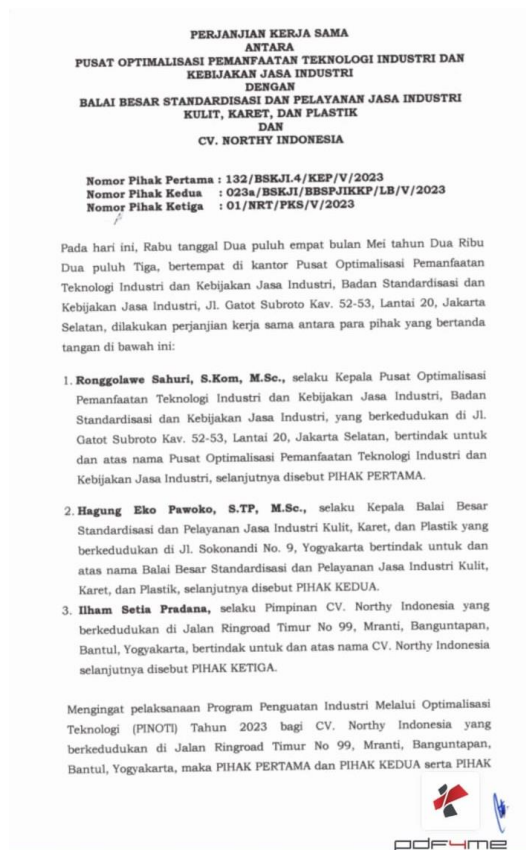
**Tabel 3.8 Rincian Capaian Indikator Kinerja 1.1**

No	Nama Industri	Bidang Usaha	Jasa Konsultansi yang Diberikan	Periode Pelaksanaan
1.	CV. Northy-BBSPJIKKP – UII	Industri sarung tangan kulit	Konsultansi optimalisasi teknologi	April – November 2023
2.	PT Inastek – BBSPJIKKP – ATMI Solo	Industri manufaktur mesin automasi	Konsultansi optimalisasi teknologi	Juni – September 2023

a. CV Northy

CV Northy adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 2018 dan bergerak di bidang branding, manufaktur, garmen, dan distributor, terutama berbahan dasar kulit seperti sarung tangan kulit, dsb. CV Northy beralamat di Jl Ringroad Timur No 99 Sorowajan Banguntapan Bantul Yogyakarta. CV Northy merupakan IKM sarung tangan kulit untuk berkendara (sepeda motor) yang memiliki pegawai berjumlah 11 orang dan melakukan pemasaran produknya melalui online shop serta kegiatan pameran. Untuk mengembangkan CV Northy dilakukan pendampingan dengan pendanaan dari Optikji BSKJI Kemenperin. Kegiatan pendampingan melibatkan BBSPJIKKP, UII dan praktisi. Pendampingan yang dilakukan meliputi konsultasi sales & marketing, konsultasi pengembangan produk, penyusunan SOP dan KPI, identifikasi titik-titik kritis pada tiap tahapan proses, dan pendampingan sertifikasi TKDN. Dengan dilaksanakannya pendampingan ini CV Northy diharapkan dapat meningkatkan omsetnya dan terus tumbuh menjadi industry sarung tangan kulit yang kuat menghadapi tantangan di era disrupsi teknologi yang semakin intens.

Kegiatan yang dilaksanakan pada indikator ini adalah kegiatan program PINOTI (Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi di CV Northy). Kegiatan ini merupakan kolaborasi 3 pihak antara BBSPJIKKP, CV Northy dan Universitas Islam Indonesia. PINOTI merupakan salah satu program dari Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri (OPTIKJI) Kementerian Perindustrian sebagai solusi yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah kepada IKM melalui fasilitasi jasa konsultasi agar dapat menguatkan core bisnisnya melalui pendampingan Bersama dengan Pembina Industri BBSPJIKKP dan mentor eksternal yang professional di bidangnya.



Gambar 3. SPK antara OPTIKJI, BBSPJIKKP dan CV Northy



Gambar 4. SK Kepala BBSPJIKKP penunjukan tim pelaksana pendampingan di CV Northy



Gambar 5. Pendampingan/mentoring di CV Northy

Target kegiatan pendampingan ini adalah :

1. Memfasilitasi konsultasi manajemen SDM
2. Mampu mengurangi cacat produk dan meningkatkan output divisi dachi
3. Meningkatkan omset penjualan melalui optimalisasi digital marketing
4. Melakukan pendampingan pengembangan produk baru yaitu sarung tangan racing

Hasil kolaborasi dari kegiatan ini antara lain:

1. Product reject berkurang dari 7% menjadi 3% dengan adanya SOP bagian produksi (IK proses potong, IK proses jahit, dan IK finishing).
2. Melakukan optimalisasi digital marketing sehingga nilai omset penjualan produk meningkat dari rata-rata 150 juta/bulan menjadi 182 juta/bulan.
3. Manajemen SDM CV Northy sudah semakin bagus dengan adanya target obyektif, output, key activities, KPI dan job evaluation.
4. Adanya produk sarung tangan baru yaitu sarung tangan kulit bravo.

b. PT Inastek

PT Inamas Sintesis Teknologi (INASTEK) adalah perusahaan yang bergerak di bidang automasi industri, green technology, dan agroteknologi. Perusahaan ini beralamat di Jl. Werkudoro No. 4 Wirobrajan, Yogyakarta.

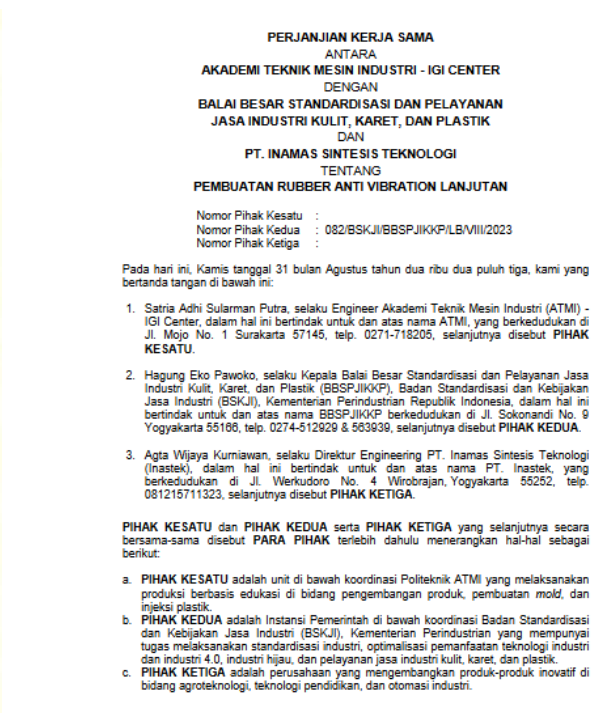
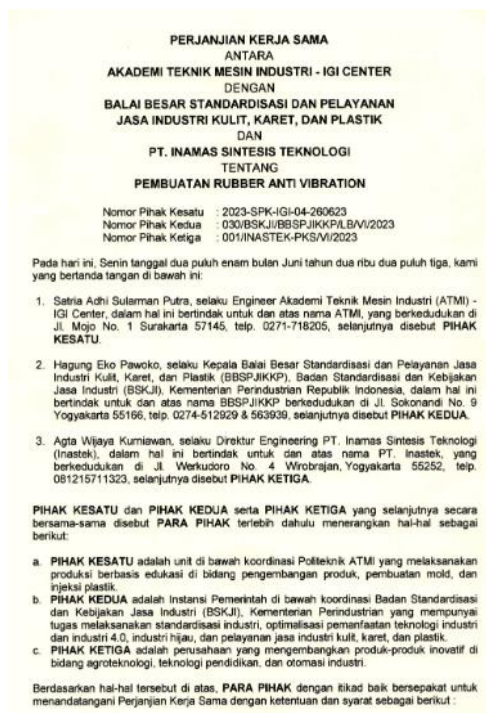
Kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 berupa pengembangan rubber anti vibration sebagai komponen timbangan badan (mendukung program pencegahan stunting).

Pengembangan rubber anti vibration merupakan kolaborasi tiga pihak antara BBSPJKKP – ATMI IGI Center – PT. Inamas Sintesis Teknologi (INASTEK).

Kerjasama tersebut dilaksanakan dalam dua tahap:

- Tahap 1: bulan Juni 2023 dengan SPK No. 030/BSKJI/BBSPJIKKP/LB/VI/2023 (terlampir). BBSPJIKKP berkewajiban mengembangkan formulasi rubber anti vibration dan penyediaan produk sebanyak 20.000 pcs, sedangkan ATMI IGI Center berkewajiban menyediakan mold dan metal insert. Target produksi tersebut direncanakan akan diselesaikan selama 32 hari jika metal insert tersedia minimal 20% pada saat awal produksi. Metal insert harus tersedia maksimal H-2 produksi dan minimal jumlah pengiriman adalah 2.000 pcs.

- Tahap 2: bulan Agustus 2023 dengan SPK No. 082/BSKJI/BBSPJIKKP/LB/VIII/2023 (terlampir). BSPJIKKP berkewajiban menyediakan 8.000 pcs *rubber anti vibration*, sedangkan ATMI IGI Center berkewajiban menyediakan mold dan metal insert. Pelaksanaan kegiatan tahap 2 didahului dengan penyusunan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan No. B/2107/BSKJI/BBSPJIKKP/VIII/2023 (terlampir). Berdasarkan surat pernyataan tersebut disepakati produk reject yang dapat diretur ditetapkan sebesar 5% (400 pcs).



Gambar 6. SPK antara BBSPJIKKP, PT Inastek dan ATMI Solo





Gambar 7. Pelaksanaan kegiatan kolaborasi dengan PT Inastek dan ATMI Solo



Gambar 8. Rubber anti vibration

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ukuran performansi sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan/konsultasi pada PT CV Northy dan PT Inastek.

Tabel 3.9 Performansi sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan/konsultasi

No	Nama Perusahaan	Judul Kegiatan Kolaborasi	Jasa Konsultasi yang diberikan	Performansi sebelum	Performansi sesudah	Produktivitas (%)
1	CV Northy	Penguatan industry melalui optimalisasi teknologi di IKM CV Northy	Quality Control	Presentase product reject 7%	Presentase product reject 4%	42,8%
			Optimalisasi Digital Marketing	Omset penjualan 150 juta/bulan	Omset penjualan 182 juta/bulan	21,3%
<b>Produktivitas rata-rata CV Northy</b>						<b>32,05%</b>
2	PT Inastek	Pengembangan produk rubber anti vibration sebagai komponen antropometer untuk pendeteksi stunting	Optimalisasi Teknologi	Belum ada komponen rubber anti vibration maka antropometer belum dapat dirakit secara sempurna sehingga dapat dipasarkan	Produk rubber antivibration sudah dapat diaplikasikan pada antropometer sehingga dapat dipasarkan	100%
<b>Produktivitas rata-rata PT Inastek</b>						<b>100%</b>
<b>Rata-Rata</b>						<b>66,025%</b>



## 2) Analisis hasil yang telah dicapai

### Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator “Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi” merupakan indikator baru dalam Renstra BBSPJIKKP TA 2021-2024 sehingga capaian indikator tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun selama tahun 2019-2023, BBSPJIKKP telah melakukan kolaborasi dengan industri dengan capaian pada tabel 3.10.

Tabel 3.10. Perbandingan capaian kolaborasi BBSPJIKKP dengan industri  
TA 2019 – 2023

Uraian	Realisasi TA. 2019	Realisasi TA. 2020	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023
Kolaborasi BBSPJIKKP dengan industri	2 kegiatan kolaborasi	2 kegiatan kolaborasi	1 kegiatan kolaborasi	1 kegiatan kolaborasi	2 kegiatan kolaborasi

Pada tahun 2019 terdapat 2 kegiatan kolaborasi berupa problem solving yaitu Pemanfaatkan teknologi penentuan umur simpan (masa kadaluarsa) Resiprene-35 dan teknologi peningkatan kecerahan Resiprene-35 kolaborasi dengan PT. Industri Karet Nusantara (IKN), dan penggunaan kajian dan rekomendasi terkait pemanfaatan Ruang Eks Pengering BrCr di Kebun Merbuh untuk Peternakan Ayam Closed House dikaitkan dengan Sistem Manajemen Lingkungan kolaborasi dengan PTPN IX. Pada tahun 2020 juga terdapat 2 kegiatan kolaborasi berupa problem solving yaitu Pembuatan Prototipe Rubber Dumper Jok Mobil untuk Difabel kolaborasi dengan PT. YPTI dan Penanganan limbah cair kolaborasi dengan UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan. sedangkan pada tahun 2021 hanya terdapat 1 kegiatan kolaborasi yaitu Optimalisasi Mesin Vulkanisir Ban Sepeda Motor. Pada tahun 2022 terdapat kegiatan kolaborasi berupa pembuatan rubber dumper jok mobil untuk difabel kolaborasi dengan PT YPTI. Pada tahun 2023 terdapat kegiatan kolaborasi antara BBSPJIKKP, CV Northy dan UII dengan judul kegiatan “Penguatan industri melalui optimalisasi teknologi di IKM CV Northy” dan kolaborasi antara BBSPJIKKP, PT Inastek dan ATMI Solo dengan judul kegiatan “Pengembangan Produk Rubber Anti Vibration Sebagai Komponen Antropometer Untuk Pendeteksi Stunting”.

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat kenaikan jumlah kegiatan kolaborasi. Kegiatan kolaborasi ini sangat tergantung dengan permintaan dari pelanggan sehingga akan sulit tercapai jika tidak aktif dalam mencari tahu kebutuhan dari industri atau pelanggan. Solusi yang perlu diterapkan adalah pengenalan kemampuan layanan yang dimiliki BBSPJIKKP melalui promosi kepada perusahaan/industri berupa temu pelanggan atau diseminasi.

### **Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi**

Secara keseluruhan rata-rata target jangka menengah pada Renstra BBSPJIKKP 2021-2024 adalah 6,5 persen. Tahun 2023 merupakan tahun pertama setelah adanya revisi pada Renstra BBSPJIKKP 2021-2024. Target pada tahun 2023 sebesar 92,30% dari total target dalam Renstra. Pada tahun 2023, capaian sebesar 66,025% sehingga indikator kinerja ini berhasil mencapai 1.100,42% pada tahun 2023 dan capaian indikator kinerja ini sebesar 1.015,77% dari total target jangka menengah pada Renstra. Rata-rata capaian indikator kinerja ini telah jauh melebihi rata-rata target dalam Renstra. Diharapkan pada tahun berikutnya, indikator ini dapat terus mencapai target sehingga total target jangka menengah pada Renstra BBSPJIKKP dapat tercapai.

### **Perbandingan dengan RPJMN 2020-2024**

Dalam RPJMN 2020-2024, terdapat target persentase SNI bidang industri yang diterapkan sebesar 20% pada tahun 2024. Industri yang menerapkan SNI ini dapat berupa Industri Kecil dan Menengah (IKM). Selain itu, kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap PDB di tahun 2024 ditargetkan sebesar 65%. Dengan semakin banyaknya kegiatan kolaborasi baik program PINOTI maupun program kolaborasi lainnya, diharapkan semakin banyak IKM yang dapat menerapkan SNI serta dapat meningkatkan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri sehingga meningkatkan kontribusi dalam PDB.

### **Perbandingan capaian pada satker Kemenperin lain dengan capaian realisasi BBSPJIKKP**

Target indikator kinerja ini pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) adalah 20 persen dan realisasi tahun 2023 adalah 90,9 persen. Pada tahun 2023 terdapat 2 kegiatan kolaborasi yaitu pada kolaborasi antara BBSPJIKMN dengan IKM Apik Craft dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dan kolaborasi antara BBSPJIKMN dengan IKM Arkima dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Hasil kegiatan kolaborasi tersebut antara lain:

1. Sebelum kegiatan pendampingan, kapasitas produksi yang dapat dihasilkan oleh Apik Craft adalah 3 piece per produk percetakan. Melalui kegiatan pendampingan, kapasitas produksi yang dapat dihasilkan oleh bisa tak terbatas sesuai dengan jumlah Cetakan Gipsnya. Kapasitas produksi tersebut meningkat sekitar 100 %. Selain itu dengan kegiatan ini para perajin memperoleh wawasan pengetahuan dan keterampilan dalam proses penyiapan bahan baku.
2. Dengan dilaksanakannya pendampingan pada IKM Apik Craft terjadi peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar sebesar 11%, dan meningkatkan produktifitas sebesar 121%

Bila dibandingkan dengan BBSPJIKMN, capaian kegiatan kolaborasi sama yaitu 2 kegiatan. Realisasi indikator ini pada BBSPJIKMN adalah 90,9 persen dan realisasi pada BBSPJIKKP adalah 66,025%. Dalam hal ini, realisasi BBSPJIKMN lebih besar daripada BBSPJIKKP.

### **Analisis penyebab keberhasilan kinerja**

BBSPJIKKP berhasil mencapai target indikator "Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi" karena adanya pemenuhan kebutuhan industri dengan penyelesaian permasalahan dari industri yang sesuai dengan kompetensi balai. Adanya sarana dan SDM yang berkompeten juga sebagai industri keberhasilan indikator ini. Selain itu koordinasi yang intens dengan industri juga menyebabkan hasil konsultasi yang diberikan oleh balai tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan industri.

### **Analisis efisiensi penggunaan sumber daya**

Dengan keterbatasan jumlah SDM, sarana serta prasarana, indikator kinerja ini masih tetap mencapai target. Adanya kemajuan di bidang teknologi menjadikan sarana konsultasi dan diskusi menjadi lebih mudah dan cepat. Beberapa anggaran untuk perjalanan dinas ke industri dalam rangka diskusi dapat diminimalkan karena dilakukan secara daring melalui zoom maupun aplikasi Whatsapp. Penunjukan SDM yang tepat dengan kompetensi yang sesuai juga menyebabkan efisiensi pada penggunaan jumlah SDM, sehingga total anggaran yang dikeluarkan baik oleh perusahaan maupun BBSPJIKKP menjadi lebih rendah. Pagu indikator ini sebesar Rp. 33.148.000,- dan realisasi sebesar Rp. 29.663.814,- atau terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,51%. Hal ini terjadi karena dana yang digunakan berasal dari anggaran OPTIKJI.

### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1. Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran;
2. Kegiatan administrasi keuangan, terkait pertanggungjawaban pengadaan belanja bahan dan perjalanan dinas;
3. Kegiatan pengujian, terkait pengujian bahan dan produk yang menjadi subjek kegiatan;
4. Kegiatan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri, terkait adanya komunikasi antara BBSPJIKKP dan mitra industri dalam hal penandatanganan kerjasama serta penyerahan output/laporan kegiatan.

### **3) Kendala**

Secara umum tidak terdapat kendala di tahun 2023 dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target.

### **4) Rekomendasi**

Rencana perbaikan di tahun anggaran berikutnya adalah perlunya identifikasi permasalahan pada industri-industri kecil agar informasi kebutuhan permasalahan industri dapat lebih banyak diketahui dan diselesaikan oleh balai. Selain itu juga perlu memastikan kegiatan konsultasi dapat

menghasilkan dampak yang terukur terutama dapat meningkatkan produktivitas, kualitas produk bahkan penjualan dari industri.

## 6. SASARAN KEGIATAN II : “Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0”

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan II

Sasaran Kegiatan II	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	2 perusahaan	2 perusahaan	100
	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2 perusahaan	2 perusahaan	100

Sasaran kegiatan II ini dalam pengukuran ketercapaiannya terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 dan Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri, adapun penjelasan capaian dari indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

### a. Indikator Kinerja II.1 : Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0

**Definisi** : Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi khususnya di era industri 4.0. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan Balai – Balai sebagai penyedia layanan jasa industri.

Kegiatan fasilitasi industri 4.0 dapat berupa assesmen, pelatihan (manager transformasi 4.0, awareness industri 4.0 dan pelatihan terkait 4.0 lainnya), pendampingan, konsultasi, dan bimbingan transformasi industri 4.0.

**Cara Perhitungan** : Menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi industri 4.0 pada tahun berjalan.

## 1) Hasil yang telah dicapai

### Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.11, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator “Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0” adalah 2 perusahaan dan tercapai 2 perusahaan (100%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 terdapat 2 perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0. Rincian capaian indikator ini ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Rincian Capaian Indikator Kinerja II.1

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Judul Kegiatan	SPK/ Order/Permintaan jasa konsultansi/ bukti lainnya 2023
1	PT Dasaplast Nusantara	Industri packaging	Sosialisasi dan bimtek awareness INDI 4.0 serta fasilitasi self asesmen INDI 4.0 di PT Dasaplast Nusantara	- Surat Penawaran Kepala BBSPJIKKP Nomor B/1734/BSKJI/BBSP JIKKP/MS/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 - Surat Direksi PT Dasaplast Nusantara Nomor xx500-INSIP/230821.001 tanggal 21 Agustus 2023
2	PT Tri Usaha Sejahtera Pratama	Industri manufaktur	Sosialisasi dan bimtek awareness INDI 4.0 serta fasilitasi self asesmen INDI 4.0 di PT Tri Usaha Sejahtera Pratama	Surat Direksi PT Tri Usaha Sejahtera Pratama Nomor 012/HRGA/X2023 tanggal 7 Oktober 2023

Inti dari kegiatan pada indikator ini adalah pelaksanaan sosialisasi dan bimtek awareness INDI 4.0 serta fasilitasi self assessment INDI 4,0 di PT Dasaplast Nusantara dan PT Tri Usaha Sejahtera Pratama. Bukti pelaksanaan kegiatan ini dapat terlihat pada gambar-gambar di bawah ini.



Gambar 9. Surat Penawaran Kepala BBSPJIKKP kepada PT Dasaplast Nusantara

Gambar 10. Surat Direksi PT Dasaplast Nusantara



Gambar 11. Kegiatan sosialisasi dan bimtek awareness INDI 4.0 di PT Dasaplast Nusantara



Gambar 12. Surat Direksi PT Tri Usaha Pratama Sejahtera



Gambar 13. Kegiatan sosialisasi dan bimtek awareness INDI 4.0 di PT Tri Usaha Pratama Sejahtera

## 2) Analisis hasil yang telah dicapai

### Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 selama TA 2021-2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.13 Perbandingan capaian perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi TA. 2021</b>	<b>Realisasi TA. 2022</b>	<b>Realisasi TA. 2023</b>
Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	0 perusahaan	0 perusahaan	2 perusahaan

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2023. Pada tahun 2021-2024 belum ada perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 dengan support dari BBSPJIKKP. Dengan adanya indikator ini, diharapkan BBSPJIKKP dapat membantu industri dalam hal fasilitasi industri 4.0. Kegiatan yang dilaksanakan di PT Dasaplast Nusantara dan PT Tri Usaha Sejahtera Pratama antara lain:

1. Sosialisasi dan Bimtek Awareness INDI 4.0
2. Pendampingan self assessment industri INDI 4.0

#### **Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi**

Secara keseluruhan total target jangka menengah pada Renstra tahun 2021-2024 adalah 4 perusahaan. Tahun 2023 merupakan tahun pertama setelah adanya revisi Renstra BBSPJIKKP 2021-2024. Pada tahun 2023, terdapat capaian 2 perusahaan sehingga indikator kerja ini berhasil mencapai 50% dari total target jangka menengah pada Renstra. Diharapkan pada tahun berikutnya, indikator ini dapat terus mencapai target khususnya di bidang transformasi 4.0, sehingga total target jangka menengah pada renstra BBSPJIKKP dapat tercapai.

#### **Perbandingan dengan RPJMN 2020-2024**

Dalam RPJMN 2020-2024, terdapat target jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) >3.0 sebanyak 60 perusahaan pada tahun 2024. Penilaian INDI 4.0 ini menunjukkan tingkat kesiapan industri dalam memanfaatkan industri 4.0 dalam proses bisnisnya. Semakin banyaknya perusahaan yang memiliki nilai INDI diatas 3,0 maka semakin banyak pula industri yang telah memanfaatkan 4.0 dalam perusahaannya. Dengan didampingi oleh BBSPJIKKP, diharapkan semakin banyak perusahaan yang telah memanfaatkan 4.0 dan memiliki nilai INDI

diatas 3, sehingga dapat mendukung revitalisasi industri dan meningkatkan kontribusi industri dalam PDB.

### **Perbandingan capaian pada satker Kemenperin lain dengan capaian realisasi BBSPJIKKP**

Target indikator kinerja ini pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) adalah 1 perusahaan dan tercapai 1 perusahaan. Kegiatan pada BBSPJIKMN berjudul Jasa Layanan Pendampingan Industri 4.0 pada PT Lucky Indah Keramik dengan nomor SPK 1885/BBSPJIKMNL/HK.06/V/2023.

Bila dibandingkan dengan BBSPJIKMN, maka realisasi indikator ini pada BBSPJIKKP lebih besar daripada BBSPJIKMN dimana realisasi indikator pada BBSPJIKKP adalah 2 perusahaan.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

BBSPJIKKP berhasil mencapai target perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 karena adanya pemenuhan kebutuhan dengan penyelesaian permasalahan dari industri yang sesuai dengan kompetensi balai. Adanya sarana dan SDM yang berkompeten juga sebagai ndust keberhasilan indikator ini. Selain itu komunikasi yang aktif dengan ndustry juga menyebabkan hasil konsultasi yang diberikan oleh balai tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan ndustry.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam pencapaian indikator kinerja ini ada beberapa kegiatan pendukung yang direncanakan untuk dilaksanakan diantaranya adalah jasa pelayanan pelatihan teknis dengan total anggaran sebesar Rp. 187.793.000,- realisasinya sebesar Rp. 187.788.681 atau atau realisasi anggaran sebesar 99,99% sehingga anggaran dapat termanfaatkan secara maksimal Dengan keterbatasan jumlah SDM, sarana serta prasarana, indikator kinerja ini masih tetap mencapai target. Adanya kemajuan di bidang teknologi menjadikan sarana konsultasi dan diskusi menjadi lebih mudah dan cepat. Penunjukan SDM yang tepat dengan kompetensi yang sesuai juga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam efisiensi sumber daya.

### **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1. Kegiatan bimbingan dan pendampingan teknis industri khususnya pendampingan INDI 4.0
2. Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran;
3. Kegiatan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri, terkait adanya komunikasi antara BBSPJIKKP dan mitraindustri dalam hal penandatanganan SPK industri.

### **3) Kendala**

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target di tahun 2023 pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target.

### **4) Rekomendasi**

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah promosi yang aktif ke perusahaan/industri terkait kompetensi balai terutama mengenai industri 4.0.

## **b. Indikator Kinerja II.2 : Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri**

**Definisi :** Dalam dokumen Making Indonesia 4.0, terdapat 10 prioritas nasional salah satunya adalah akomodasi standar berkelanjutan. Standar berkelanjutan berhubungan erat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, salah satu tujuan dari Standarisasi Industri adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, Kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, standarisasi industri sangat relevan dan merupakan bagian penting dalam penguatan Making Indonesia 4.0.

Kegiatan fasilitasi standarisasi industri dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standarisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses, standar berkelanjutan).

**Cara Perhitungan** : Menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas standarisasi industri pada tahun berjalan.

**1) Hasil yang telah dicapai**

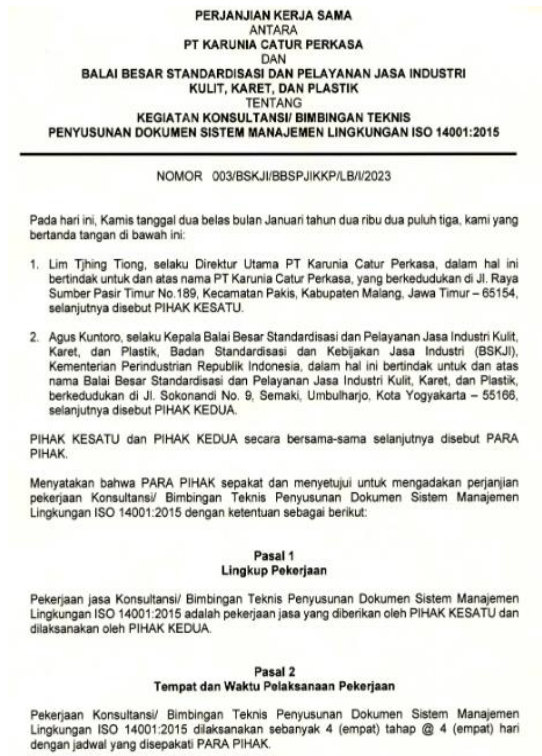
**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Berdasarkan Tabel 3.11, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator “Perusahaan yang terfasilitasi standarisasi industri” adalah 2 perusahaan dan tercapai 2 perusahaan (100%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 terdapat 2 perusahaan yang terfasilitasi standarisasi industri. Rincian capaian indikator ini ditunjukkan pada Tabel 3.14.

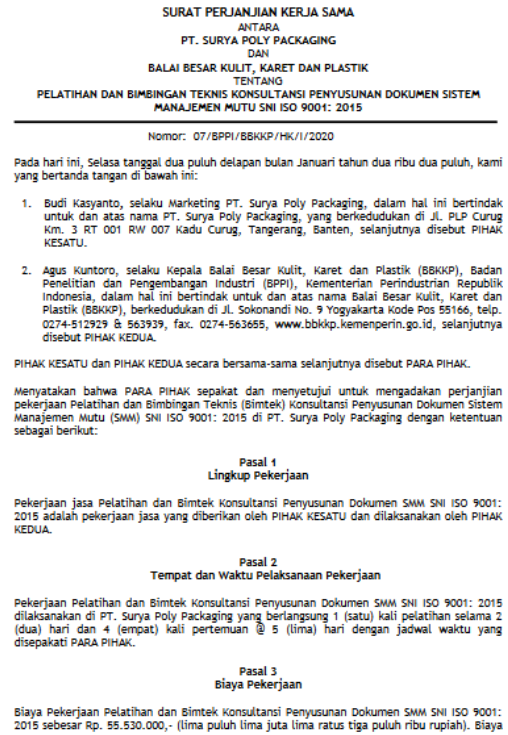
Tabel 3.14 Rincian Capaian Indikator Kinerja II.2

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Judul Kegiatan	SPK/ Order/Permintaan jasa konsultasi/ bukti lainnya 2023	Periode pelaksanaan kegiatan
1	PT Karunia Catur Perkasa	Industri kulit	Pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2014 pada PT Karunia Catur Perkasa	SPK Nomor 003/BSKJI/BBSPJIK KP/LB/I/2023 tgl 12 Januari 2023	Januari – Juli 2023
2	PT Surya Poly Packaging	Industri pengemasan	Pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada PT Surya Poly Packaging	SPK Nomor No 07/BPPI/BBKPP/HK/I/2020 tgl 28 Januari 2020	Maret – Mei 2023

Bukti pelaksanaan kegiatan ini dapat terlihat pada gambar-gambar di bawah ini.



Gambar 14. SPK dengan PT Karunia Catur Perkasa



Gambar 15. SPK dengan PT Surya Poly Packaging

## 2) Analisis hasil yang telah dicapai

### Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2023 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan Perusahaan yang terfasilitasi standarisasi industri selama TA 2021-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Perbandingan capaian perusahaan yang terfasilitasi industry 4.0

Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023
Perusahaan yang terfasilitasi standarisasi industri	2 perusahaan	3 perusahaan	2 perusahaan

Pada tahun 2021 terdapat 2 perusahaan yang mendapatkan layanan konsultasi dalam implementasi mutu/ standar yaitu PT Abasiat berupa Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Kemanan Informasi ISO 27001: 2013 dan PT. Sumber Setia Jaya Abadi berupa Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Integrasi Sistem Manajemen Mutu,

Lingkungan, dan K3 SNI ISO 9001:2015, SNI ISO 14001:2015, dan SNI ISO 45001:2018.

Pada tahun 2022 terdapat 2 perusahaan yang mendapatkan layanan konsultasi dalam implementasi mutu/ standar yaitu PT Warna Agung Selatan berupa Bimtek Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan (SML) SNI ISO 14001:2015, PT Cplusco Asri Jaya berupa Bimtek Penyusunan Dokumen ISO 22716 Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Produk Kosmetik, dan PT Asahan Crumb Rubber mendapatkan layanan konsultasi terkait implementasi mutu/standar berupa kegiatan Bimtek Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan (SML) SNI ISO 14001:2015 dan SMK ISO 450001:2018.

Pada tahun 2023 terdapat 2 perusahaan yang mendapatkan layanan konsultasi dalam implementasi mutu/ standar yaitu PT Karunia Catur Perkasa berupa Pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2014 pada PT Karunia Catur Perkasa dan PT Surya Poly Packaging berupa Pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada PT Surya Poly Packaging.

#### **Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi**

Secara keseluruhan total target jangka menengah pada Renstra tahun 2021-2024 adalah 10 perusahaan. Pada tahun 2023, terdapat capaian 2 perusahaan sehingga indikator kerja ini berhasil mencapai 70% dari total target jangka menengah pada Renstra. Diharapkan pada tahun berikutnya, indikator ini dapat terus mencapai target khususnya di bidang standardisasi industri, sehingga total target jangka menengah pada renstra BBSPJIKKP dapat tercapai.

#### **Perbandingan dengan RPJMN 2020-2024**

Dalam RPJMN 2020-2024, terdapat target persentase SNI bidang industri yang diterapkan sebesar 20% pada tahun 2024. Industri yang menerapkan SNI ini dapat berupa Industri Kecil dan Menengah (IKM). Selain itu, kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap PDB di tahun 2021 ditargetkan sebesar 61% dan tahun 2024 meningkat menjadi 65%. Dengan semakin banyaknya IKM yang memanfaatkan jasa pendampingan industry

bidang standarisasi industri, diharapkan semakin banyak IKM yang dapat menerapkan SNI serta dapat meningkatkan kemampuan industry barang dan jasa dalam negeri sehingga meningkatkan kontribusi IKM dalam PDB.

**Perbandingan capaian pada satker Kemenperin lain dengan capaian realisasi BBSPJIKKP**

Target indikator kinerja ini pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) adalah 5perusahaan dan tercapai 12 perusahaan. Kegiatan indikator ini pada BBSPJIKMN antara lain :

1. Kerjasama Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi (Rekomendasi Pemasangan dan Kemampuan Daya Rekat HT) pada PT. Jagat Konstruksi Abdipersada
2. Kerjasama Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi (Perekat Keramik Cementitious) pada PT. Cipta Mortar Utama
3. Kerjasama penyediaan teknologi pemanasan, pembakaran dan refraktori pada Adietya Research and Development Centre
4. Kerjasama Konsultansi dan Pengujian Produk Sandwich Panel pada PT. Eco Terra Dinamika
5. Konsultansi Teknis Root Cause Failure Analysis (RCFA) TSL Ausmelt Furnace di PT. Timah, Tbk Unit Metalurgi Muntok
6. Jasa Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Slag Nikel, Dry Tailing dan Fly Ash sebagai Produk Fungsional pada PT. Halmahera Jaya Feronikel
7. Jasa Konsultansi dan Optimalisasi Benefisiasi Kehalusan Butir Slag Nikel Menggunakan Metode Fisika pada PT. Halmahera Jaya Feronikel
8. Jasa Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Slag Nikel, Dry Tailing dan Fly Ash sebagai Produk Fungsional pada PT. Halmahera Persada Lygend
9. Jasa Optimalisasi dan Pengujian Bahan Baku Keramik pada PT. Rumah Keramik Indonesia
10. Jasa Kajian Test Work Pengolahan Pasir Kuarsa dan Lempung Penambangan Laut Menjadi Produk Komersial pada PT Timah
11. Konsultansi Pendampingan Sertifikasi SIH pada PT. Jui Shin Indonesia

## 12. Konsultasi dan Analisa Hasil Uji EDX pada PT. Solusi Sertifikasi Nasional Indonesia

Bila dibandingkan dengan BBSPJIKMN, maka realisasi indikator ini pada BBSPJIKMN lebih besar daripada BBSPJIKKP dimana realisasi indikator pada BBSPJIKKP adalah 2 perusahaan.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

BBSPJIKKP berhasil mencapai target perusahaan yang terfasilitasi standarisasi industri karena adanya pemenuhan kebutuhan dengan penyelesaian permasalahan dari industri yang sesuai dengan kompetensi balai. Adanya sarana dan SDM yang berkompeten juga sebagai faktor keberhasilan indikator ini. Selain itu komunikasi yang aktif dengan industri juga menyebabkan hasil konsultasi yang diberikan oleh balai tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan industri.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam pencapaian indikator kinerja ini ada beberapa kegiatan pendukung yang direncanakan untuk dilaksanakan diantaranya adalah jasa pelayanan pelatihan teknis dengan total anggaran sebesar Rp. 12.379.000,- realisasinya sebesar Rp. 12.378.505 atau realisasi anggaran sebesar 99,99%. Anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan keterbatasan jumlah SDM, sarana serta prasarana, indikator kinerja ini masih tetap mencapai target. Adanya kemajuan di bidang teknologi menjadikan sarana konsultasi dan diskusi menjadi lebih mudah dan cepat. Penunjukan SDM yang tepat dengan kompetensi yang sesuai juga menjadi salah satu industri dalam efisiensi sumber daya.

### **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1. Kegiatan bimbingan dan pendampingan teknis industri khususnya pendampingan standarisasi industri
2. Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran;



3. Kegiatan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri, terkait adanya komunikasi antara BBSPJIKKP dan mitra industri dalam hal penandatanganan Kerjasama.

**3) Kendala**

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian target di tahun 2023 pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target.

**4) Rekomendasi**

Rencana perbaikan di tahun selanjutnya adalah promosi yang aktif ke perusahaan/ industri terkait kompetensi balai terutama standarisasi industri.

**7. SASARAN KEGIATAN III : Meningkatkan Kemampuan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri**

Tabel 3.16 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan III

Sasaran Kegiatan III	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	6 Persen	45,84 Persen	764,00%
	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	20 Persen	41,79 Persen	208,95%
	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan	5 Persen	48,91 Persen	978,20%
	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	78 Persen	82,28 Persen	105,49%

Sasaran kegiatan III ini dalam pengukuran ketercapaiannya terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu Produktivitas/efisiensi perusahaan ndustry yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi, Meningkatkan utilisasi

layanan jasa industri di dalam negeri, Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri dan Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Masing-masing indikator memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2023, penjelasan capaian dari masing-masing indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

**a. Indikator Kinerja III.1 : Produktivitas/efisiensi perusahaan industry yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi**

**Definisi :** Optimalisasi teknologi serta rekayasa proses dan produk dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahan baku sumber daya alam atau hasil industry hulu menjadi pendukung utama produk industri manufaktur dalam negeri. Salah satu faktor strategis yang telah dijalankan BSKJI dalam meningkatkan kapabilitas industri khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultasi.

Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan system manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri.

Outcome layanan jasa konsultasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi industri/system manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan DAPATI.

**Cara Perhitungan :** Menghitung rata-rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum kegiatan konsultasi (A) dan nilai performansi sesudah konsultasi (B).

$$\text{Produktivitas} = (B-A)/A \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = (A-B)/A \times 100\%$$

**1) Hasil yang telah dicapai**

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Berdasarkan Tabel 3.16, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi” adalah 6% dan tercapai 45,84% (764%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan

realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator ditunjukkan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.17 Rincian Capaian Indikator Kinerja III.1

No	Judul Kegiatan	Nama Perusahaan	Jasa Konsultasi yang diberikan	Performansi sebelum	Performansi sesudah	Produktivitas (%)
1	Jasa Konsultasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit pada UD Berkah	UD Berkah	Konsultasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah	Limbah fleshing belum tertangani dan hanya ditumpuk di area produksi sehingga tidak ada nilai tambah pada IKM. Laba rata-rata/bulan Rp	Limbah fleshing diolah menjadi pakan ikan dan dapat memberikan peningkatan laba sebesar Rp	8,13%
2	Peningkatan Mutu Produk Melalui Pemantauan Proses Produksi pada CV. PSM	CV Pusaka Sarana Mustika	Konsultasi Optimalisasi Teknologi Industri	Product reject sebanyak 20%	Product reject menjadi 3,29%	83,55%
<b>Rata-rata peningkatan produktivitas/efisiensi perusahaan</b>						<b>45,84%</b>

a. UD Berkah

UD Berkah adalah salah satu IKM yang bergerak di bidang usaha penyamakan kulit, dan beroperasi di Nganyang, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. UD Berkah memproduksi kulit pikel domba, yang merupakan bahan baku produksi bahan kulit kras (crust leather) dan bahan kulit jadi (finished leather). UD Berkah berdiri sejak tahun 2020 dengan jumlah tenaga kerja saat ini sebanyak 5 (lima) orang dan mampu memproduksi dengan kapasitas hingga 4.000 kg kulit mentah/bulan.

UD Berkah membutuhkan bantuan dalam pemecahan permasalahan untuk menangani limbah proses fleshing kulit yang tepat dan diharapkan penanganan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi IKM. Proses fleshing merupakan proses menghilangkan sisa daging (flesh) yang masih menempel pada kulit segar. Pada kondisi normal, dari 4 (empat)

ton kulit mentah yang diproses, limbah proses fleshing yang berupa sisa daging (flesh) mencapai 1 (satu) ton. Limbah fleshing tersebut belum tertangani dan hanya ditumpuk di area produksi IKM. Karakteristiknya sebagai limbah industri, menjadikan limbah fleshing sebagai tempat ideal bagi mikroorganisme. Hal ini mengakibatkan dampak terhadap lingkungan sekitar, salah satunya bau. Disisi lain, limbah organik berpotensi diolah menjadi produk lain yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, penanganan yang tepat dan juga menguntungkan menjadi harapan dan kebutuhan IKM untuk menjaga keberlanjutan usaha yang dijalani. Permasalahan terkait pemanfaatan limbah fleshing ini diselesaikan melalui kegiatan jasa konsultasi teknis melalui program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI). Pemanfaatan limbah fleshing melalui teknologi yang tepat guna dapat meningkatkan nilai tambah dari limbah yang dihasilkan oleh IKM UD. Berkah. Untuk mengatasi hal tersebut, BBSPJIKKP memberikan pendampingan dan konsultasi teknis terkait teknologi pemanfaatan limbah fleshing kulit menjadi pakan ikan di IKM UD. Berkah.

Kegiatan jasa konsultasi teknis teknologi pemanfaatan limbah fleshing kulit pada program DAPATI kolaborasi antara BBSPJIKKP dan IKM UD Berkah dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan, sejak bulan Maret hingga bulan Oktober tahun 2023. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, dengan Pimpinan IKM UD. Berkah. PKS antara BBSPJIKKP dan IKM UD. Berkah telah dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023 dengan Nomor 011/BSKJI/BBSPJIKKP/LB/IV/2023 dan nomor 01/BERKAH/IV/2023.
2. Pelaksanaan survey awal dalam rangka identifikasi awal untuk mengetahui kondisi terkini limbah fleshing yang dihasilkan oleh IKM, baik dari segi kuantitasnya, penanganannya, dan dampak yang ditimbulkan.
3. Pelaksanaan persiapan bahan baku utama pembuatan pakan ikan, yang berupa tepung fleshing. Persiapan awal adalah melihat

karakteristik limbah fleshing, melalui Analisa proksimat bahan tersebut.

4. Setelah limbah fleshing diketahui karakteristiknya, maka dilakukan pembuatan tepung fleshing sebagai bahan baku utama dalam formulasi pakan ikan.
5. Setelah tepung fleshing siap, kegiatan selanjutnya adalah melakukan pembuatan pakan ikan. Pembuatan pakan ikan dilakukan dengan mencampurkan bahan-bahan dalam suatu formulasi, yang terdiri dari tepung fleshing, tepung ikan, ampas tahu, bekatul, dan tepung tapioca.
6. Pakan ikan yang dihasilkan, selanjutnya dianalisa mutu dengan menggunakan parameter dalam Analisa proksimat, dimana dilihat kadar air, abu, lemak, protein, serat kasar, karbohidrat, dan nilai kalorinya.
7. Pakan yang sudah jadi kemudian diujicoba dengan menebarkannya ke kolam yang berisi ikan.

Berdasarkan data yang dihimpun pada semester kedua tahun 2022, diperoleh hasil bahwa IKM UD Berkah mengolah 1.723 lembar kulit domba awetan garam, dimana setara dengan 2.584 kg kulit domba awetan garam. Dengan menggunakan asumsi yang diestimasi IKM, maka rata-rata bulanan limbah fleshing yang dihasilkan oleh IKM adalah sekitar 646 kg. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa tepung fleshing yang dapat dihasilkan dari limbah fleshing yang diolah adalah sekitar 25%. Sehingga, apabila IKM UD Berkah mengolah seluruh limbah fleshing, maka akan mendapatkan tepung fleshing sebanyak 161 kg. Dengan menggunakan komposisi penyusun bahan pakan yang digunakan, maka bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pakan ikan adalah 161 kg tepung fleshing, 92 kg tepung ikan, 138 kg ampas tahu, 46 kg bekatul, dan 23 kg tepung tapioca. Tabel 3.17 menyajikan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengolah limbah fleshing menjadi pakan ikan.

Tabel 3.18. Perhitungan modal pembuatan pakan ikan dari limbah fleshing

Bahan	Jumlah (kg)	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
Ammonium klorida	13	25.000	325.000
Degreasing agent	6	40.000	240.000
Tepung ikan	92	7.500	690.000
Ampas tahu	138	3.000	414.000
Bekatul	46	3.000	138.000
Tepung tapioca	23	14.000	322.000
		Total Modal Kerja	2.129.000

Sesuai dengan menggunakan komposisi pada Tabel 6, berat pakan ikan kering yang dihasilkan adalah sekitar 300 kg. Sesuai referensi yang diperoleh, harga acuan pakan ikan curah saat ini, paling murah dijual dengan harga Rp. 8.000,-/kg, maka IKM akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 2.400.000,- dan mendapatkan pendapatan bersih sebesar Rp. 270.196,-. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2022, IKM UD Berkah memiliki rerata pendapatan bersih per bulan sebesar Rp 3.324.617. Setelah dilakukan pendampingan dengan BBSPJIKKP, pendapatan bersihnya menjadi Rp 3.594.813, sehingga potensi pendapatan bersih dari penjualan pakan ikan tersebut meningkatkan pendapatan bersih bulanan hingga 8,13% dari IKM. Hal ini dapat diartikan bahwa IKM UD Berkah dapat meningkatkan produktivitasnya hingga 8,13%, yang dilihat dari penambahan pendapatan bersihnya.

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT,  
KARET, DAN PLASTIK  
DAN  
UD. BERKAH  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI TEKNIS TEKNOLOGI  
PEMANFAATAN LIMBAH FLESHING KULIT**

**Nomor: 011/BSKJI/BSPJIKKP/LB/IV/2023  
Nomor: 01/BERKAH/IV/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di kantor Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, Jl. Sokonandi No. 9, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dilakukan perjanjian kerja sama antara para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Hagung Eko Pawoko, S.TP, M.Sc**, selaku Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, berkedudukan di Jl. Sokonandi No. 9, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Alfinda Nur Tri Sulistya**, selaku Pemilik UD Berkah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UD Berkah yang berkedudukan di Nganyang, Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Mengingat pelaksanaan Program Percepatan Pemanfaatan Teknologi Melalui Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) Tahun 2023 bagi UD Berkah yang berkedudukan di Nganyang, Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum pada pasal-pasal di bawah ini:

Paraf Pihak I    
 Paraf Pihak II

**Gambar 16. SPK antara BBSPJIKKP dan UD Berkah**



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA  
INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK  
NOMOR 61 TAHUN 2023**

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KONSULTANSI TEKNIS TEKNOLOGI PEMANFAATAN  
LIMBAH FLESHING KULIT DI IKM UD. BERKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT,  
KARET, DAN PLASTIK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan konsultasi teknis teknologi pemanfaatan limbah fleshing kulit di IKM, perlu menunjuk tim pelaksana kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik;
- Mengingat** :
1. Surat Perintah Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
  2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
  3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
  4. Surat Perintah Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor B/78/BSKJI/KP/H/2023 tentang Ptt. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
1. KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KONSULTANSI TEKNIS TEKNOLOGI PEMANFAATAN LIMBAH FLESHING KULIT DI IKM UD. BERKAH.
- KESATU** :
1. Menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksana Konsultasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit di IKM UD. Berkah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan.

KETIGA : .....

**Gambar 17. SK Tim Pelaksana  
Konsultasi Teknsi Teknologi  
Pemanfaatan Limbah Fleshing IKM UD  
Berkah**





Gambar 18. Pelaksanaan kegiatan Konsultasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit pada UD Berkah

b. CV Pusaka Sarana Mustika

CV. Pusaka Sarana Mustika (selanjutnya disebut dengan CV. PSM) merupakan salah satu industri kecil-menengah (IKM) yang bergerak pada produksi barang karet yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. CV. PSM memulai usahanya pada tahun 1970, dengan nama perusahaan "Djawa Djaja". Bidang usaha Djawa Djaja meliputi kompon karet dan ebonit. Pada tahun 2011 namanya diubah menjadi Pusaka Sarana Mustika dengan bentuk perusahaan *Commanditaire Venootschap* (CV). Produk utama CV. PSM meliputi kompon karet (karet alam dan sintesis), barang jadi karet dan polyurethane (PU) casting. Proses produksi didasarkan pada pesanan dari pelanggan (*made by order*). CV. PSM memasok kompon karet bagi IKM karet di area Sidoarjo. Dalam menjalankan usahanya, CV. PSM didukung oleh total 9 ( industry) orang karyawan dengan perincian 8 (delapan) orang bagian produksi dan 1 (satu) orang sebagai staf administrasi. Peralatan proses yang dimiliki oleh CV. PSM meliputi 2 unit two-roll mill (2011) dengan kapasitas giling 40 kg kompon dan 2 unit vulcanizing press (rekayasa). Omzet per tahun CV. PSM mencapai rata-rata Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah). Dalam proses produksinya, CV. PSM belum melakukan pemantauan proses secara rutin (*batch to batch*). Pengujian mutu produk akhir dilakukan apabila ada permintaan dari pelanggan. Oleh karena itu produk tidak sesuai yang dihasilkan cukup besar, mencapai 20%. Penanganan



produk tidak sesuai yang telah dilakukan adalah mengalihkan produk tersebut sebagai produk mutu rendah (down grade). Selain itu, CV. PSM juga cukup sering mendapatkan industri dari pelanggan terkait mutu produk yang dihasilkan. Nilai produk tidak sesuai yang cukup besar dan industri dari pelanggan terkait mutu produk diduga karena belum dilakukan pemantauan proses dan mutu produk akhir. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pemantauan proses produksi penting dilakukan untuk memberikan kepastian mutu produk kepada pelanggan.

Kegiatan jasa konsultasi mencakup pendampingan kepada IKM dalam hal pemantauan konsistensi spesifikasi bahan baku dan bahan aditif, uji Rheometer terhadap kompon yang diproduksi, pengujian viskositas Mooney kompon, pengujian Mooney Scorch kompon, pemantauan kondisi alat proses (kalibrasi vulcanizing press pada parameter suhu), pemantauan mutu produk melalui pengujian fisis, mekanik dan kimia, serta sosialisasi (sharing session) metode pemantauan proses dan produk sehingga dapat diterapkan secara rutin pada proses produksi. Kegiatan konsultasi program DAPATI dilaksanakan selama 10 bulan dimulai pada bulan Maret 2023 hingga bulan Desember 2023.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 3.19

Tabel 3.19 Hasil Pelaksanaan Kegiatan DAPATI di CV PSM

No.	Parameter	Sebelum	Sesudah
1.	Spesifikasi bahan baku	Belum ada dokumentasi pemantauan spesifikasi bahan baku	Telah dilakukan dengan bantuan program DAPATI dan sedang dalam tahap penerapan SOP
2.	Pemantauan kompon	Belum dilakukan	Telah dilakukan dengan bantuan program DAPATI dan akan dilakukan secara berkala
3.	Kalibrasi alat proses ( <i>compression molding</i> )	Belum dilakukan	Telah dilakukan dengan bantuan program DAPATI dan akan dilakukan perbaikan alat.

No.	Parameter	Sebelum	Sesudah
4.	Pemantauan mutu produk	Dilakukan jika diminta oleh pelanggan	Akan dilakukan secara berkala untuk kompon yang diproduksi secara reguler
5.	Teknik komponding	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguasaan teknik mastikasi karet belum sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penguasaan teknik mastikasi karet meningkat</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teknik penambahan bahan satu per satu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teknik penambahan bahan dengan caradicampur menjadi 1</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waktu proses lama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waktu proses lebih singkat</li> </ul>
6.	Belum didokumentasikan secara kuantitatif Kurang lebih 20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum didokumentasikan secara kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sudah ada SOP berikut formulirnya sehingga dapat diterapkan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang lebih 20%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produk gagal 3,29% (Agustus– Oktober 2023)</li> </ul>
7.	Belum didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum didokumentasikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komplain 2,8% (Agustus – Oktober 2023)</li> </ul>



Gambar 19. Kompon siap dicetak



Gambar 20. Penandatanganan SPK dengan CV PSM



Gambar 21. Sosialisasi pemantauan proses



Gambar 22. Kunjungan tim pusat OPTIKJI

Dari data efisiensi 2 kegiatan DAPATI pada tahun 2023, besarnya rata-rata peningkatan Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi ialah sebesar 45,84 persen.

## 2) Analisis hasil yang telah dicapai

### Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perkembangan Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi selama TA 2022-2023 (indikator ini baru ada di TA 2022) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20. Perbandingan capaian produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi 2022-2023

Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	61,12 Persen	45,84 Persen

Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) kegiatan DAPATI yaitu Konsultansi Area Lay Out Showroom di IKM Djoen Leather dan Pemanfaatan Limbah Sarung Tangan Karet di PT Yutaka Asia. Rata-rata produktivitas industri setelah

kegiatan pendampingan ini adalah 61,12 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.21 Rincian kegiatan DAPATI Tahun 2022

No.	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Performansi yang diukur	Efisiensi
1.	Djoen Leather	Produk kulit	Efisiensi waktu sebelum dan sesudah dilakukan perubahan layout area produksi dan showroom	Setelah dilakukan konsultansi perubahan layout area produksi dan showroom, produk kulit yang terjual dari 359 produk menjadi 379 produk (5,57%)
2.	PT. Yutaka Asia	Produk karet	Pemanfaatan limbah sarung tangan karet menjadi produk karet lembaran	Setelah dilakukan konsultansi, limbah sarung tangan karet dapat dimanfaatkan menjadi produk karet lembaran yang menghasilkan profit dari Rp 3.000 menjadi Rp 6.500 (116,67%)
<b>Rata-rata Produktivitas</b>				<b>61,12%</b>

Secara keseluruhan, nilai produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi di tahun 2023 (45,84%) lebih rendah daripada tahun 2022 (61,12%). Jumlah kegiatan DAPATI pada tahun 2023 (2 kegiatan) sama dengan tahun 2022 (2 kegiatan).

### **Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi**

Rata-rata target untuk jangka menengah pada Renstra tahun 2021-2024 untuk indikator ini adalah 6%. Tahun 2023 merupakan tahun kedua setelah adanya revisi pada renstra 2020-2024. Target pada tahun 2022 sebesar 6% atau sama dengan rata-rata target dalam Renstra. Pada tahun 2023, terdapat capaian 764% sehingga indikator kerja ini berhasil melebihi rata-rata target jangka menengah pada Renstra. Jika dihitung dari tahun 2022, maka rata-rata capaian indikator kinerja ini telah jauh melebihi rata-rata target dalam Renstra. Diharapkan pada tahun berikutnya, indikator ini dapat terus mencapai target, sehingga rata-rata target jangka menengah pada renstra BBSPJIKKP dapat tetap tercapai.

### **Perbandingan dengan RPJMN 2020-2024**

Dalam RPJMN 2020-2024, terdapat target persentase SNI bidang industri yang diterapkan sebesar 20% pada tahun 2024. Industri yang menerapkan SNI ini dapat berupa Industri Kecil dan Menengah (IKM). Selain itu, kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap PDB di tahun 2021 ditargetkan sebesar 61% dan tahun 2024 meningkat menjadi 65%. Dengan semakin banyaknya IKM yang memanfaatkan jasa konsultasi melalui program DAPATI, diharapkan semakin banyak IKM yang dapat menerapkan SNI serta dapat meningkatkan kemampuan industry barang dan jasa dalam negeri sehingga meningkatkan kontribusi IKM dalam PDB.

### **Perbandingan capaian pada satker Kemenperin lain dengan capaian realisasi BBSPJIKKP**

Target indikator kinerja ini pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) adalah 13 persen dan tercapai 58 persen. Terdapat 2 industri yang memperoleh kegiatan jasa konsultasi yaitu IKM Yudistira dan PT Indeks Industri Indonesia.

Bila dibandingkan dengan BBSPJIKMN, maka realisasi indikator ini pada BBSPJIKKP lebih besar daripada BBSPJIKKP dimana realisasi indikator pada BBSPJIKKP adalah 45,84%.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

BBSPJIKKP berhasil mencapai produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi karena adanya kesesuaian kompetensi balai dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dihadapi industri, dalam hal ini IKM. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara balai dan industri juga mendukung keberhasilan capaian kinerja ini. Peran aktif dari IKM dalam mengeluarkan dana juga mempengaruhi keberhasilan kegiatan ini. Meskipun dengan keterbatasan anggaran, namun BBSPJIKKP berhasil memotivasi dan mendukung IKM dalam menggunakan SDM dan anggaran yang ada sehingga tercapainya peningkatan efisiensi dan produktivitas di IKM. Adanya bantuan dari POPTIKJI sebagai sumber dana serta bantuan administrasi lainnya menyebabkan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pengiriman sampel untuk pengujian di luar balai juga dapat menggunakan jasa pengiriman sehingga mengurangi kebutuhan anggaran perjalanan dinas. Pemilihan SDM yang tepat dalam memberikan konsultasi juga menyebabkan efisiensi pada penggunaan jumlah SDM.

### **Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1. Kegiatan miniplant kulit dan miniplant karet terkait pelaksanaan kegiatan
2. Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran;
3. Kegiatan pengadaan, terkait pengadaan bahan insulator dan bahan lainnya yang mendukung kegiatan teknis konsultasi
4. Kegiatan administrasi keuangan, terkait pertanggungjawaban penggunaan;
5. Kegiatan pengujian, terkait pengujian pakan ikan
6. Kegiatan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri, terkait adanya komunikasi antara BBSPJIKKP dan mitra industri dalam hal penandatanganan kerjasama

### **3) Kendala**

Secara umum tidak terdapat kendala di tahun 2023 dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini ialah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara balai dengan IKM sehingga kegiatan dapat mencapai target.

### **4) Rekomendasi**

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah memastikan dampak yang terukur pada kegiatan DAPATI serta melibatkan pihak akademisi maupun instansi pemerintah lainnya dalam memberikan konsultasi.

### **b. Indikator Kinerja III.2 : Meningkatnya PNBP layanan jasa industri**

**Definisi :** Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai – balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis serta layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja layanan UPT BSKJI. Melalui kegiatan peningkatan PNBP layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

#### **Cara Perhitungan :**

Menghitung peningkatan realisasi PNBP layanan jasa industri pada tahun berjalan dalam bentuk Rupiah (B) dengan realisasi PNBP tahun sebelumnya dalam bentuk Rupiah (A), dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Indikator} = (B - A) / A \times 100\%.$$

#### **1) Hasil yang telah dicapai**

##### **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Berdasarkan Tabel 3.16, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator “Meningkatnya PNBP layanan jasa industri” adalah 20% dan tercapai 41,79% (208,95%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator ini ditunjukkan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22. Peningkatan Realisasi jumlah PNBP BBSPJIKKP TA. 2023

<b>Pagu</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Target Penerimaan (Rp)</b>	5.000.000.000	5.568.042.000
<b>Realisasi Penerimaan (Rp)</b>	4.207.051.331	5.965.483.946
<b>Realisasi Penerimaan (%)</b>	84,14	107,14
<b>Peningkatan realisasi pelaksanaan jasa layanan ke industri di tahun 2023 (%)</b>		<b>41,79</b>

Pada tahun 2022 BBSPJIKKP memiliki target penerimaan PNBP sebesar Rp 5.000.000.000 dan realisasi dari target tersebut adalah Rp 4.207.051.331 (84,14%), sedangkan pada tahun 2023 BBSPJIKKP memiliki target penerimaan PNBP sebesar Rp 5.568.042.000 dan realisasi dari target

tersebut adalah Rp 5.965.483.946 (107,14%). Oleh karena itu, peningkatan kegiatan layanan teknis di tahun 2023 ini adalah 41,79%.

Selain peningkatan PNBP, meningkatnya layanan jasa industri di dalam negeri juga dapat dilihat dari jumlah pelanggan kegiatan pelayanan yang ada pada BBSPJIKKP seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23. Realisasi jumlah PNBP per Layanan dan Volume Layanan TA 2022-2023

No	Jenis Layanan	Realisasi Penerimaan (Rp)		Jumlah Pelanggan		Jumlah Output Volume	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Pengujian	700,072,150	830,319,000	204	175	1750 sampel	2311 sampel
2	Kalibrasi	168,513,200	229,943,000	52	85	586 alat	837 alat
3	Uji Profisiensi	50,760,000	95,495,000	32	51	32 industri	51 industri
4	Inspeksi	-	153,033,000	1	9	1 industri	9 industri
5	Validasi Verifikasi Gas Rumah Kaca	-	15,750,000	1	1	1 industri	1 industri
6	Pelatihan	464,234,000	747,439,000	15	40	254 orang	464 orang
7	Sertifikasi	2,549,100,000	2,443,596,000	79	119	69 sertifikat	33 sertifikat
8	Pemeriksa Halal	75,000,000	983,050,000	14	426	-	419 sertifikat
9	Audit Teknologi	-	25,000,000	-	-	-	-
10	Konsultansi	-	135,460,000	5	4	5 industri	4 industri
11	Miniplant Karet	4,054,280	117,783,118	2	9	2 pelanggan	9 pelanggan
12	Miniplant Kulit	195,317,701	178,420,828	70	101	70 pelanggan	101 pelanggan
13	JPT Lainnya	-	10,195,000	13	24	13 kegiatan	24 kegiatan
<b>Jumlah</b>		<b>4.207.051.331</b>	<b>5.965.483.946</b>	<b>474</b>	<b>614</b>		



## 2) Analisis yang telah dicapai

### **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Perkembangan meningkatnya layanan jasa industri BBSPJIKKP selama TA 2018-2023 (indikator ini baru ada di TA 2021) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Indikator III.2

Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2018	Realisasi TA. 2019	Realisasi TA. 2020	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023
Meningkatnya layanan jasa industri	1,67%	2,17%	-45,28%	32,94%	11,47%	41,79%

Selama tahun 2018-2023 selalu terjadi peningkatan layanan jasa industri, kecuali saat tahun 2020 dimana terjadi penurunan PNBPN hingga -45,28% dan tahun 2022. Pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan PNBPN karena adanya situasi pandemi dari bulan Maret 2020 yang mengharuskan layanan tutup selama beberapa bulan serta kebijakan WFH dan WFO yang menghambat pelaksanaan pelayanan. Layanan jasa industri meningkat di tahun 2021, namun kembali menurun di tahun 2022. Walaupun persentase menurun, namun realisasi PNBPN tahun 2021 (Rp 3.774.264.959) meningkat dari tahun 2020 (Rp 2.838.990.287) dimana layanan jasa BBSPJIKKP mulai menyesuaikan diri pasca industri covid-19 tahun 2020. Penerimaan PNBPN tahun 2023 tercatat sebagai penerimaan terbesar selama 5 tahun ke belakang yaitu Rp 5.965.483.946.

### **Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi**

Rata-rata target untuk jangka menengah pada Renstra tahun 2021-2024 untuk indikator ini adalah 20%. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga setelah adanya revisi pada renstra 2020-2024. Target pada tahun 2023 sebesar 20% atau 150% lebih tinggi dari rata-rata target dalam Renstra sebesar 13,25%. Pada tahun 2023, terdapat capaian 315,40% sehingga indikator kerja ini berhasil melebihi rata-rata target jangka menengah pada Renstra. Jika dihitung dari tahun 2021, maka rata-rata capaian indikator kinerja ini telah jauh melebihi rata-rata target dalam Renstra. Diharapkan pada tahun

berikutnya, indikator ini dapat terus mencapai target, sehingga rata-rata target jangka menengah pada renstra BBSPJIKKP dapat tetap tercapai.

#### **Perbandingan dengan RPJMN 2020-2024**

Dalam RPJMN 2020-2024, terdapat target persentasi SNI bidang 2022-2023 yang diterapkan sebesar 20% pada tahun 2024. Dengan semakin banyaknya layanan jasa industri yang dilakukan BBSPJIKKP berarti semakin banyak pula perusahaan yang terlayani dan berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian target penerapan SNI di industri.

#### **Perbandingan capaian pada satker Kemenperin lain dengan capaian realisasi BBSPJIKKP**

Target indikator kinerja ini pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) adalah 3 persen dan tercapai 26,35 persen. Realisasi PNBP BBSPJIKMN pada tahun 2022 sebesar Rp 6.916.876.750 dan realisasi PNBP tahun 2023 sebesar Rp 8.739.521.210.

Bila dibandingkan dengan BBSPJIKMN, maka realisasi indikator ini pada BBSPJIKKP lebih besar daripada BBSPJIKMN dimana realisasi indikator pada BBSPJIKKP adalah 41,79%.

#### **Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

Indikator "Meningkatnya PNBP layanan jasa industri" telah berhasil mencapai target sebesar 41,79%. Capaian ini berdasarkan peningkatan penerimaan PNBP yang diterima BBSPJIKKP tahun 2023 dibanding tahun 2022. Keberhasilan indikator ini mencapai target karena bertambahnya penerimaan dari layanan baru seperti uji profisiensi, inspeksi, layanan validasi dan verifikasi rumah kaca, pemeriksa halal, dan audit teknologi. Selain itu disebabkan adanya peningkatan penerimaan PNBP dari tahun sebelumnya pada layanan pengujian, sertifikasi, pelatihan, miniplant kulit, miniplant karet, dan konsultasi. Aktifnya promosi layanan jasa pada tahun 2023 pun menjadi sebab keberhasilan indikator ini.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya khususnya SDM terkait layanan cukup tinggi. Dengan keterbatasan SDM yang terlibat dalam pelayanan (missal pemasaran, pengujian, kalibrasi, sertifikasi dan layanan lainnya), jumlah layanan dapat meningkat dari tahun sebelumnya hingga mencapai target output layanan yang ditetapkan. Pengurangan Standar Pelayanan Minimum (SPM) telah berhasil mengefisienkan kinerja dari SDM dan waktu keterlambatan penyelesaian layanan menjadi berkurang. Penggunaan sarana informasi pelanggan yang lengkap juga dapat mendukung terlaksananya capaian kinerja ini. Pelayanan online juga dapat mengefisienkan waktu pelayanan BBSPJIKKP terhadap pelanggan serta meningkatkan jumlah pelanggan layanan jasa industri.

### **Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1. Kegiatan pengembangan jasa teknis, meliputi pemasaran, kerjasama dan pengembangan informasi terkait terpenuhinya layanan secara administratif kepada pelanggan
2. Kegiatan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pendampingan, miniplant, LVV GRK, audit teknologi, inspeksi teknis, uji profesiensi dan konsultasi terkait pelaksanaan layanan teknis
3. Kegiatan pengadaan terkait pemeliharaan peralatan uji dan kalibrasi serta pengadaan bahan dan alat pendukung layanan jasa industri
4. Kegiatan administrasi keuangan, terkait pengelolaan keuangan penerimaan dan penggunaan PNBK
5. Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran.

### **3) Kendala**

Secara umum tidak terdapat kendala di tahun 2023 dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini ialah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara semua personel BBSPJIKKP dalam pelaksanaan kegiatan layanan jasa sehingga kegiatan dapat mencapai target. Namun beberapa peralatan penunjang layanan ada yang rusak dan

membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan. Jejaring kerjasama dan promosi layanan jasa teknis juga menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

#### 4) Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya ialah kunjungan yang lebih intens ke industri-industri untuk mempromosikan kemampuan balai dan layanan berpotensi BBSPJIKKP untuk meningkatkan PNBP, seperti LVV GRK dan bimtek, serta peningkatan kompetensi SDM di BBSPJIKKP agar kualitas pelayanan semakin meningkat.

### c. Indikator Kinerja III.3 : Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan

**Definisi** : Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai – balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis, serta layanan jasa industri.

Yang dimaksud dengan hasil layanan jasa industri adalah penjumlahan seluruh hasil Jasa Pelayanan dalam tahun berjalan, dengan satuan sebagai berikut:

1. JPT Pengujian (satuan: laporan hasil uji)
2. JPT Kalibrasi (satuan: laporan hasil kalibrasi)
3. JP Pelatihan Teknis (satuan: orang yang dilatih)
4. JP Sertifikasi (satuan: sertifikat/hasil surveillance)
5. JP Inspeksi Teknik (satuan: laporan hasil inspeksi)
6. JP Konsultasi (satuan: laporan hasil konsultasi)
7. JPT Teknologi Proses dan Mesin (satuan: laporan hasil teknologi proses dan mesin)
8. Jasa RBPI (satuan: laporan hasil RBPI)
9. JPT lainnya (satuan: order)

**Cara Perhitungan** : Menghitung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai indikator} = (B-A)/A \times 100\%$$

1) Hasil yang dicapai

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Berdasarkan Tabel 3.16, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022 untuk indikator “Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan” adalah 5 persen dan tercapai sebesar 48,91 persen (978,20%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.25.

Tabel 3.25 Rincian Capaian Indikator III.3

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Pengujian	laporan hasil uji	1745	2264
2	Kalibrasi	laporan hasil kalibrasi	573	816
3	Pelatihan Teknis/Pendampingan	orang (peserta pelatihan)	164	464
4	Sertifikasi	sertifikat/ hasil surveilans	181	122
5	Inspeksi Teknik	laporan hasil inspeksi	1	13
6	Konsultansi	laporan hasil konsultansi	3	4
7	Pemeriksa Halal	laporan pemeriksaan halal	0	407
8	Miniplant Kulit	order	399	472
9	Miniplant Karet	order	19	34
10	Uji Profisiensi	order	32	45
11	Validasi/ Verifikasi GRK	pernyataan validasi/ verifikasi	1	2
<b>JUMLAH</b>			3,118	4,643
<b>PENINGKATAN (%)</b>			<b>48.91%</b>	

2) Analisis yang telah dicapai

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Perkembangan indikator “Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan” selama TA 2021-2023 (indikator ini baru di tahun 2023) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26 Perbandingan capaian Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan TA 2021-2024

Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023
Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	-	-	48.91%

Indikator “Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan” merupakan indikator baru di tahun 2023, sehingga tidak ada capaian pada tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2023 BBSPJIKKP memiliki 13 layanan jasa, namun pada tabel 3.25 hanya 11 layanan jasa. Hal ini karena syarat pada indikator ini merupakan layanan yang telah yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBPN (berbayar).

**Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi**

Secara keseluruhan rata-rata target jangka menengah pada Renstra tahun 2021-2024 adalah 6%. Target pada tahun 2023 sebesar 48,91% dari total target dalam Renstra dengan capaian 978,20%. Jika dihitung dari tahun 2021, maka capaian indikator kinerja ini telah mencapai 815,17% dari target rata-rata Renstra. Diharapkan pada tahun berikutnya, indikator ini dapat terus mencapai target, sehingga total target jangka menengah pada renstra BBSPJIKKP dapat tercapai.

**Perbandingan dengan RPJMN 2020-2024**

Dalam RPJMN 2020-2024, terdapat target persentasi SNI bidang industry yang diterapkan sebesar 20% pada tahun 2024. Dengan semakin banyaknya jumlah lingkup layanan jasa industri BBSPJIKKP akan semakin banyak pula perusahaan yang terlayani dan berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standarisasi industri sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian target penerapan SNI di sektor industri.

### **Perbandingan capaian pada satker Kemenperin lain dengan capaian realisasi BBSPJIKKP**

Target indikator kinerja ini pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) adalah 5 persen dan tercapai 8,34 persen. Jumlah hasil layanan jasa BBSPJIKMN pada tahun 2022 sebanyak 1738 dan realisasi PNPB tahun 2023 sebesar Rp 1883.

Bila dibandingkan dengan BBSPJIKMN, maka realisasi indikator ini pada BBSPJIKKP lebih besar daripada BBSPJIKMN dimana realisasi indikator pada BBSPJIKKP adalah 48,91%.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

Keberhasilan kinerja ini disebabkan dengan adanya keterlibatan semua personil yang bertanggung jawab dalam layanan jasa teknis di BBSPJIKKP. Dengan memanfaatkan fasilitas laboratorium yang terakreditasi serta SDM teknis yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan seperti Pembina Industri, AMMI, Petugas Pengambil Contoh (PPC) dan Penguji Mutu Barang (PMB) juga sangat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Terlaksananya kegiatan penerapan Sistem Mutu terkait penyusunan dan kaji ulang dokumen Panduan Mutu (PM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK) dan Format Lapangan serta adanya audit internal juga mendukung ketercapaian indikator kinerja ini.

### **Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1. Kegiatan penerapan Sistem Mutu terkait penyusunan dan kaji ulang dokumen Panduan Mutu (PM), Standar Operasional Prosedur (SOP), Instruksi Kerja (IK) dan Format Lapangan serta audit internal.
2. Kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM untuk Auditor dan PPC dalam memberikan pengetahuan produk sesuai dengan ruang lingkupnya.
3. Kegiatan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, konsultasi, miniplant, inspeksi teknis, uji profisiensi, dan layanan jasa lainnya terkait pelaksanaan layanan teknis

4. Kegiatan administrasi keuangan, terkait pengelolaan keuangan penerimaan dan penggunaan PNB
5. Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran.

### 3) Kendala

Secara umum tidak terdapat kendala di tahun 2023 dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini ialah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara semua personel BBSPJIKKP dalam pelaksanaan kegiatan layanan jasa sehingga kegiatan dapat mencapai target. Namun beberapa peralatan penunjang layanan ada yang rusak dan membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan. Jejaring Kerjasama dan promosi layanan jasa teknis menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

### 4) Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya ialah kunjungan yang lebih intens ke industri-industri untuk mempromosikan kemampuan balai dan layanan berpotensi BBSPJIKKP untuk meningkatkan PNB, seperti LVV GRK dan bimtek, serta peningkatan kompetensi SDM di BBSPJIKKP agar kualitas pelayanan semakin meningkat.

#### **d. Indikator Kinerja III.4 : Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa**

**Definisi :** Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.

**Cara Perhitungan :** Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus:  $RP3DN = RAP3DN / TotAP3DN$



Ket:

RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri

RAP3DN = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.

Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati industr, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Data berasal dari aplikasi intranet / Online monitoring SPAN (OM SPAN)

### 1) Hasil yang telah dicapai

#### **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Berdasarkan Tabel 3.16, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa” adalah 78% dan tercapai 82,28% (102,85%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan. Persentase Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan Akun Terpilih ditunjukkan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27 Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri

No	Akun	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN
1	521111	1.164.509.000	1.097.863.240			98,51
2	521131					
3	521211	219.557.000	209.795.200			95,55
4	521219					
5	521241	-	-	-	-	
6	521811	534.268.000	307.847.615		213.318.985	57,62
7	521841	-	-	-	-	
8	522131	-	-	-	-	
9	522141	86.591.000	86.590.400			100,00
10	522191	850.397.000	831.713.800			97,80
11	522192					100,00

No	Akun	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN
		823.000	823.000			
12	524114	-	-	-	-	
13	524119	56.270.000	56.270.000			100,00
14	532111	1.003.455.000	105.236.333	525.900.000	372.318.667	62,90
15	533111	-		-		
<b>Jumlah</b>		<b>3,915,870,000</b>	<b>2.696.139.588</b>	<b>525,900,000</b>	<b>585,637,652</b>	<b>82,28</b>

## 2) Analisis yang telah dicapai

### Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perkembangan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa selama TA 2020-2023 (indikator ini baru ada di TA 2021) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28 Perbandingan capaian persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Tahun 2021 – 2023

Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023
Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	87,91%	86,82%	82,28%

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ada pada tahun 2021. Realisasi persentase nilai capaian P3DN dalam pengadaan barang dan jasa terus menurun selama tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran pada akun terpilih tahun 2021 hingga 2023 juga menurun.

### Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi

Rata-rata target untuk jangka menengah pada Renstra tahun 2021-2024 untuk indikator ini adalah 76,25%. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga

setelah adanya revisi pada renstra 2020-2024. Target pada tahun 2023 sebesar 78% atau 102,29% dari rata-rata target dalam Renstra. Pada tahun 2023, terdapat capaian 105,49% sehingga indikator kerja ini berhasil melebihi rata-rata target jangka menengah pada Renstra. Jika dihitung dari tahun 2021, maka rata-rata capaian indikator kinerja ini yaitu 107,91% telah jauh melebihi rata-rata target dalam Renstra. Diharapkan pada 2 tahun berikutnya, indikator ini dapat terus mencapai target, sehingga rata-rata target jangka menengah pada renstra BBSPJIKKP dapat tetap tercapai. Dalam RPJMN 2020-2024, terdapat target indikator Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) pada tahun 2021 sebesar 43,3% dan meningkat menjadi 50% pada tahun 2024. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri dapat dimulai dari anggaran belanja BBSPJIKKP yaitu melalui pengadaan barang/jasa pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah. Dengan adanya kebijakan terkait Penggunaan produk dalam negeri (P3DN) diharapkan dapat mendukung tercapainya target TKDN.

#### **Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

Keberhasilan kinerja ini disebabkan oleh ketelitian pihak pengadaan dalam memilih supplier yang diutamakan untuk supplier barang dan jasa produksi dalam negeri. Penelusuran informasi terkait produk-produk serta jasa dalam negeri dan pengendalian belanja pemerintah oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mendukung keberhasilan kinerja ini. Komunikasi antara tim pengadaan dengan bagian/bidang yang mengajukan pengadaan barang dan jasa juga mendukung keberhasilan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang diinginkan.

#### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya khususnya pada SDM pengadaan dan pemanfaatan waktu pengadaan barang dan jasa yang seefektif mungkin. Penggunaan media informasi untuk mencari supplier serta pengumuman lelang dapat mengefisienkan pelaksanaan pengadaan. Adanya katalog dari supplier maupun dari elektronik mengakibatkan lebih mudahnya pelaksanaan pengadaan.

### **Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1. Kegiatan pengadaan terkait pengadaan barang dan jasa
2. Kegiatan administrasi keuangan, terkait pengelolaan penggunaan anggaran untuk belanja
3. Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran

### **3) Kendala**

Masih banyaknya barang persediaan barang konsumsi, terutama bahan kimia, non kimia, dan alat gelas yang belum diproduksi di dalam negeri, sehingga mengharuskan pengadaan barang impor. Kendala ini masih sama dengan yang dialami di tahun 2021 dan 2022, karena hingga saat ini masih belum banyak produsen bahan kimia, non kimia dan alat gelas yang menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk pengujian.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi dan monev pelaksanaan anggaran telah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga realisasi anggaran terutama akun-akun yang digunakan sebagai perhitungan nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa tersebut dapat optimal.

### **4) Rekomendasi**

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah mengutamakan dan mencari informasi terkait nilai TKDN barang maupun jasa yang akan diadakan dari awal tahun anggaran sebelumnya sehingga memudahkan realisasi pengadaan barang dan jasa.

## 8. SASARAN KEGIATAN IV : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Tabel 3.29 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan IV

Sasaran Kegiatan IV	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 persen	100 persen	100%

Sasaran kegiatan IV ini dalam pengukuran ketercapaiannya memiliki indikator kinerja yaitu Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker. Indikator memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2023, ndust penjelasan capaian dari indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

### a. Indikator Kinerja IV.1 : Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

**Definisi** : Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

**Cara Perhitungan** : Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker di lingkungan BSKJI

## 1) Hasil yang telah dicapai

### **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Berdasarkan Tabel 3.29, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator “Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker” adalah 100% dan tercapai 100% (100%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Ikhtisar Hasil Audit BBSPJIKKP nomor R/31/IJ-IND/II/2023 tanggal 21 Februari 2023, terdiri dari 4 temuan terkait Program dan Pelaksanaan Kegiatan dan 8 temuan terkait Pengelolaan Anggaran dan BMN sebagai berikut:

- a. Program dan Kegiatan
  1. Terdapat kelemahan dalam pengendalian internal yaitu pengumpulan dan verifikasi data kinerja serta penyusunan laporan kinerja
  2. Terdapat kelemahan belum adanya prosedur atau tata cara pemilihan/rekrutmen atas kegiatan DAPATI
  3. Terdapat kelemahan dalam penyusunan peta risiko kegiatan
  4. Terdapat kelemahan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM)
- b. Pengelolaan Anggaran dan BMN
  1. Terdapat kelemahan pada bukti pertanggungjawaban keuangan BBSPJIKKP
  2. Terdapat kesalahan penggunaan akun
  3. Terdapat kelemahan pada pengelolaan barang persediaan
  4. Terdapat belanja persediaan (521811) pada KRO 6077.BAD yang secara kriteria masuk ke dalam asset ekstrakomptabel
  5. Pemeliharaan peralatan dan mesin yang belum seluruhnya dilengkapi dengan form list permintaan pemeliharaan mesin dan peralatan sesuai SOP
  6. Terdapat kelemahan pada standar dokumen pengadaan jasa konsultan (Jasa Konsultan Pembuatan Sistem Informasi BBKPP)
  7. Terdapat kelemahan pada standar dokumen pengadaan jasa lainnya (Jasa Event Organizer Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Pegawai oleh PT Little Bee)

8. Terdapat belanja pemeliharaan ruang pelatihan yang memenuhi kriteria aset tetap gedung dan bangunan serta penggantian gordyn ruang record center yang memenuhi kriteria aset tetap peralatan dan mesin

Semua dokumen tindak lanjut telah diserahkan kepada Itjen dengan bukti risalah pemutakhiran saldo data tindak lanjut hasil audit Itjen pada tanggal 5 Oktober 2023.

## 2) Analisis yang telah dicapai

### **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Perkembangan rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker selama TA 2020-2023 (indikator ini baru ada di TA 2021) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30. Perbandingan rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker 2020-2023

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi TA. 2020</b>	<b>Realisasi TA. 2021</b>	<b>Realisasi TA. 2022</b>	<b>Realisasi TA. 2023</b>
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas pencapaian target indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker selalu maksimal, dimana capaiannya setiap tahunnya selalu 100 persen, karena sudah menjadi komitmen dari pimpinan maupun manajemen untuk lebih komitmen dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

### **Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi**

Rata-rata target untuk jangka menengah pada Renstra tahun 2021-2024 untuk indikator ini adalah 95,88%. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga setelah adanya revisi pada renstra 2020-2024. Target pada tahun 2023 sebesar 100% atau 104,29% dari rata-rata target dalam Renstra. Pada tahun

2023, terdapat capaian 100% sehingga indikator kerja ini berhasil melebihi rata-rata target jangka menengah pada Renstra. Diharapkan pada tahun berikutnya, indikator ini dapat terus mencapai target.

#### **Perbandingan dengan Renstra BSKJI 2021-2024**

Dalam Renstra BSKJI, target indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2023 juga sebesar 92% dan meningkat menjadi 92,5% pada tahun 2024. Target indikator kinerja BBSPJIKKP mengikuti baseline pada renstra BSKJI sehingga pencapaian kinerja indikator ini dapat mendukung tercapainya renstra BSKJI yang merujuk pada renstra Kemenperin 2020-2024 dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan *good governance*.

#### **Perbandingan capaian pada satker Kemenperin lain dengan capaian realisasi BBSPJIKKP**

Target indikator kinerja ini pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) adalah 100 persen dan tercapai 100 persen. Terdapat 15 temuan pada indikator ini di BBSPJIKMN dan seluruh temuan telah ditindaklanjuti.

Bila dibandingkan dengan BBSPJIKMN, maka realisasi indikator ini pada BBSPJIKMN sama dengan BBSPJIKKP dimana realisasi indikator pada BBSPJIKKP adalah 100%.

#### **Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

Keberhasilan kinerja ini disebabkan oleh respon cepat dari pihak yang ditemukan ketidaksesuaian untuk memperbaiki temuan pada jangka waktu penyelesaian audit. Penetapan tindak lanjut juga diarahkan agar tidak terjadi temuan yang sama berulang kali pada pengawasan selanjutnya. Kerjasama dari seluruh pihak terkait menyebabkan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti. Selain itu, dengan dilakukan pengendalian internal seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), dapat mengurangi kemungkinan terjadinya temuan yang berulang dan dapat memberikan perbaikan yang berkelanjutan.



### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Adanya koordinasi dan monitoring dari koordinator masing-masing kegiatan di BBSPJIKKP dapat menunjang efisiensi penggunaan sumber daya dan kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pengendalian intern cukup rendah, karena sebagian besar dapat menggunakan sarana sistem informasi di BBSPJIKKP seperti Intranet BBSPJIKKP dan ALKI pada Intranet Kemenperin.

### **Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

1. Kegiatan penerapan SPIP dan PIPK terkait pengendalian intern pelaksanaan kegiatan di BBSPJIKKP
2. Kegiatan pengadaan terkait pengadaan barang dan jasa
3. Kegiatan administrasi keuangan, terkait pengelolaan anggaran/keuangan
4. Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran
5. Kegiatan Data dan Sistem Informasi sebagai sarana untuk pengembangan sistem informasi pemantauan kegiatan

### **3) Kendala**

Secara umum tidak terdapat kendala di tahun 2023 dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pemeriksaan bertingkat dan monitoring berkala sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan pelaporan kinerja dan ketidaktercapaian target kinerja.

### **4) Rekomendasi**

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah evaluasi berkala terhadap tindak lanjut perbaikan serta pelaksanaan penerapan SPIP yang lebih intens agar temuan tidak terjadi secara berulang. Komitmen dari seluruh pegawai dalam melakukan pengendalian intern sangat penting agar mengurangi ditemukannya ketidaksesuaian

## 9. SASARAN KEGIATAN V : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan

Tabel 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan V

Sasaran Kegiatan V	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,8	Indeks 3,849	101,29

Sasaran kegiatan V ini dalam pengukuran ketercapaiannya memiliki indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industry. Indikator memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2023, ndust penjelasan capaian dari indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

### a. Indikator Kinerja V.1 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industry

**Definisi :** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

**Cara Perhitungan :** Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, dan nilai indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik.

#### 1) Hasil yang telah dicapai

##### Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.31, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa

Industri” adalah 3,8 dan tercapai 3,849 (101,29%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Jumlah responden adalah 179 responden dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah responden dengan indeks 1 : -
- Jumlah responden dengan indeks 2 : 2 orang
- Jumlah responden dengan indeks 3 : 68 orang
- Jumlah responden dengan indeks 4 : 109 orang

Indeks tertinggi terdapat pada kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan dan kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan dengan nilai indeks 3.894. Indeks terendah terdapat pada kecepatan layanan dengan nilai indeks 3.765.

## 2) Analisis yang telah dicapai

### **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri selamaTA 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri Tahun 2017 – 2023

Indikator Kinerja V.1	Realisasi TA. 2017	Realisasi TA. 2018	Realisasi TA. 2019	Realisasi TA. 2020	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023
Indeks kepuasan masyarakat	indeks 3,41 (skala 4)	indeks 3,52 (skala 4)	indeks 3,61 (skala 4)	Indeks 3,659 (skala 4)	Indeks 3,82 (skala 4)	Indeks 3,846 (skala 4)	Indeks 3,849 (skala 4)

Berdasarkan Tabel 3.32, tingkat kepuasan pelanggan BBSPJIKKP dari tahun 2017 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 yaitu sebesar 3,849.

### **Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi**

Secara keseluruhan target akhir pada Renstra tahun 2021-2024 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa sebesar 3,85 Indeks. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga setelah adanya revisi pada renstra

2020-2024. Target pada tahun 2023 sebesar 3,8 Indeks atau 98,7% dari target dalam Renstra. Hingga tahun 2023, tercapai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan indeks 3,849 sehingga indikator kerja ini masih belum berhasil melebihi target jangka menengah pada Renstra. Jika dihitung dari tahun 2021, maka capaian indikator kinerja ini belum mencapai target dalam Renstra. Diharapkan pada tahun berikutnya, indikator ini dapat terus mencapai target, sehingga target jangka menengah pada renstra BBSPJIKKP dapat tetap tercapai.

#### **Perbandingan dengan Renstra BSKJI 2021-2024**

Dalam Renstra BSKJI, target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri pada tahun 2023 sebesar 3,6 dan tetap hingga tahun 2024. Target indikator kinerja BBSPJIKKP di tahun 2021 melebihi target pada renstra BSKJI. Evaluasi terhadap target kinerja sebaiknya dilakukan di tiap tahun, agar target yang ditetapkan dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisinya sehingga pencapaian kinerja indikator ini dapat mendukung tercapainya renstra BSKJI yang merujuk pada renstra Kemenperin 2020-2024 dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri.

#### **Perbandingan capaian pada satker Kemenperin lain dengan capaian realisasi BBSPJIKKP**

Target indikator kinerja ini pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) adalah indeks 3,61 dan tercapai indeks 3,76.

Bila dibandingkan dengan BBSPJIKMN, maka realisasi indikator ini pada BBSPJIKKP lebih besar daripada BBSPJIKMN dimana realisasi indikator pada BBSPJIKKP adalah indeks 3,849.

#### **Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

Keberhasilan kinerja ini disebabkan karena respon dan tanggapan yang cepat terhadap pelanggan dalam mendapatkan informasi serta waktu penyelesaian pengerjaan sampel dalam memenuhi Standar Pelayanan

Minimum (SPM). Adanya kaji ulang SPM di layanan pengujian sehingga SPM semakin berkurang dibandingkan tahun sebelumnya juga meningkatkan kepuasan pelanggan.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Kegiatan pemasaran yang diadakan secara online dengan beberapa kali pertemuan atau pun melalui media sosial BBSPJIKKP menyebabkan anggaran yang digunakan lebih kecil namun output kegiatan tercapai melebihi target. Dengan keterbatasan SDM yang terkait layanan publik serta sarana dan prasarana layanan publik, pelayanan jasa teknis tetap dapat dilaksanakan dan memenuhi kepuasan pelanggan. Fasilitas laboratorium serta SDM teknis yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan mengakibatkan efisiensi pada pelaksanaan kegiatan. Adanya SIL sebagai sistem informasi juga sangat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Berkurangnya SPM khususnya untuk di layanan pengujian juga dapat mengefisienkan waktu penyelesaian layanan.

### **Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

1. Kegiatan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pendampingan, miniplant, inspeksi, uji profisiensi, pemeriksa halal, konsultasi, dan layanan jasa lainnya terkait pelaksanaan layanan teknis
2. Kegiatan fasilitasi kemitraan layanan jasa, meliputi pemasaran, kerjasama dan pengembangan informasi terkait terpenuhinya layanan secara administratif kepada pelanggan
3. Kegiatan pengadaan terkait pemeliharaan peralatan uji dan kalibrasi serta pengadaan bahan dan alat pendukung layanan jasa industri
4. Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran
5. Kegiatan layanan humas terkait pelaksanaan promosi, seminar maupun temu pelanggan/diseminasi dalam rangka memasarkan jasa layanan teknis balai.

### 3) Kendala

Tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target. Pada tahun 2022 juga tidak terdapat kendala yang perlu ditindaklanjuti di tahun ini.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini ialah adanya evaluasi setiap tahun dari hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat tahun sebelumnya, sehingga unsur-unsur layanan yang masih dibawah nilai rata-rata pada tahun sebelumnya dilakukan perbaikan di tahun berjalan.

### 4) Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya ialah melakukan kontak yang intens dan lebih lanjut dengan pelanggan dan melakukan reviu terhadap hasil kuesioner selain itu juga menindaklanjuti keluhan dan saran dari pelanggan dengan lebih cepat.

## 10. SASARAN KEGIATAN VI: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional

Tabel 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis VI

Sasaran Kegiatan VI	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya ASN BSKJI yang profesional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks 78	Indeks 83,16	106,61%

Sasaran kegiatan VI ini dalam pengukuran ketercapaiannya memiliki beberapa indikator kinerja yaitu rata-rata indeks profesionalitas ASN, dan Nilai disiplin pegawai. Indikator- indikator ini memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2023, ndust penjelasan capaian dari indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

#### a. Indikator Kinerja VI.1 : Rata-rata indeks profesionalitas ASN

**Definisi :** Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk

mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

**Cara Perhitungan** : Menghitung rata-rata indeks profesionalitas ASN di BBSPJIKKP, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019

### 1) Hasil yang dicapai

#### **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Berdasarkan Tabel 3.33, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator “Rata-rata indeks profesionalitas ASN” adalah 78 dan tercapai indeks 83,16 (106,61%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Nilai indeks profesionalitas ASN tahun 2023 sebesar 83,16 merupakan penilaian IP ASN per 19 Desember 2023 yang diambil datanya 30 Januari 2024 pada aplikasi intranet.

Pada tahun 2023 telah dilakukan 78 kegiatan peningkatan kompetensi berupa pelatihan, bimtek, workshop, in house training, seminar, sosialisasi dan magang internal. Selama tahun 2023, jumlah SDM yang telah mendapatkan kegiatan peningkatan kompetensi SDM yaitu sebanyak 107 pegawai termasuk pegawai yang sedang ditugaskan belajar, dan diantaranya 65 pegawai telah mendapatkan kegiatan peningkatan kompetensi SDM minimal 20 JPL. Perhitungan terhadap indeks IPA dilakukan dengan tidak memasukkan pegawai CPNS, terhadap unsur yang terdiri atas Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin, didapatkan capaian Indeks Profesionalitas ASN sebesar indeks 83,16 dengan rincian unsur Kualifikasi Pendidikan sebesar 21,87; Kompetensi sebesar 31,47; Kinerja sebesar 24,82; dan Disiplin sebesar 5,00. Sedangkan perhitungan indeks IP ASN TA 2022 sebesar 76,32 dengan rincian unsur Kualifikasi Pendidikan sebesar 15,49; Kompetensi sebesar 32,31; Kinerja sebesar 23,52; dan Disiplin sebesar 5,00.

## 2) Analisis yang telah dicapai

### **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Perkembangan rata-rata indeks profesionalitas ASN (IPA) selama TA 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34 Perbandingan capaian rata-rata Indeks Profesionalitas ASN  
Tahun 2020 – 2023

<b>Indikator Kinerja VI.1</b>	<b>Realisasi TA. 2020</b>	<b>Realisasi TA. 2021</b>	<b>Realisasi TA. 2022</b>	<b>Realisasi TA. 2023</b>
Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks 61	Indeks 68	Indeks 76,32	Indeks 83,16

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan 52 kegiatan peningkatan kompetensi namun hanya 44 pegawai (42,31%) telah mendapatkan minimal 20 JP kegiatan peningkatan kompetensi SDM. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan 67 kegiatan peningkatan kompetensi namun hanya 40 pegawai (42,10%) telah mendapatkan minimal 20 JP kegiatan peningkatan kompetensi SDM. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan 79 kegiatan peningkatan kompetensi namun hanya 64 pegawai (59,26%) telah mendapatkan minimal 20 JP kegiatan peningkatan kompetensi SDM. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 78 kegiatan peningkatan kompetensi namun hanya 65 pegawai (60,75%) telah mendapatkan minimal 20 JP kegiatan peningkatan kompetensi SDM. Indeks profesionalitas ASN BBSPJIKKP selama tahun 2020 hingga tahun 2024, angkanya selalu meningkat. Hal ini disebabkan karena pegawai BBSPJIKKP berusaha untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan dan meng-upload sertifikat kompetensi ke dalam sistem aplikasi intranet.

### **Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi**

Secara keseluruhan rata-rata target jangka menengah pada Renstra tahun 2021-2024 adalah 77,25. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga setelah adanya revisi pada renstra 2020- 2024. Target pada tahun 2023



sebesar 100,97% dari rata-rata target dalam Renstra. Hingga tahun 2023, terdapat capaian indeks 83,16 sehingga indikator kerja ini berhasil mencapai 107,65% dari total target jangka menengah pada Renstra. Diharapkan pada tahun berikutnya, indikator ini dapat terus mencapai target, sehingga total target jangka menengah pada renstra BBSPJIKKP dapat tercapai.

#### **Perbandingan dengan Renstra BSKJI 2021-2024**

Dalam Renstra BSKJI, indikator ini ditargetkan memiliki indeks sebesar 71 pada tahun 2023 dan tetap indeks 71 pada tahun 2024. Target indikator kinerja BBSPJIKKP di tahun 2023 melebihi target pada renstra BSKJI. Evaluasi terhadap target kinerja sebaiknya dilakukan di tiap tahun, agar target yang ditetapkan dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisinya sehingga pencapaian kinerja indikator ini dapat mendukung tercapainya renstra BSKJI yang merujuk pada renstra Kemenperin 2020-2024 dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan good governance.

#### **Perbandingan capaian pada satker Kemenperin lain dengan capaian realisasi BBSPJIKKP**

Target indikator kinerja ini pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) adalah indeks 76 dan tercapai indeks 86,19.

Bila dibandingkan dengan BBSPJIKMN, maka realisasi indikator ini pada BBSPJIKMN lebih besar daripada BBSPJIKKP dimana realisasi indikator pada BBSPJIKKP adalah indeks 83,16.

#### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**

Adanya beberapa diklat fungsional maupun teknis sesuai jabatannya yang tidak sempat dilakukan, namun BBSPJIKKP bukanlah unit yang menyelenggarakan diklat tersebut, sehingga keikutsertaan sangat tergantung pada faktor eksternal seperti keterbatasan jumlah peserta. Namun demikian, indikator ini berhasil mencapai target karena adanya monitoring secara berkala mengenai kebutuhan peningkatan

kompetensi pegawai melalui rapat monev maupun dengan bantuan sistem informasi kepegawaian. Pelaksanaan pelatihan secara online juga memudahkan semakin banyaknya SDM yang mengikuti pelatihan.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Semakin banyaknya pelatihan yang diselenggarakan secara online sehingga mengurangi anggaran yang dibutuhkan. Penggunaan fasilitas internet dan aplikasi zoom sangat membantu terlaksananya kegiatan ini. Namun adanya kebutuhan pelatihan yang semakin meningkat terkait banyaknya perpindahan jabatan maupun akan dilakukannya layanan baru di BBSPJIKKP yang menuntut adanya kompetensi yang sesuai sehingga anggaran untuk pelatihan dengan penyelenggara eksternal menjadi terbatas. Keterbatasan SDM di BBSPJIKKP juga menyebabkan sulitnya pengaturan waktu terutama untuk diklat berdurasi waktu panjang.

### **Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

1. Kegiatan pengembangan informasi terkait tersedianya sarana informasi serta fasilitas internet untuk pelatihan yang diadakan secara online
2. Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran

### **3) Kendala**

Tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target. Pada tahun 2022 juga tidak terdapat kendala yang perlu ditindaklanjuti di tahun ini.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan masih memenuhi target meskipun masih belum seluruh pegawai menerima peningkatan kompetensi diatas 20 JPL. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara kontinu agar seluruh pegawai mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.

#### 4) Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya ialah melakukan penyesuaian kebutuhan, mencari alternatif pelatihan, mencari informasi penyelenggaraan dan pemanggilan peserta, serta pengembangan Sistem Informasi Kompetensi Pegawai sehingga mempermudah pemantauan kegiatan peningkatan kompetensi setiap personel.

### 11. SASARAN KEGIATAN VII: Penguatan Layanan Publik

Tabel 3.35 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan VII

Sasaran Kegiatan VII	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Penguatan layanan publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks 3,6	Indeks 3,9	108,33

Sasaran kegiatan VII ini dalam pengukuran ketercapaiannya memiliki indikator kinerja yaitu nilai minimal indeks layanan publik, Indikator ini memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2023, adapun penjelasan capaian dari indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

#### a. Indikator Kinerja VII.1 : Nilai minimal indeks layanan publik

**Definisi** : Dalam peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023, terdapat Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**Cara Perhitungan** : Menghitung nilai indeks layanan publik BBSPJIKKP mengikuti Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

### 1) Hasil yang telah dicapai

#### Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.35, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator “Nilai minimal indeks layanan publik” adalah indeks 3,6 dan tercapai indeks 3,9 (108,33%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan self asesment indeks minimal layanan publik dengan indeks 3,9. Nilai self asesment indeks layanan publik adalah indeks 3,9 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.36 Nilai Self Asesment Indeks Layanan Publik

No	Aspek	Indeks Aspek	Bobot Aspek	Indeks Layanan Publik
1	Kebijakan Pelayanan	4,22	24%	1,01
2	Profesionalisme SDM	3,60	25%	0,90
3	Sarana dan Prasarana	4,50	18%	0,81
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	3,75	11%	0,41
5	Konsultasi dan Pengaduan	3,50	10%	0,35
6	Inovasi	3,50	12%	0,42
<b>Nilai Self Asesmen Indeks Pelayanan Publik</b>				<b>3,90</b>

Nilai Indeks Pelayanan Publik BBSPJIKKP mendapatkan Indeks 3,90 dimana termasuk kedalam Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Range Nilai 3,51 – 4,00 yaitu kategori B dengan kategori Baik sesuai kategori yang ditunjukkan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.37. Kategori penilaian indeks pelayanan publik

Range Nilai		Kategori	Makna
0 – 1,00	1	F	Gagal
1,01 – 1,50	1,01	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	1,51	D	Buruk
2,01 – 2,50	2,01	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	2,51	C	Cukup
3,01 – 3,50	3,01	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	3,51	B	Baik
4,01 – 4,50	4,01	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	4,51	A	Pelayanan Prima

## 2) Analisis yang telah dicapai

### Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perkembangan nilai minimal indeks layanan publik selama TA 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.38 Perbandingan capaian indeks minimal layanan publik tahun 2021-2023

Indikator Kinerja VII	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023
Nilai minimal Indeks layanan publik	Indeks 3,25 (Nilai B-)	Indeks 3,69 (Nilai B)	Indeks 3,9 (Nilai B)

Perhitungan indeks pelayanan publik yang dilaporkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 berdasarkan standar pelayanan dan budaya pelayanan prima pada penilaian Zona Integritas. Data indeks sarana prasarana layanan publik bersumber dari Penilaian Mandiri dalam Intranew PMPZI online. Dasar perhitungan di tahun 2020 ini tidak digunakan di tahun 2021. Dimulai dari tahun 2021, perhitungan dilakukan secara self assessment mengikuti Permenpan RB No.17 Tahun 2017. Kemudian pada tahun 2022 terdapat perubahan peraturan untuk penilaian evaluasi layanan publik yaitu berdasarkan Permenpan RB No.29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Secara keseluruhan, BBSPJIKKP mengalami peningkatan indeks pelayanan publik dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Nilai Indeks Pelayanan Publik BBSPJIKKP pada tahun 2023 ialah sebesar 3,90 yang termasuk ke kategori B dengan Kategori Baik. Indeks layanan publik pada tahun 2021 adalah 3,25 (B-) dan

indeks layanan publik pada tahun 2022 tetap adalah indeks 3,69 (B) dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan dalam nilai indeks pelayanan publik, yaitu dari 3,69 menjadi 3,9.

### **Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi**

Secara keseluruhan target akhir pada Renstra tahun 2021-2024 Nilai Minimal Indeks Layanan Publik adalah Indeks 3,7. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga setelah adanya revisi pada renstra 2020-2024. Target pada tahun 2023 adalah dengan Indeks 3,6 atau 97,29% dari target akhir dalam Renstra. Pada tahun 2023, tercapai Nilai Minimal Indeks Layanan Publik dengan indeks 3,9 (nilai B) sehingga indikator kerja ini berhasil melebihi target jangka menengah pada Renstra. Jika dihitung dari tahun 2021, maka capaian indikator kinerja ini telah melebihi target dalam Renstra. Diharapkan pada tahun berikutnya, indikator ini dapat terus mencapai target, sehingga target jangka menengah pada renstra BBSPJIKKP dapat tetap tercapai

### **Perbandingan dengan Renstra BSKJI 2021-2024 dan RPJMN 2020-2024**

Dalam Renstra BSKJI, satker yang memperoleh Indeks layanan industri minimal B ditargetkan sebanyak 45% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 60% pada tahun 2024. BBSPJIKKP berhasil mencapai nilai indeks layanan publik minimal B sehingga pencapaian kinerja indikator ini diharapkan dapat mendukung tercapainya renstra BSKJI yang merujuk pada renstra Kemenperin 2020-2024 dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan *good governance*. Selain itu, pencapaian indikator ini akan mendukung pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dalam RPJMN 2020-2024 dengan target indikator Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (IP) pada tahun 2024 sebanyak 164 per 623 IP.

**Perbandingan capaian pada satker Kemenperin lain dengan capaian realisasi BBSPJIKKP**

Target indikator kinerja ini pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) adalah indeks 3,6 dan tercapai indeks 4,74.

Bila dibandingkan dengan BBSPJIKMN, maka realisasi indikator ini pada BBSPJIKMN lebih besar daripada BBSPJIKKP dimana realisasi indikator pada BBSPJIKKP adalah indeks 3,9.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**

Keberhasilan kinerja ini karena nilai yang cukup tinggi dalam aspek profesionalisme SDM yaitu kompetensi SDM pelayan publik yang berkualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan publik. Namun demikian, masih rendahnya nilai sistem informasi pelayanan publik disebabkan proses integrasi layanan masih dalam proses penyempurnaan. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan inovasi layanan publik serta peningkatan dalam layanan konsultasi dan dalam menjawab pengaduan. Nilai pelayanan publik ini meningkat sebanding dengan peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Adanya peningkatan PNBPN di tahun 2023 yang melebihi target dan realisasi anggaran terhadap yang hampir tercapai 100%, menunjukkan perencanaan dapat terlaksana sesuai dengan target. Selain itu, kompetensi tim pengadaan yang mampu mengadakan peralatan dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kegiatan layanan publik sehingga dapat terlaksana dengan memuaskan. Beberapa kegiatan penyempurnaan sistem informasi layanan publik terhambat karena keterbatasan SDM IT serta semakin luasnya jasa layanan yang diberikan BBSPJIKKP.

## **Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian**

### **Kinerja**

1. Kegiatan penerapan zona integritas terkait tercapainya reformasi birokrasi
2. Kegiatan pengadaan terkait pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana layanan publik
3. Kegiatan pengembangan informasi terkait tersedianya sistem informasi layanan publik
4. Kegiatan fasilitasi kemitraan layanan jasa, meliputi kegiatan pelayanan publik

### **3) Kendala**

Tidak ada kendala yang signifikan dalam mencapai target. Kendala pada tahun 2022 akibat adanya keterbatasan anggaran karena PNBPN tidak tercapai telah ditindaklanjuti di tahun 2023 karena target PNBPN pada tahun 2022 ini telah melebihi target.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya peningkatan layanan publik khususnya pada profesionalisme SDM dan inovasi layanan publik. Adanya peningkatan PNBPN di tahun 2023 ini menyebabkan beberapa penambahan sarana dan prasarana dapat terpenuhi sehingga nilai pelayanan dapat meningkat.

### **4) Rekomendasi**

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah melakukan revisi untuk rencana aksi pengadaan sarana dan prasarana layanan publik sesuai dengan roadmap serta meningkatkan profesionalisme SDM dan industri inovasi layanan publik yang akan dilakukan di tahun 2024.



## 12. SASARAN KEGIATAN VIII: Penguatan Akuntabilitas Organisasi

Tabel 3.39 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan VIII

Sasaran Kegiatan VIII	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Penguatan akuntabilitas organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai 77	Nilai 77,25	100,32
	Nilai minimal Laporan Keuangan	Nilai 91	Nilai 97	106,59

Sasaran kegiatan VIII ini dalam pengukuran ketercapaiannya memiliki beberapa indikator kinerja yaitu nilai minimal akuntabilitas kinerja, dan nilai minimal laporan keuangan, Indikator ini memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2023, adapun penjelasan capaian dari indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

### a. Indikator Kinerja VIII.1 : Nilai minimal akuntabilitas kinerja

**Definisi** : Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

**Cara Perhitungan** : Mencatat nilai SAKIP BBSPJIKKP yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang

## 1) Hasil yang telah dicapai

### **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator “Nilai minimal akuntabilitas kinerja” adalah 77 dan tercapai 77,25 (100,32%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Penilaian SAKIP TA. 2022 BBSPJIKKP oleh Inspektorat Jenderal III dilaksanakan pada bulan April Tahun 2023 secara online. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai, mulai dari 0 s.d. 100 berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. Pada tahun 2023, BBSPJIKKP memperoleh nilai sebesar 77 dengan rincian penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja sebesar 23,70; pengukuran kinerja sebesar 23,10; pelaporan kinerja sebesar 12,45; dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebesar 18,00. Hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART dan 6 (enam) indikator kinerja belum menantang pada tahun 2022,
- b. Belum terdapat mekanisme reward dan punishment dalam mencapai kinerja yang ditetapkan secara formal
- c. Belum seluruhnya tindak lanjut atas LHE dilaksanakan sesuai rekomendasi

## 2) Analisis yang telah dicapai

### **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Perkembangan nilai minimal akuntabilitas kinerja selama TA 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.40 Perbandingan capaian nilai minimal akuntabilitas kinerja Tahun 2020 – 2023

<b>Indikator Kinerja VIII.1</b>	<b>Realisasi TA. 2020</b>	<b>Realisasi TA. 2021</b>	<b>Realisasi TA. 2022</b>	<b>Realisasi TA. 2023</b>
Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai 80,2	Nilai 85,41	Nilai 81,65	Nilai 77,25

Pada tahun 2020-2021, terjadi peningkatan nilai yang signifikan. Namun pada tahun 2021-2023 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Penilaian SAKIP pada tahun 2018-2021 menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Pada tahun 2022, dilakukan penilaian SAKIP yang mengacu pada Peraturan MenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana perubahan acuan peraturan penilaian SAKIP tersebut mengakibatkan adanya perbedaan komponen penilaian dibandingkan dengan penilaian pendahulunya, sehingga nilai SAKIP di tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, BBSPJIKKP memperoleh nilai sebesar 81,65 dengan rincian penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja sebesar 22,20; pengukuran kinerja sebesar 24,00; pelaporan kinerja sebesar 13,20; dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebesar 22,25. Perbandingan capaian nilai akuntabilitas kinerja untuk seluruh satker di lingkungan BSKJI dapat dilihat pada Tabel 3.41

Tabel 3.41 Perbandingan capaian nilai akuntabilitas kinerja satker di lingkungan BSKJI

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total Nilai	Kategori
<b>A. BBSPJI</b>							
1	BBSPJIKFK	25,80	26,10	11,70	18,00	81,60	A
2	BBSPJIT	23,10	22,5	12,45	18,00	76,05	BB
3	BBSPJIBBT	23,10	26,40	12,45	18,00	79,95	BB
4	BBSPJIS	23,70	24,90	12,45	18,00	79,05	BB
5	BBSPJIA	23,10	26,40	10,95	18,00	78,45	BB
6	BBSPJIPPI	23,10	24,00	12,00	18,00	77,10	BB
7	BBSPJIKKP	23,70	23,10	12,45	18,00	77,25	BB
8	BBSPJIKB	23,70	25,50	12,45	18,00	79,65	BB
9	BBSPJIHPMM	23,70	23,40	12,00	18,00	77,10	BB
10	BBSJIKMN	24,30	23,70	12,45	18,00	78,45	BB
11	BBSPJILM	23,10	24,00	12,00	18,00	77,10	BB
<b>B. BSPJI</b>							

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Total Nilai	Kategori
1	Banjarbaru	23,10	25,50	12,30	18,00	78,90	BB
2	Pontianak	23,10	24,00	12,00	18,00	77,10	BB
3	Medan	23,10	24,00	12,00	18,00	77,10	BB
4	Pekanbaru	23,10	23,10	11,55	18,00	75,15	BB
5	Manado	23,70	24,60	12,00	18,00	76,80	BB
6	Surabaya	23,70	24,60	12,75	18,00	79,05	BB
7	Lampung	23,10	23,10	12,00	18,00	77,70	BB
8	Padang	23,70	22,50	11,25	18,00	74,80	BB
9	Samarinda	23,10	23,70	12,75	18,00	76,35	BB
10	Aceh	24,30	24,00	11,55	18,00	77,55	BB
11	Ambon	21,60	24,00	10,35	18,00	73,95	BB
12	Jakarta	22,20	24,60	12,00	18,00	76,80	BB
13	Palembang	23,70	23,10	12,00	18,00	76,80	BB
<b>C. Pusat</b>							
1	Sekretariat BSKJI	23,70	22,20	12,00	18,00	75,90	BB
2	Pusat OPTIKJI	22,50	22,20	11,55	19,25	75,50	BB
3	PIH	22,50	19,50	12,00	18,00	72,00	BB
4	P2SI	19,50	20,10	9,75	15,50	64,85	B
5	P4SI	20,10	16,80	9,75	15,50	62,15	B

Berdasarkan Tabel 3.41, hanya 1 (satu) satker termasuk ke dalam kategori A, 26 satker termasuk ke dalam kategori BB dan 2 satker termasuk ke dalam kategori B. BBSPJIKKP mendapatkan nilai SAKIP di atas rata-rata dari seluruh satker di lingkungan BSKJI dengan rata-rata nilai keseluruhan satker di lingkungan BSKJI sebesar 76,21.

### **Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi**

Secara keseluruhan target akhir pada Renstra tahun 2021-2024 adalah nilai minimal akuntabilitas kinerja sebesar 80,1. Tahun 2023 merupakan tahun kedua setelah adanya revisi pada renstra 2020-2024. Target pada tahun 2023 sebesar 96,13% dari target dalam Renstra. Pada tahun 2023, tercapai nilai minimal akuntabilitas kinerja sebesar 77,25 sehingga indikator kerja ini belum berhasil melebihi target jangka

menengah pada Renstra. Jika dihitung dari tahun 2021, maka rata-rata capaian indikator kinerja ini belum mencapai target dalam Renstra. Diharapkan pada tahun berikutnya, indikator ini dapat terus mencapai target, sehingga target jangka menengah pada renstra BBSPJIKKP dapat tetap tercapai.

#### **Perbandingan dengan Renstra BSKJI 2021-2024 dan RJMN 2020-2024**

Dalam Renstra BSKJI, nilai SAKIP BSKJI ditargetkan 73,8 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 74 pada tahun 2024. BBSPJIKKP berhasil mencapai nilai minimal akuntabilitas kinerja 77 sehingga pencapaian kinerja indikator ini diharapkan dapat mendukung tercapainya renstra BSKJI yang merujuk pada renstra Kemenperin 2020-2024 dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan good governance. Selain itu, pencapaian indikator ini akan mendukung pencapaian sasaran Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam RPJMN 2020-2024, dengan target indikator Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP pada tahun 2024 sebanyak 100%.

#### **Perbandingan capaian pada satker Kemenperin lain dengan capaian realisasi BBSPJIKKP**

Target indikator kinerja ini pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) adalah nilai 77 dan tercapai nilai 78,45.

Bila dibandingkan dengan BBSPJIKMN, maka realisasi indikator ini pada BBSPJIKMN lebih besar daripada BBSPJIKKP dimana realisasi indikator pada BBSPJIKKP adalah nilai 77,25.

#### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**

Penyebab keberhasilan kinerja ini ialah tercapainya seluruh sasaran kinerja serta dilakukannya evaluasi dan pelaporan kinerja yang baik. Adanya koordinasi antara tim perencanaan, program, evaluasi dan pelaporan serta seluruh koordinator kegiatan dan pencapaian sasaran

kinerja mendukung keberhasilan tercapainya nilai akuntabilitas. Selain itu dengan dilakukannya evaluasi terhadap rencana strategis, rencana kinerja dan rencana kerja menyebabkan target kinerja dapat tercapai. Dengan adanya perencanaan kinerja yang baik dalam rencana strategis, rencana kinerja dan rencana kerja, pengukuran kinerja selama tahun anggaran berlangsung melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan, pelaporan kinerja di akhir tahun serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal akan capaian kinerja balai maka penilaian SAKIP BBSPJIKKP dapat mencapai target.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sebagian besar kegiatan penelaahan anggaran, monitoring dan evaluasi masih dilakukan secara online, sehingga mengurangi anggaran perjalanan dinas. Keterbatasan kompetensi SDM dalam perencanaan, program, evaluasi dan pelaporan dapat diatasi dengan adanya bimtek yang dilakukan secara online. Beberapa anggaran dilakukan revisi untuk mengoptimalkan kinerja balai. Penggunaan sistem intranet dan penyimpanan data dalam drive juga mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan ini.

### **Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

1. Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran
2. Kegiatan keuangan terkait terlaksananya akuntabilitas keuangan.
3. Kegiatan layanan kearsipan terkait pengaturan arsip dan dokumen internal BBSPJIKKP

### **3) Kendala**

Masih terdapat 5 (lima) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti di tahun anggaran 2024 ini. Penyebab menurunnya nilai SAKIP dari tahun 2021 hingga tahun 2024 karena aturan yang telah berubah dan masih kurangnya bukti dukung yang dapat dipenuhi pada saat penilaian SAKIP.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memperkuat monitoring evaluasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap kegiatan pada tahun berjalan.

#### **4) Rekomendasi**

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan ketua tim untuk tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam internal timnya sehingga semua kegiatan dapat berjalan dan mencapai target kinerja serta melakukan reuiu terhadap dokumen laporan kinerja sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya.

#### **b. Indikator Kinerja VIII.2 Nilai minimal laporan keuangan**

**Definisi** : Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.

**Cara Perhitungan** : Mencatat hasil penilaian Laporan Keuangan Satker oleh Biro Keuangan

## 1) Hasil yang telah dicapai

### **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2023 untuk indikator “Nilai minimal laporan keuangan” adalah 91 dan tercapai nilai 97 (106,59%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Workshop penilaian laporan keuangan TA 2022 dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023. Kriteria penilaian keuangan berdasarkan PMK No. 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Penilaian Laporan Keuangan tersebut ialah nilai laporan keuangan BBSPJIKKP sebesar 97. Pencapaian nilai keuangan ini dikarenakan penyelenggaraan akuntansi di BBSPJIKKP telah disusun dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pencatatan dan pembukuan telah dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS), seluruh transaksi telah dicatat sesuai prosedur dan tepat waktu, rekonsiliasi dengan KPPN telah dilakukan setiap bulan, penyusunan Laporan Keuangan telah mengacu pada PMK 222 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga dan Laporan BMN mengacu pada PMK 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, serta penyusunan/ pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara BBSPJIKKP pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2) Analisis yang telah dicapai

### **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Perkembangan nilai laporan keuangan selama TA 2020-2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.42 Perbandingan capaian nilai laporan keuangan Tahun 2020 – 2023

Indikator Kinerja VIII.2	Realisasi TA. 2020	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023
Nilai laporan keuangan	Nilai 96	Nilai 90,55	Nilai 98,25	Nilai 97

Pada tahun 2022, nilai laporan keuangan sebesar 98,25. Pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai keuangan karena penyesuaian dengan aturan terbaru mengenai penyusunan laporan keuangan. Namun demikian target sasaran kinerja untuk indikator ini pada tahun 2023 tercapai. Penyusunan/ pembuatan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara BBSPJIKKP pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbandingan capaian nilai laporan keuangan untuk seluruh satker di lingkungan BSKJI dapat dilihat pada Tabel 3.43.

Tabel 3.43 Perbandingan capaian nilai laporan keuangan satker di lingkungan BSKJI

No	Satuan Kerja	Nilai laporan keuangan
1	BBSPJILM	99,40
2	BBSPJIKB	98,90
3	BSPJI Surabaya	98,75
4	BBSPJIBBT	98,25
5	BSPJI Ambon	98,00
6	BSPJI Pontianak	98,00
7	BBSPJIPPI	98,00
8	BSPJI Palembang	98,00
9	BSPJI Banjarbaru	97,25
10	BSPJI Manado	97,00
11	BBSPJIKKP	97,00
12	BBSPJIKMN	96,00
13	BBSPJIA	95,00
14	BSPJI Samarinda	95,00
15	BBSPJIT	94,50
16	BBSPJIKFK	94,50
17	BSPJI Aceh	94,75
18	BSPJI Jakarta	93,40
19	BBSPJIHPMM	92,00
20	BSPJI Medan	91,50
21	BSPJI Pekanbaru	90,75
22	BBSPJIS	91,00
23	BSPJI Lampung	88,00
24	BSPJI Padang	88,00

Berdasarkan Tabel 3.43, BBSPJIKKP termasuk peringkat ke-11 dari seluruh BBSPJI dan BSPJI di lingkungan BSKJI. Nilai laporan keuangan BBSPJIKKP di tahun 2023 (97,00) memiliki nilai di atas nilai rata-rata keseluruhan BBSPJI dan BSPJI di lingkungan BSKJI (95,12).

#### **Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi**

Secara keseluruhan target akhir pada Renstra tahun 2021-2024 adalah nilai minimal laporan keuangan sebesar 92. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga setelah adanya revisi pada renstra 2020-2024. Target pada tahun 2023 sebesar 98,91% dari target dalam Renstra. Pada tahun 2023, tercapai nilai minimal laporan keuangan sebesar 97 sehingga indikator kerja ini berhasil melebihi target jangka menengah pada Renstra. Jika dihitung dari tahun 2021, maka rata-rata capaian indikator kinerja ini telah melebihi target dalam Renstra. Diharapkan pada tahun berikutnya, indikator ini dapat terus mencapai target, sehingga target jangka menengah pada renstra BBSPJIKKP dapat tetap tercapai.

#### **Perbandingan dengan Renstra BSKJI 2021-2024 dan RPJMN 2020-2024**

Dalam Renstra BSKJI, nilai minimal laporan keuangan BSKJI ditargetkan nilai 90 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 90,5 pada tahun 2024. BBSPJIKKP pada tahun 2022 telah berhasil mencapai nilai minimal keuangan sebesar 97 sehingga pencapaian kinerja indikator ini diharapkan dapat mendukung tercapainya renstra BSKJI yang merujuk pada renstra Kemenperin 2020-2024 dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan good governance. Selain itu, pencapaian indikator ini akan mendukung pencapaian sasaran Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam RPJMN 2020-2024.

### **Perbandingan capaian pada satker Kemenperin lain dengan capaian realisasi BBSPJIKKP**

Target indikator kinerja ini pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) adalah nilai 91 dan tercapai nilai 96.

Bila dibandingkan dengan BBSPJIKMN, maka realisasi indikator ini pada BBSPJIKKP lebih besar daripada BBSPJIKMN dimana realisasi indikator pada BBSPJIKKP adalah indeks 97.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

Penyebab keberhasilan kinerja ini ialah penyelenggaraan akuntansi BBSPJIKKP telah disusun dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pencatatan dan pembukuan telah dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS), seluruh transaksi telah dicatat sesuai prosedur dan tepat waktu serta dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN telah dilakukan setiap bulan, serta penyusunan Laporan Keuangan telah mengacu pada peraturan yang berlaku. Adanya koordinasi antara tim keuangan serta seluruh koordinator kegiatan juga mendukung keberhasilan tercapainya nilai minimal laporan keuangan.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan anggaran untuk kegiatan pelaporan keuangan cukup baik dengan realisasi penyerapan anggaran hampir mencapai 100%. SDM yang melaksanakan kegiatan pelaporan keuangan juga merupakan SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

### **Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

1. Kegiatan administrasi keuangan terkait rekonsiliasi realisasi anggaran dan pelaporan keuangan
2. Kegiatan pelaporan BMN

**3) Kendala**

Tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target. Pada tahun 2022 juga tidak terdapat kendala yang perlu ditindaklanjuti di tahun ini.

Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini ialah pentingnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam penyusunan laporan keuangan.

**4) Rekomendasi**

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah memastikan evaluasi bertingkat dari atasan tetap dilakukan sehingga dapat mengurangi kesalahan (human error). Selain itu juga perlu dilakukan monitoring berkala terhadap laporan keuangan.

**3.1.2. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra BBSPJIKKP TA. 2021 – 2024**

Berdasarkan Hasil Reviu Rencana Strategis BBSPJIKKP TA 2021-2024, capaian kinerja yang dapat terealisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.44  
Capaian Kinerja Renstra BBSPJIKKP TA. 2021-2024

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2021			2022			2023			2024	TOTAL 2021-2024		
	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Target Renstra Sampai 2024	Realisasi sd 2023	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>													
- <i>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (persen)</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	66.025	1100,42%	7	6.5	66.025	1015,77%
<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>													
- <i>Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	100.00%	2	4	2	50%
- <i>Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri.</i>	2	2	100	3	3	100	2	2	100.00%	3	10	7	70%
<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>													
- <i>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi (persen)</i>	N/A	N/A	N/A	5	61.12	1222.40	6	45.84	764.00%	7	6	45.84	764.00%
- <i>Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri (persen)</i>	5	29.83	596.60	5	11.47	229.40	20	41.79	208.95%	23	13.25	41.79	315.40%
- <i>Meningkatnya hasil jumlah layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan (persen)</i>							5	48.91	978.20%	7	6	48.91	815.17%
- <i>Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (persen)</i>	72	87.91	122.10	75	86.82	115.76	78	82.28	105.49%	80	76.25	82.28	107.91%
<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>													

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		2021			2022			2023			2024	TOTAL 2021-2024		
		Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Target Renstra Sampai 2024	Realisasi sd 2023	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (persen)	91.5	100	109.29	92	100.0	108.70	100	100	100.00%	100	95.88	100	104.30%
<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>														
-	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri (indeks)	3.70	3.82	103.24	3.75	3.846	102.56	3.80	3.849	101.29%	3.85	3.85	3.849	99.97%
<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>														
-	Rata-rata indeks profesionalitas ASN (indeks)	74	68	91.89	76	76.32	100.42	78	83.16	106.62%	81	77.25	83.16	107.65%
<b>Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik</b>														
-	Nilai minimal indeks layanan ndust (indeks)	3.01	3.25	108	3.51	3.69	105.13	3.60	3.90	108.33%	3.70	3.7	3.90	105.41%
<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>														
-	Nilai minimal akuntabilitas kinerja (nilai)	82	85.41	104.16	82.30	81.65	99.21	77	77.25	100.32%	80.10	80.10	77.25	96.44%
-	Nilai minimal laporan keuangan (nilai)	90	90.55	100.61	90	98.25	109.17	91	97	106.59%	92	92	97	105.43%

## 1) Hasil yang telah dicapai

Pada umumnya target tahun berjalan sesuai dengan target yang ada pada Renstra, hal itu disebabkan kerja sama yang baik dari berbagai pihak yang berkepentingan, adanya komunikasi yang efektif dari atasan kepada bawahan dan sebaliknya, serta karena adanya perencanaan untuk setiap indikator sasaran. Selama kurun waktu satu tahun ini bila dibandingkan dengan target jangka menengah, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target pada tahun TA. 2023, yaitu:

- a) Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (1100,42%)
- b) Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi (764%)
- c) Meningkatnya PNBP layanan jasa industri (315,40%)
- d) Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan (815,17%)
- e) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (107,91%)
- f) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (104,30%)
- g) Rata-rata indeks profesionalitas ASN (107,65%)
- h) Nilai minimal laporan keuangan (105,43%)

Adapun indikator yang belum mencapai target bila dibandingkan dengan target jangka menengah, antara lain:

- a) Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 (50%)
- b) Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri (70%)
- c) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri (99,97%)
- d) Nilai minimal akuntabilitas kinerja (96,44%)

Adapun IKU BBSPJIKKP dari indikator kinerja pada Renstra 2021 – 2024 tersebut antara lain:

- a) Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
- b) Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0

- c) Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri
- d) Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi
- e) Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri
- f) Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan
- g) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

## **2) Analisis hasil yang telah dicapai**

Jika capaian yang diukur adalah target pada tahun berjalan maka seluruh target tercapai, namun jika ukurannya target jangka menengah maka terdapat 4 (empat) indikator yang belum mencapai target jangka menengah, yaitu:

- a) Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0, capaian 50% jika dibandingkan dengan target jangka menengah karena kegiatan konsultasi untuk perusahaan baik terkait industri 4.0 setiap tahunnya harus meningkat jumlah perusahaan yang dapat dilayani. Perluasan jejaring kerjasama dan perluasan informasi kemampuan layanan jasa teknis BBSPJIKKP kepada masyarakat industri perlu ditingkatkan agar target jangka menengah indikator ini dapat tercapai.
- b) Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi, capaian 70% jika dibandingkan dengan target jangka menengah karena kegiatan konsultasi untuk perusahaan baik terkait standardisasi industri setiap tahunnya harus meningkat jumlah perusahaan yang dapat dilayani. Perluasan jejaring kerjasama dan perluasan informasi kemampuan layanan jasa teknis BBSPJIKKP kepada masyarakat industri perlu ditingkatkan agar target jangka menengah indikator ini dapat tercapai.
- c) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri, capaian 99,97% jika dibandingkan dengan target jangka menengah karena target kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa ini ditargetkan terus naik agar semakin baik layanan jasa yang diberikan. Perbaikan secara berkelanjutan terhadap unsur-unsur layanan publik harus terus dilanjutkan agar target jangka menengah indikator ini dapat tercapai.



d) Nilai minimal akuntabilitas kinerja, capaian 96,44% jika dibandingkan dengan target jangka menengah karena format LKE yang digunakan menggunakan format terbaru mengacu pada PermenpanRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah sehingga beberapa dokumen yang disiapkan masih kurang sesuai. Perbaikan yang berkelanjutan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja terutama terhadap aspek penilaian yang belum maksimal perlu dilakukan secara baik agar target jangka menengah indikator ini dapat tercapai.

Sedangkan indikator yang telah mencapai target jangka menengah ada 7 (tujuh) indikator, hal ini disebabkan karena pelaksanaan telah sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan semakin banyaknya kegiatan yang dilaksanakan secara daring dalam pencapaian indikator ini menyebabkan efisiensi dari segi waktu dan biaya.

### **3) Kendala**

Secara umum tidak terdapat kendala karena seluruh indikator kinerja tercapai pada tahun 2023. Perlunya untuk selalu monitoring evaluasi secara berkala agar kegiatan dapat berjalan tanpa kendala.

### **4) Rekomendasi**

Dengan memperhatikan realisasi target jangka menengah, lebih dari separuh target dapat tercapai pada periode Renstra TA. 2023. Dengan memperhatikan realisasi tersebut agar realisasi pada periode Renstra 2021-2024 dapat lebih baik, langkah-langkah yang dapat dilaksanakan agar semua target dapat teralisasi adalah:

- Perlu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam pencapaian target indikator-indikator kinerja tersebut.
- Komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan dalam setiap pelaksanaan kegiatan
- Monitoring evaluasi kegiatan yang rutin untuk meminimalisir resiko kegiatan

#### **3.1.3. Capaian Program Prioritas Nasional TA. 2023**

Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri yang dilaksanakan oleh BBSPJIKKP merupakan upaya untuk mendukung RPJMN Kegiatan Prioritas Nasional dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing melalui

peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi. Capaian BBSPJIKKP dalam program prioritas nasional TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.45. Berdasarkan data tersebut, dari pagu anggaran sebesar Rp. 75.960.000,- telah terealisasi ndust 100% sebesar Rp74.054.176,- dengan output realisasi berupa 2 industri yang diberikan jasa konsultansi pada kegiatan DAPATI.

Tabel 3.45 Capaian Program Prioritas Nasional BBSPJIKKP TA. 2023

Kode	Output	Pagu			Output			
		Pagu Alokasi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Target	Realisasi	Satuan	Capaian kinerja indikator (%)
<b>6077.QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri</b>		<b>75.960.000</b>	<b>74.054.176</b>	<b>97,59%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Industri</b>	<b>100%</b>
6077.QDI.002	Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri Melalui Jasa Konsultansi	75.960.000	74.054.176	97,59%	2	2	Industri	100%

Adapun, penjelasan hasil capaian progam prioritas TA. 2023 yang telah dilaksanakan dari output tersebut pada TA. 2023 adalah sebagai berikut :

**1. Kegiatan : Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri**

**a. Output : Fasilitasi Dan Pembinaan Industri**

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan sumber daya industri. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, teknologi industri didefinisikan sebagai hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian perlu melakukan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan teknologi industri dalam rangka melaksanakan tugas Fasilitasi dan Pembinaan Industri.

## 1) Hasil yang telah dicapai

### **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Tabel 3.46 Perbandingan target dan realisasi output program PN

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah industri	2 industri	2 industri	100%

Pada Tahun Anggaran 2023 di BBSPJIKKP terdapat satu kegiatan Prioritas Nasional dengan output berupaindustri yang diberikan jasa konsultasi pada kegiatan DAPATI dengan target output sebanyak 2 industri. Tujuan dari kegiatan DAPATI ini adalah membantu industri dalam menyelesaikan permasalahan industri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki balai.

Terdapat 2 kegiatan DAPATI tahun 2023 di BBSPJIKKP antara lain:

a) Peningkatan Mutu Produk Melalui Pemantauan Proses Produksi pada CV. PSM

CV. Pusaka Sarana Mustika (selanjutnya disebut dengan CV. PSM) merupakan salah satu industri kecil-menengah (IKM) yang bergerak pada produksi barang karet yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Dalam proses produksinya, CV. PSM belum melakukan pemantauan proses secara rutin (batch to batch). Pengujian mutu produk akhir dilakukan apabila ada permintaan dari pelanggan. Oleh karena itu produk tidak sesuai yang dihasilkan cukup besar, mencapai 20%. Penanganan produk tidak sesuai yang telah dilakukan adalah mengalihkan produk tersebut sebagai produk mutu rendah (down grade). Selain itu, CV. PSM juga cukup sering mendapatkan industri dari pelanggan terkait mutu produk yang dihasilkan. Nilai produk tidak sesuai yang cukup besar dan industri dari pelanggan terkait mutu produk diduga karena belum dilakukan pemantauan proses dan mutu produk akhir. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pemantauan proses produksi penting dilakukan untuk memberikan kepastian mutu produk kepada pelanggan.

Kegiatan jasa konsultasi mencakup pendampingan kepada IKM dalam hal pemantauan konsistensi spesifikasi bahan baku dan

bahan aditif, uji Rheometer terhadap kompon yang diproduksi, pengujian viskositas Mooney kompon, pengujian Mooney Scorch kompon, pemantauan kondisi alat proses (kalibrasi vulcanizing press pada parameter suhu), pemantauan mutu produk melalui pengujian fisis, mekanik dan kimia, serta sosialisasi (sharing session) metode pemantauan proses dan produk sehingga dapat diterapkan secara rutin pada proses produksi. Kegiatan konsultasi program DAPATI dilaksanakan selama 10 bulan dimulai pada bulan Maret 2023 hingga bulan Desember 2023.

b) Jasa Konsultansi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit pada UD Berkah

UD Berkah membutuhkan bantuan dalam pemecahan permasalahan untuk menangani limbah proses fleshing kulit yang tepat dan diharapkan penanganan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi IKM. Proses fleshing merupakan proses menghilangkan sisa daging (flesh) yang masih menempel pada kulit segar. Pada kondisi normal, dari 4 (empat) ton kulit mentah yang diproses, limbah proses fleshing yang berupa sisa daging (flesh) mencapai 1 (satu) ton. Limbah fleshing tersebut belum tertangani dan hanya ditumpuk di area produksi IKM. Karakteristiknya sebagai limbah industri, menjadikan limbah fleshing sebagai tempat ideal bagi mikroorganisme. Hal ini mengakibatkan dampak terhadap lingkungan sekitar, salah satunya bau. Disisi lain, limbah organik berpotensi diolah menjadi produk lain yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, penanganan yang tepat dan juga menguntungkan menjadi harapan dan kebutuhan IKM untuk menjaga keberlanjutan usaha yang dijalani. Permasalahan terkait pemanfaatan limbah fleshing ini diselesaikan melalui kegiatan jasa konsultansi teknis melalui program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI). Pemanfaatan limbah fleshing melalui teknologi yang tepat guna dapat meningkatkan nilai tambah dari limbah yang dihasilkan oleh IKM UD. Berkah. Untuk mengatasi hal tersebut, BBSPJIKKP memberikan pendampingan dan konsultansi teknis

terkait teknologi pemanfaatan limbah fleshing kulit menjadi pakan ikan di IKM UD. Berkah.

Kegiatan jasa konsultasi teknis teknologi pemanfaatan limbah fleshing kulit pada program DAPATI kolaborasi antara BBSPJIKKP dan IKM UD Berkah dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan, sejak bulan Maret hingga bulan Oktober tahun 2023. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, dengan Pimpinan IKM UD. Berkah. PKS antara BBSPJIKKP dan IKM UD. Berkah telah dilaksanakan pada tanggal 3 April 2023 dengan Nomor 011/BSKJI/BBSPJIKKP/LB/IV/2023 dan nomor 01/BERKAH/IV/2023.
2. Pelaksanaan survey awal dalam rangka identifikasi awal untuk mengetahui kondisi terkini limbah fleshing yang dihasilkan oleh IKM, baik dari segi kuantitasnya, penanganannya, dan dampak yang ditimbulkan.
3. Pelaksanaan persiapan bahan baku utama pembuatan pakan ikan, yang berupa tepung fleshing. Persiapan awal adalah melihat karakteristik limbah fleshing, melalui Analisa proksimat bahan tersebut.
4. Setelah limbah fleshing diketahui karakteristiknya, maka dilakukan pembuatan tepung fleshing sebagai bahan baku utama dalam formulasi pakan ikan.
5. Setelah tepung fleshing siap, kegiatan selanjutnya adalah melakukan pembuatan pakan ikan. Pembuatan pakan ikan dilakukan dengan mencampurkan bahan-bahan dalam suatu formulasi, yang terdiri dari tepung fleshing, tepung ikan, ampas tahu, bekatul, dan tepung tapioca.
6. Pakan ikan yang dihasilkan, selanjutnya dianalisa mutu dengan menggunakan parameter dalam Analisa proksimat, dimana dilihat kadar air, abu, lemak, protein, serat kasar, karbohidrat, dan nilai kalorinya.

7. Pakan yang sudah jadi kemudian diujicoba dengan menebarkannya ke kolam yang berisi ikan.

## 2) Analisis yang telah dicapai

### **Perbandingan dengan standar nasional atau RPJMN**

Agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 tersusun dalam Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Salah satu Major Project RPJMN 2020-2024 ialah pada industri 4.0 di 5 Sub sektor prioritas yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi. Dengan major project ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 21%.

Kegiatan DAPATI ini merupakan salah satu upaya pemerintah mencapai sasaran prioritas industri 4.0 di 5 Sub sektor prioritas dengan manfaat meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 21% di tahun 2024. Dengan adanya kegiatan DAPATI ini dapat meningkatkan omset industri yang berimbas meningkatnya PDB dan diharapkan dapat mendukung akselerasi industrialisasi serta penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja**

BBSPJIKKP berhasil mencapai produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi karena adanya kesesuaian kompetensi balai dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dihadapi industri, dalam hal ini IKM. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara balai dan industri juga mendukung keberhasilan capaian kinerja ini. Peran aktif dari IKM dalam mengeluarkan dana juga mempengaruhi keberhasilan kegiatan ini. Meskipun dengan keterbatasan anggaran, namun BBSPJIKKP

berhasil memotivasi dan mendukung IKM dalam menggunakan SDM dan anggaran yang ada sehingga tercapainya peningkatan efisiensi dan produktivitas di IKM. Adanya bantuan dari POPTIKJI sebagai sumber dana serta bantuan administrasi lainnya menyebabkan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

#### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pengiriman sampel untuk pengujian di luar balai juga dapat menggunakan jasa pengiriman sehingga mengurangi kebutuhan anggaran perjalanan dinas. Pemilihan SDM yang tepat dalam memberikan konsultasi juga menyebabkan efisiensi pada penggunaan jumlah SDM.

#### **Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

7. Kegiatan miniplant kulit dan miniplant karet terkait pelaksanaan kegiatan
8. Kegiatan program dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran;
9. Kegiatan pengadaan, terkait pengadaan bahan insulator dan bahan lainnya yang mendukung kegiatan teknis konsultasi
10. Kegiatan administrasi keuangan, terkait pertanggungjawaban penggunaan;
11. Kegiatan pengujian, terkait pengujian pakan ikan
12. Kegiatan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri, terkait adanya komunikasi antara BBSPJIKKP dan mitra kolaborasi dalam hal penandatanganan kerjasama.

### **3) Kendala**

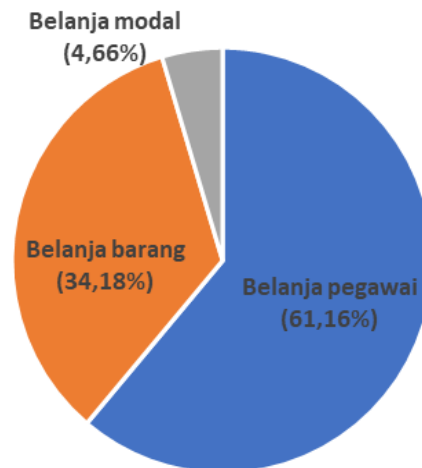
Secara umum tidak terdapat kendala di tahun 2023 dalam pencapaian target pada indikator ini. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya target. Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini ialah adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara balai dengan IKM sehingga kegiatan dapat mencapai target.

#### 4) Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah memastikan dampak yang terukur pada kegiatan DAPATI serta melibatkan pihak akademisi maupun instansi pemerintah lainnya dalam memberikan konsultasi.

### 3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu akhir DIPA BBSPJIKKP tahun 2023 adalah sebesar Rp 23.648.636.000 terdiri dari anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 18.331.234.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 5.317.402.000. Berdasarkan jenis belanja, anggaran BBSPJIKKP dibagi menjadi belanja pegawai (51) sebesar Rp 14.463.460.000, belanja barang (52) sebesar Rp 8.083.871.000 dan belanja modal (53) sebesar Rp 1.101.305.000 sebagaimana terlihat pada gambar 23 di bawah ini.



Gambar 23. Persentase Pagu BBSPJIKKP Berdasarkan Jenis Belanja

#### 3.2.1 Realisasi Anggaran Keuangan (RM)

##### 1) Hasil yang telah dicapai

Realisasi anggaran berdasarkan Renstra BBSPJIKKP TA 2021-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.47  
Realisasi Keuangan Berdasarkan Renstra BBSPJIKP TA. 2021 – 2024

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2021				2022				2023				2024				TOTAL 2021-2024			
	Target Renstra (RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin(%)	Target Renstra(RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin(%)	Target Renstra(RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/Perkin(%)	Target Renstra(RP)	Target Renstra(RP)	Target Perkin (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi/P erkin(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	22,675,618,000	22,675,618,000	20,322,103,170	89.62	23,081,423,000	21,868,778,000	22,571,153,866	103.21	23,648,636,000	23,648,636,000	23,252,853,110	98.33%	28,179,240,000	97,584,917,000	68,193,032,000	66,146,110,146	97.00%			
<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan</b>	648,842,000	648,842,000	162,149,800	24.99	295,253,000	295,253,000	65,071,223	22.04	33,148,000	33,148,000	29,663,814	89.49%	180,000,000	1,157,243,000	977,243,000	256,884,837	26.29%			
- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (persen)	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	33,148,000	33,148,000	29,663,814	89.49%	80,000,000	113,148,000	33,148,000	29,663,814	89.49%			
<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>	121,192,000	121,192,000	75,682,800	62.45	110,000,000	110,000,000	105,997,250	96.36	200,172,000	200,172,000	200,167,186	100.00%	130,000,000	561,364,000	431,364,000	381,847,236	88.52%			
- Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0									187,793,000	187,793,000	187,788,681	99.998%	60,000,000	247,793,000	187,793,000	187,788,681	100.00%			
- Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri									12,379,000	12,379,000	12,378,505	99.996%	70,000,000	82,379,000	12,379,000	12,378,505	100.00%			
<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa</b>	6,876,767,000	6,876,767,000	5,329,154,767	77.50	6,750,423,000	6,750,423,000	6,128,524,502	90.79	8,047,759,000	8,047,759,000	7,679,055,480	95.42%	7,758,000,000	29,432,949,000	21,674,949,000	19,136,734,749	88.29%			
- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi (persen)	50,300,000	50,300,000	16,188,000	32.18	50,300,000	50,300,000	32,064,780	63.75	75,960,000	75,960,000	74,132,187	97.59%	70,000,000	246,560,000	176,560,000	122,384,967	69.32%			
- Meningkatkan PNPB layanan jasa industri (persen)	1,926,134,000	1,926,134,000	1,028,705,112	53.41	1,319,004,000	1,319,004,000	1,285,356,063	97.45	1,859,981,000	1,859,981,000	1,585,741,039	85.26%	1,648,000,000	6,753,119,000	5,105,119,000	3,899,802,214	76.39%			
- Meningkatkan jumlah hasil ayunan jasa yang digunakan oleh pelanggan (persen)	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	526,772,000	526,772,000	505,542,182	95.97%	100,000,000	626,772,000	526,772,000	505,542,182	95.97%			
- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (persen)	4,586,393,000	4,586,393,000	4,188,841,655	91.33	4,962,229,000	4,962,229,000	4,658,007,017	93.87	5,585,046,000	5,585,046,000	5,513,640,072	98.72%	5,500,000,000	20,633,668,000	15,133,668,000	14,360,488,744	94.89%			
<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan</b>	40,575,000	40,575,000	6,779,712	16.71	27,645,000	15,000,000	11,010,330	73.40	14,408,000	14,408,000	14,407,367	100.00%	40,000,000	122,628,000	69,983,000	32,197,409	46.01%			
- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh saiker (persen)	21,980,000	21,980,000	6,779,712	30.84	15,000,000	15,000,000	11,010,330	73.40	14,408,000	14,408,000	14,407,367	99.996%	20,000,000	71,388,000	51,388,000	32,197,409	62.66%			
<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang</b>	609,131,000	609,131,000	542,757,007	89.10	425,658,000	425,658,000	550,909,100	129.43	4,167,000	4,167,000	4,167,000	100.00%	100,000,000	1,138,956,000	1,038,956,000	1,097,833,107	105.67%			
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri (indeks)	609,131,000	609,131,000	542,757,007	89.10	425,658,000	425,658,000	550,909,100	129.43	4,167,000	4,167,000	4,167,000	100.00%	100,000,000	1,138,956,000	1,038,956,000	1,097,833,107	105.67%			
<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang</b>	13,611,379,000	13,611,379,000	13,562,650,664	99.64	15,047,210,000	13,847,210,000	15,024,550,636	108.50	14,783,460,000	14,783,460,000	14,239,232,762	96.32%	15,731,240,000	59,173,289,000	42,242,049,000	42,826,434,062	101.38%			
- Rata-rata indeks profesionalitas ASN (indeks)	358,802,000	358,802,000	352,741,330	98.31	283,771,000	283,771,000	268,544,415	94.63	14,783,460,000	14,783,460,000	14,239,232,762	96.32%	15,731,240,000	31,157,273,000	15,426,033,000	14,860,518,507	96.33%			
<b>Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi</b>	704,652,000	704,652,000	638,897,770	90.67	379,534,000	379,534,000	650,864,497	171.49	515,522,000	515,522,000	514,581,394	99.82%	4,195,000,000	5,794,708,000	1,599,708,000	1,804,343,661	112.79%			
- Nilai minimal indeks layanan publik (indeks)	704,652,000	704,652,000	638,897,770	90.67	379,534,000	379,534,000	650,864,497	171.49	515,522,000	515,522,000	514,581,394	99.82%	4,195,000,000	5,794,708,000	1,599,708,000	1,804,343,661	112.79%			
<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>	63,080,000	63,080,000	4,030,650	6.39	45,700,000	45,700,000	34,226,328	74.89	50,000,000	50,000,000	46,711,445	93.42%	45,000,000	203,780,000	158,780,000	84,968,423	53.51%			
- Nilai minimal akuntabilitas kinerja (nilai)	37,380,000	37,380,000	3,367,750	9.01	20,000,000	20,000,000	11,192,328	55.96	30,000,000	30,000,000	27,244,905	90.82%	20,000,000	107,380,000	87,380,000	41,804,983	47.84%			
- Nilai minimal laporan keuangan (nilai)	25,700,000	25,700,000	662,900	2.58	25,700,000	25,700,000	23,034,000	89.63	20,000,000	20,000,000	19,466,540	97.33%	25,000,000	96,400,000	71,400,000	43,163,440	60.45%			

Sedangkan realisasi keuangan berdasarkan indikator Perjanjian Kinerja TA. 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.48  
Realisasi keuangan berdasarkan indikator Perjanjian Kinerja TA. 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/ efisiensi perusahaan ndustry hasil kegiatan kolaborasi	6 persen	66,025 persen	Kolaborasi Dalam Rangka Pengembangan Industri Karet	33,148,000	29,663,814	89.489%
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi ndustry 4.0.	2 Perusahaan	2 Perusahaan	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis ndustry	187,793,000	187,788,681	99.998%
	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi ndustry.	2 Perusahaan	2 Perusahaan	Jasa pelayanan konsultansi teknis/manajemen	12,379,000	12,378,505	99.996%
Meningkatnya kemampuan ndustry barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan ndustry yang memanfaatkan teknologi ndustry melalui jasa konsultansi dan/atau	6 persen	45,84 Persen	- Jasa Konsultansi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit - Peningkatan Mutu Produk Barang Karet Melalui Pemantauan Proses Produksi	75,960,000	74,132,187	97.594%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	optimalisasi pemanfaatan teknologi						
	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	20 persen	41,79 Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa pelayanan teknis pengujian</li> <li>- Jasa pelayanan teknis kalibrasi</li> <li>- Jasa Pelayanan Uji Profisiensi</li> <li>- Jasa pelayanan teknis sertifikasi</li> <li>- Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal</li> <li>- Jasa Pelayanan Penyedia Material Acuan Standar</li> <li>- Jasa pelayanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca</li> <li>- Jasa pelayanan sertifikasi profesi</li> <li>- Jasa pelayanan inspeksi teknis</li> </ul>	1,859,981,000	1,585,741,039	85.256%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan	5 Persen	48,91 Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan akreditasi industr pemeriksa halal</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi industr inspeksi teknis</li> <li>- Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik</li> <li>- Partisipasi dalam pameran/ promosi</li> <li>- Diseminasi</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi industr uji profisiensi</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi industr validasi dan verifikasi gas rumah kaca</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi industr sertifikasi</li> </ul>	526,772,000	505,542,182	95.970%
	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	78 Persen	82,28 Persen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Operasional dan Pemeliharaan Kantor</li> <li>- Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional</li> <li>- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi</li> <li>- Pengadaan peralatan inventaris perkantoran</li> </ul>	5,585,046,000	5,513,640,072	98.721%
Tercapainya Pengawasan Internal yang	Rekomendasi hasil pengawasan	100 Persen	100 Persen	Penerapan SPIP	14,408,000	14,407,367	99.996%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Efektif dan Efisien	internal telah ditindaklanjuti oleh satker						
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,8	Indeks 3,849	Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan	4,167,000	4,167,000	100.000%
Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks 78	Indeks 83,16	- Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM - Gaji dan Tunjangan	14,783,460,000	14,239,232,762	96.319%
Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks 3,6	Indeks 3,9	- Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan - Pembuatan Sistem Informasi Training Center dan Sertifikasi Profesi BBSPJIKKP - Penyelenggaraan Kearsipan	515,522,000	514,581,394	99.818%
Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai 77	Nilai 77,25	- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi - Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	30,000,000	27,244,905	90.816%
	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai 91	Nilai 97	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	20,000,000	19,466,540	97.333%

Ringkasan realisasi per sasaran strategis sesuai tabel 3.49 berikut.

Tabel 3.49 Rincian realisasi anggaran per sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja TA 2023

Sasaran Kegiatan	Anggaran		
	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	33,148,000	29,663,814	89.489%
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	200,172,000	200,167,186	99.998%
Meningkatnya kemampuan ndustry barang dan jasa dalam negeri	8,047,759,000	7,679,055,480	95.42%
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	14,408,000	14,407,367	99.996%
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	4,167,000	4,167,000	100.000%
Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	14,783,460,000	14,239,232,762	96.319%
Penguatan Layanan Publik	515,522,000	514,581,394	99.818%
Penguatan Akuntabilitas Organisasi	50,000,000	46,711,445	93.42%

Pada awal TA. 2023 telah disusun rencana realisasi anggaran untuk Realisasi Anggaran Per Triwulan, seperti tampak pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.50 Realisasi Anggaran Per Triwulan

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen	Anggaran (Rp)(000)	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)		% Realisasi Ouput
		Keuangan		Keuangan		Keuangan		Keuangan		
		T	R	T	R	T	R	T	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 6077.AEC – Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi Dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet Dan Plastik	20,000	16,00	16,00	40	40	70,00	67,00	100	100	100
2 6077.AEF – Partisipasi Dalam Pameran/ Promosi	30,700	0,00	7,50	45	48	92,50	95,00	100	100	100

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen		Anggaran (Rp)(000)	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)		% Realisasi Ouput
			Keuangan		Keuangan		Keuangan		Keuangan		
			T	R	T	R	T	R	T	R	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	6077.AEF – Diseminasi	112,305	0,00	20,00	65	57	92,50	57,00	100	100	100
4	6077.AEF – Survei Kepuasan Masyarakat Dan Temu Pelanggan	4,167	0,00	10,00	50	60	76,67	82,00	100	100	100
5	6077.BAD – Jasa Pelayanan Validasi Dan Verifikasi Gas Rumah Kaca	12,772	0,00	12,00	50	16	75,00	16,00	100	100	100
6	6077.BAD – Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Validasi Dan Verifikasi Gas Rumah Kaca	54,572	0,00	0,00	53,3	64	90,00	72,00	100	100	100
7	6077.BAD – Jasa Pelayanan Uji Profisiensi	29,900	0,00	12,00	42,7	43,2	75,00	51,90	100	100	100
8	6077.BAD – Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Uji Profisiensi	41,000	0,00	15,60	9,3	8,5	30,00	28,1	100	100	100
9	6077.BAD – Layanan Pemeriksa Dan Pengujian Produk Halal	366,334	4,00	2,50	50	50	75,00	75,00	100	100	100
10	6077.BAD – Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	34,200	0,00	0,00	17,5	47	37,50	60,00	100	100	100
11	6077.BAD – Jasa Pelayanan Penyedia Material Acuan Standar	37,890	0,00	0,00	65,5	65	90,68	72,00	100	100	100
12	6077.BAD – Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknis	58,007	5,00	13,90	53,3	28,8	86,67	75,00	100	100	100
13	6077.BAD – Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis	39,604	0,00	18,00	50	48	75,00	76,00	100	100	100
14	6077.BAD – Jasa Pelayanan Konsultasi Teknis/manajemen	12,379	0,00	0,00	28,2	34	44,09	54,00	100	100	100
15	6077.BAD – Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	416,043	0,00	17,50	47,5	49,6	73,77	71,3	100	100	100
16	6077.BAD – Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Uji	52,283	0,00	0,00	0	28	50,00	30,00	100	100	100
17	6077.BAD – Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	84,183	0,00	17,60	48,4	54,6	75,18	76,6	100	100	100
18	6077.BAD – Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	849,838	0,00	0,00	46,7	49	70,00	78,5	100	100	100
19	6077.BAD – Jasa Pelayanan Sertifikasi Profesi	23,417	15,00	0,00	45	52,5	67,50	75,00	100	100	100
20	6077.BAD – Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	123,705	0,00	0,00	48,9	55	75,00	81,00	100	100	100
21	6077.BAD – Jasa Pelayanan Bimbingan Dan Pendampingan Teknis Industri	187,793	0,00	7,50	58,9	54	77,55	79,3	100	100	100

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen		Anggaran (Rp)(000)	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)		% Realisasi Ouput
			Keuangan		Keuangan		Keuangan		Keuangan		
			T	R	T	R	T	R	T	R	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	6077.BDI – Kolaborasi Dalam Rangka Pengembangan Industri Karet	33,148	0,00	0,00	30,7	56	80,00	89,00	100	100	100
23	6077.CAH – Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan	378,930	0,00	26,00	50	50	75,00	75,00	100	100	100
24	6077.QDI – Peningkatan Mutu Produk Barang Karet Melalui Pemantauan Proses Produksi	47,250	10,00	0,00	42,5	50,5	70,00	81,00	100	100	100
25	6077.QDI – Jasa Konsultansi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit	28,710	0,00	0,00	56,7	50	81,67	83,5	100	100	100
26	6042.EBA – Gaji Dan Tunjangan	14,463,460	0,00	19,64	50	50	75,00	75,00	100	100	100
27	6042.EBA – Pembuatan Sistem Informasi Training Center Dan Sertifikasi Profesi Bbspjikpp	121,000	0,00	1,70	26,7	27,6	60,83	62,3	100	100	100
28	6042.EBA – Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	4,957,671	25,00	25,00	51	50,4	75,50	76,5	100	100	100
29	6042.EBB – Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran	83,475	0,00	45,10	91,5	73	95,75	85,8	100	100	100
30	6042.EBB – Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	155,900	0,00	0,00	33,3	50	72,73	95,00	100	100	100
31	6042.EBB – Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	388,000	0,00	0,00	45,5	50	75,00	75,00	100	100	100
32	6042.EBC – Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi Sdm	320,000	20,00	40,00	60	60	80,00	83,2	100	100	100
33	6042.EBD – Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	15,000	15,00	23,75	62,5	60	85,00	85,00	100	100	100
34	6042.EBD – Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan	20,000	25,00	25,00	50	50	75,00	75,00	100	100	100
35	6042.EBD – Penerapan Spip	14,408	30,00	30,00	50	60	85,00	84,00	100	100	100
36	6042.EBD – Penyelenggaraan Kearsipan	15,592	0,00	25,00	50	50	75,00	75,00	100	100	100
37	6042.EBD – Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	15,000	25,00	20,00	50	50	75,00	75,00	100	100	100

Rincian masing-masing anggaran berdasarkan kegiatan beserta realisasinya sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.51 Realisasi Anggaran Kegiatan TA 2023

Komponen/ Subkomponen/		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1		2	3	4
1	6077.AEC – Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi Dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet Dan Plastik	20,000,000	18,883,456	94.42%
2	6077.AEF – Partisipasi Dalam Pameran/ Promosi	30,700,000	25,630,462	83.49%
3	6077.AEF – Diseminasi	112,305,000	111,228,843	99.04%
4	6077.AEF – Survei Kepuasan Masyarakat Dan Temu Pelanggan	4,167,000	4,167,000	100.00%
5	6077.BAD – Jasa Pelayanan Validasi Dan Verifikasi Gas Rumah Kaca	12,772,000	12,772,000	100.00%
6	6077.BAD – Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Validasi Dan Verifikasi Gas Rumah Kaca	54,572,000	54,571,140	100.00%
7	6077.BAD – Jasa Pelayanan Uji Profisiensi	29,900,000	29,851,072	99.84%
8	6077.BAD – Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Uji Profisiensi	41,000,000	40,868,020	99.68%
9	6077.BAD – Layanan Pemeriksa Dan Pengujian Produk Halal	366,334,000	365,555,100	99.79%
10	6077.BAD – Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	34,200,000	20,710,000	60.56%
11	6077.BAD – Jasa Pelayanan Penyedia Material Acuan Standar	37,890,000	37,861,122	99.92%
12	6077.BAD – Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknis	58,007,000	58,005,370	100.00%
13	6077.BAD – Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis	39,604,000	39,601,743	99.99%
14	6077.BAD – Jasa Pelayanan Konsultansi Teknis/manajemen	12,379,000	12,378,500	100.00%
15	6077.BAD – Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	416,043,000	403,708,479	97.04%
16	6077.BAD – Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Uji	52,283,000	51,997,123	99.45%

Komponen/ Subkomponen/		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1		2	3	4
17	6077.BAD – Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	84,183,000	83,302,374	98.95%
18	6077.BAD – Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	849,838,000	589,742,373	69.39%
19	6077.BAD – Jasa Pelayanan Sertifikasi Profesi	23,417,000	23,096,413	98.63%
20	6077.BAD – Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	123,705,000	123,647,663	99.95%
21	6077.BAD – Jasa Pelayanan Bimbingan Dan Pendampingan Teknis Industri	187,793,000	184,099,371	98.03%
22	6077.BDI – Kolaborasi Dalam Rangka Pengembangan Industri Karet	33,148,000	29,663,825	89.49%
23	6077.CAH – Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan	378,930,000	378,700,190	99.94%
24	6077.QDI – Peningkatan Mutu Produk Barang Karet Melalui Pemantauan Proses Produksi	47250000	46466304	98.34%
25	6077.QDI – Jasa Konsultansi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit	28710000	27665872	96.36%
26	6042.EBA – Gaji Dan Tunjangan	14,463,460,000	14,355,360,397	99.25%
27	6042.EBA – Pembuatan Sistem Informasi Training Center Dan Sertifikasi Profesi Bbspjikp	121,000,000	120,290,318	99.41%
28	6042.EBA – Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	4,957,671,000	4,929,471,017	99.43%
29	6042.EBB – Pengadaan Peralatan Inventaris Perkantoran	83,475,000	83,083,126	99.53%
30	6042.EBB – Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	155,900,000	155,900,000	100.00%
31	6042.EBB – Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional	388,000,000	374,500,000	96.52%

Komponen/ Subkomponen/		Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1		2	3	4
32	6042.EBC – Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi Sdm	320,000,000	319,859,050	99.96%
33	6042.EBD – Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	15,000,000	14,307,854	95.39%
34	6042.EBD – Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan	20,000,000	19,466,550	97.33%
35	6042.EBD – Penerapan Spip	14,408,000	14,407,360	100.00%
36	6042.EBD – Penyelenggaraan Kearsipan	15,592,000	15,590,695	99.99%
37	6042.EBD – Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	15,000,000	12,937,046	86.25%
<b>JUMLAH</b>		<b>23.648.636.000</b>	<b>23.252.853.110</b>	<b>98,33%</b>

Berdasarkan tabel 3.51 dapat dilihat bahwa sampai akhir tahun 2023 nampak bahwa secara akuntabilitas keuangan, penyerapan kegiatan di BBSPJIKKP menurut hasil laporan dari aplikasi SAKTI dan OM SPAN mencapai 98,33% dari anggaran yang dialokasikan.

Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya, maka perkembangan realisasi anggaran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.48 dan grafik 1 sebagai berikut:

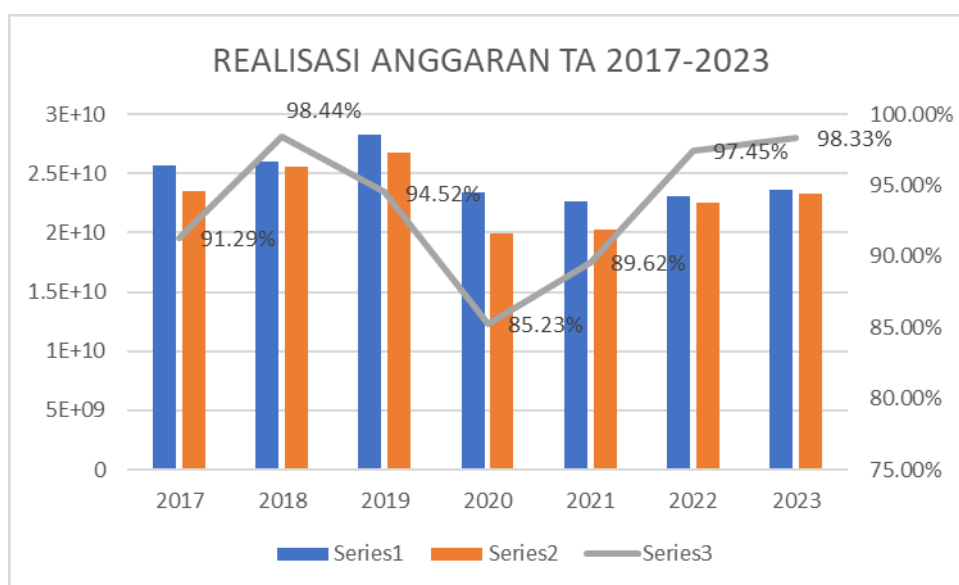
## 2) Analisis hasil yang telah dicapai

### Perbandingan Antara Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi anggaran pada tahun 2023 BBSPJIKKP sebesar 98,33% telah mencapai target yang ditetapkan oleh BSKJI yaitu 98,04%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun anggaran sebelumnya yaitu 97,45% terdapat kenaikan sebesar 3,29%. Rincian realisasi keuangan BBSPJIKKP selama 7 (tujuh) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.48 dan grafik 1.

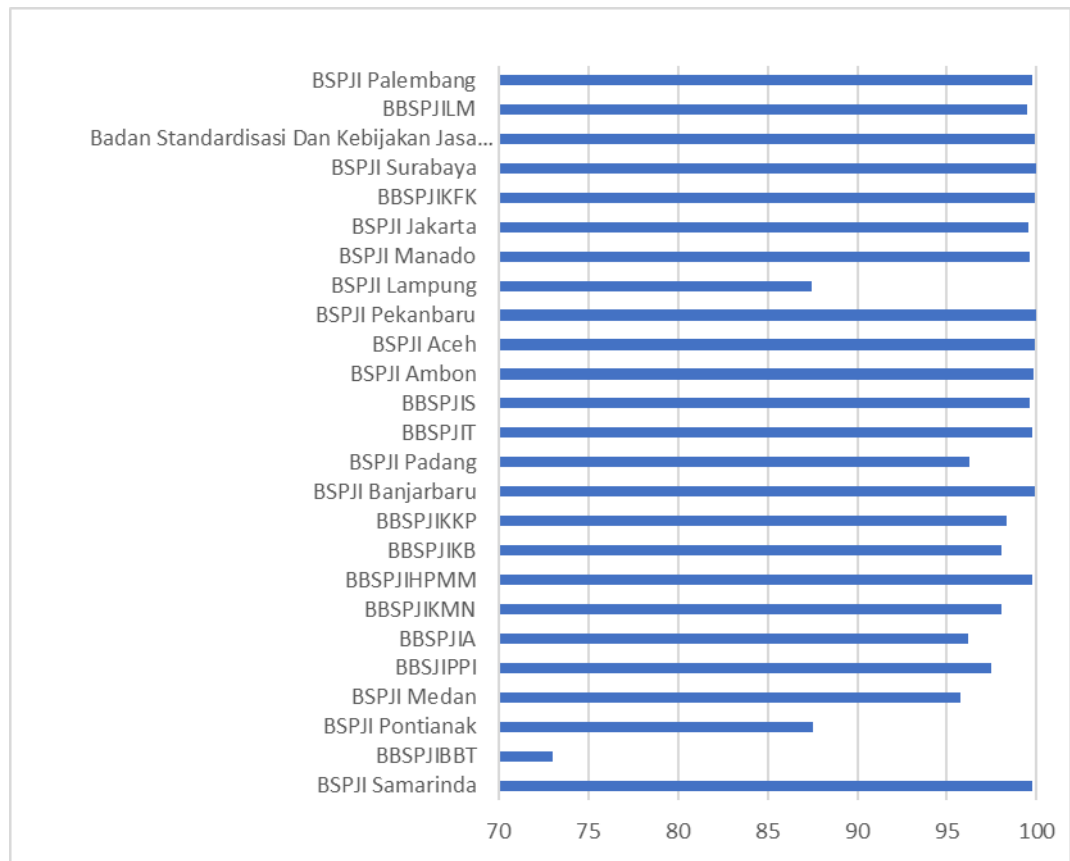
Tabel 3.52 Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2017 – 2023

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pagu	25.722.903.000	26.030.083.000	28.324.340.000	23.390.627.000	22.675.618.000	23,101,279,000	23.648.636.000
Realisasi	23.481.995.026	25.624.676.713	26.770.873.550	19.935.954.753	20.322.103.170	22,512,578,468	23.252.853.110
% Realisasi	91,29	98,44	94,52	85,23	89,62	97,45	98,33



Grafik 1. Realisasi Anggaran TA 2017 – 2023

Pada Tabel 3.52 dapat dilihat yaitu persentase realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar 98,33%. Ini merupakan realisasi tertinggi bila dibandingkan tahun 2019-2022. Salah satu faktor pendukung peningkatan realisasi anggaran tahun 2023 yaitu pencapaian penerimaan PNBP yang melebihi target yang telah ditetapkan sehingga sebagian besar kegiatan yang bersumber dana dari PNBP dapat dibiayai. Selain itu, kegiatan dengan sumber dana RM dan PNBP dapat dilaksanakan dan mengoptimalkan sisa kontrak sehingga dapat dimanfaatkan.



Grafik 2. Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Balai Lain Tahun 2023

### **Analisis Penyebab Keberhasilan Realisasi Keuangan**

Realisasi anggaran BBPSJIKKP pada tahun 2023 yaitu 98,333% telah berhasil mencapai target BSKJI sebesar 98,04%. Penyebab keberhasilan ini ialah adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara KPA, PPK, bagian program dan bagian keuangan dalam pengelolaan anggaran BBSPJIKKP.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia (SDM), biaya, waktu dan energi. Sehubungan dengan implementasi teknologi digital beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring/online. Hal ini meningkatkan efisiensi baik dalam hal biaya, waktu, energi dan sdm. Kegiatan webinar yang sebelumnya dilakukan

secara mandiri oleh BBSPJIKKP, pada tahun 2023 dilakukan kolaborasi pelaksanaan webinar dengan BBSPJIT.

Efisiensi lainnya yang juga dilakukan yaitu melalui pengembangan intranet BBSPJIKKP yaitu mengalihkan fungsi manual dengan menggunakan kertas menjadi penggunaan secara elektronik sebagai contoh administrasi perkantoran yang meliputi e-surat tugas, tata naskah dinas, permintaan lembur, peminjaman ruangan, akuntabilitas kinerja dan e-SPBy.

Selain itu, jumlah SDM juga mengalami efisiensi. Semula membutuhkan SDM untuk mendistribusikan dokumen dan dibutuhkan waktu lebih dari 30 menit. Seiring dengan peningkatan sistem informasi/digitalisasi sehingga terdapat peningkatan 100%.

### **Analisis Program/Kegiatan yang Dapat Menunjang Keberhasilan Kinerja**

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilaksanakan setiap saat melalui peran aktif pimpinan dan koordinator kegiatan. ALKI pada Intranet Kemenperin dimanfaatkan untuk memonitor capaian kinerja fisik dan anggaran. Selain itu, kegiatan rapat Monitoring dan Evaluasi setiap triwulan serta Rapat Tinjauan Manajemen dan rapat manajemen lainnya dimanfaatkan sebagai sarana koordinasi untuk membahas capaian, kendala, dan tindak lanjut yang diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

### **3) Kendala**

Secara umum, tidak terdapat kendala dalam pencapaian realisasi anggaran TA 2023.

Kendala TA 2022 yang telah ditindaklanjuti pada TA 2023 sebagai berikut:

- Penerimaan PNBPN yang telah melebihi target dimana realisasi PNBPN adalah Rp 5.965.483.946 atau 107,14% dari target sebesar Rp 5.568.042.000

### **3) Rekomendasi**

Saran/rekomendasi terkait pengelolaan anggaran untuk tahun anggaran 2024 antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan program dan tahapan yang telah direncanakan
- b. Melaksanakan kegiatan tahun 2024 berdasarkan anggaran berbasis kinerja (sesuai capaian kinerja)
- c. Memastikan dan mengupayakan agar layanan yang telah selesai agar dapat segera dilakukan pembayaran sebelum batas akhir dari anggaran yang dapat digunakan
- d. Memastikan ketersediaan MP dalam pengajuan anggaran agar tidak terjadi kesalah/kelebihan belanja seperti tahun sebelumnya
- e. Memastikan dan mengkoordinasikan persyaratan untuk belanja modal khususnya barang impor
- f. Meningkatkan efektivitas monitoring realisasi anggaran lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya melalui kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev), Rapat Tinjauan Manajemen dan aplikasi (e-monitoring APBN, ALKI, SMART DJA, eMonev Bappenas) maupun melalui surat peringatan dan perintah untuk mempercepat realisasi anggaran. ALKI pada Intranet Kemenperin sangat membantu dalam memonitoring anggaran dan kegiatan. Koordinator kegiatan dapat setiap saat memonitor capaian kinerja dan realisasi keuangan serta memberikan koreksi apabila terdapat update capaian yang tidak sesuai kepada pihak terkait. Selain itu, BBSPJIKKP juga telah mengembangkan aplikasi keuangan khusus di intranet BBSPJIKKP, misalnya administrasi keuangan dan kepegawaian.
- g. Surat teguran dan perintah untuk mempercepat realisasi anggaran tetap diberikan kepada Koordinator Kegiatan minimal setiap triwulan. Selain itu, rapat koordinasi melalui Monev triwulan juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk membahas progress kegiatan, kendala maupun tindak lanjut yang diperlukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- h. Koordinasi yang lebih baik lagi dengan Bagian/Bidang terkait terutama dalam hal pengadaan belanja modal sehingga realisasi anggaran dapat terpenuhi.
- i. Meningkatkan kegiatan promosi/pemasaran layanan jasa teknis melalui kegiatan pameran, seminar, workshop ataupun pemasaran langsung ke industri serta melakukan evaluasi terhadap industri yang tidak menggunakan layanan BBSPJIKKP lagi.

- j. Meningkatkan sistem informasi layanan sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna terutama pelanggan BBSPJIKKP.

### 3.2.2. Realisasi Anggaran Keuangan PNBP

#### 1) Hasil yang telah dicapai

Pada tahun 2023 target awal PNBP BBSPJIKKP sebesar Rp. 5.250.000.000. Namun seiring dengan meningkatnya penerimaan PNBP, target PNBP mengalami revisi menjadi Rp 5.568.042.000 dengan pagu penggunaan sebesar Rp. 5.317.480.110. Adapun Realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP TA 2023 dapat dilihat pada tabel 3.53.

Tabel 3.53 Pagu dan Realisasi Keuangan PNBP Tahun 2023

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penerimaan	5.568.042.000	5.965.483.946	107,14
Penggunaan	5.317.480.110	5.000.157.909	94,03

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PNBP mencapai target dengan persentase pencapaian sebesar 107,14%, dan realisasi penggunaannya sebesar 90,17%. Penggunaan PNBP adalah untuk membiayai kegiatan jasa pelayanan teknis, pengembangan kelembagaan, kegiatan transfer teknologi, layanan internal, operasional perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana, dan belanja modal untuk menambah peralatan yang mendukung layanan dan kegiatan jasa pelayanan teknis.

Tabel 3.54 Rincian Realisasi Penerimaan PNBP Berdasarkan Layanan Jasa Tahun 2023

No	Layanan	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Pelatihan teknis / Pendampingan	600.755.000	747.439.000	124,42%
2.	Pengujian	1.051.635.000	830.319.000	78,96%
3.	Konsultansi	180.480.000	135.460.000	75,06%
4.	Kalibrasi	230.000.000	229.943.000	99,98%
5.	Uji Profisiensi	72.000.000	95.495.000	
6.	Inspeksi	309.064.000	153.033.000	49,51%



No	Layanan	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
7.	Validasi Verifikasi Gas Rumah Kaca	56.700.000	15.750.000	27,78%
8.	Sertifikasi	2.022.670.000	2.443.596.000	120,81%
9.	Pemeriksa Halal	953.540.000	983.050.000	103,09%
10.	Audit Teknologi	0	25.000.000	100,00%
11.	Miniplant Kulit	358.520.000	178.420.828	49,77%
12.	Miniplant Karet	58.000.000	117.783.118	203,07%
13.	Jasa lainnya	0	10.195.000	100,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>5.568.042.000</b>	<b>5.965.483.946</b>	<b>107,14%</b>

Berdasarkan tabel 3.54, realisasi penerimaan PNBPN tertinggi diperoleh dari kegiatan sertifikasi sebesar Rp 2.443.596.000 atau 120,81% dari target. Sedangkan realisasi penerimaan PNBPN terendah diperoleh dari layanan jasa lainnya sebesar Rp 10.195.000 atau 100% dari target. PNBPN jasa lainnya berasal dari penerimaan jasa sewa alat dan kunjungan (workshop).

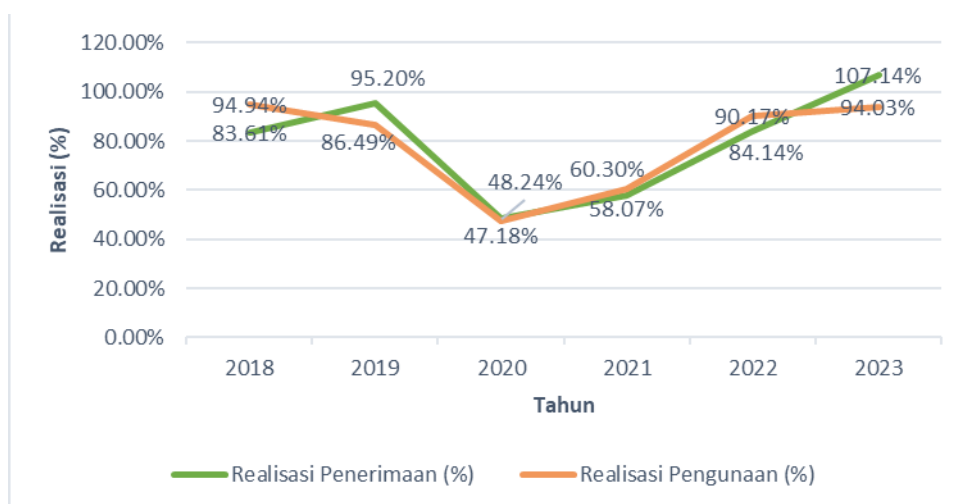
## 2) Analisis yang telah dicapai

### Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berikut perkembangan realisasi PNBPN dari Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 3.55.

Tabel 3.55 Realisasi PNBPN TA 2017 – 2023

Pagu	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target Penerimaan (Rp)	6.166.180.000	5.491.000.000	6.041.000.000	6.500.000.000	5.000.000.000	5.568.042.000
Realisasi Penerimaan (Rp)	5.155.558.237	5.227.286.050	2.914.084.687	3.774.264.959	4.207.051.331	5.965.483.946
Realisasi Penerimaan (%)	83,61	95,20	48,24	58,21	84,14	107,14
Pagu Penggunaan (Rp)	4.775.000.000	5.243.905.000	5.769.155.000	5.540.503.000	4.775.000.000	5.317.480.110
Realisasi Penggunaan (Rp)	4.533.597.902	4.535.710.973	2.721.772.054	3.340.868.540	4.305.713.823	5.000.157.909
Realisasi Penggunaan (%)	98,44	86,49	47,18	60,3	90,17	94,03



Grafik 3. Realisasi Pagu Penerimaan dan Penggunaan PNBPs TA 2018 – 2023

Grafik 3 menunjukkan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBPs tahun 2018-2023, realisasi penerimaan dan penggunaan PNBPs tahun 2018-2020 cenderung mengalami penurunan, namun mengalami peningkatan di tahun 2021-2023. Realisasi penerimaan dan penggunaan PNBPs tertinggi yaitu pada tahun 2023 dengan realisasi masing-masing sebesar 107,14% dan 94,03%.

Realisasi penerimaan PNBPs tahun 2018-2022 belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian masing-masing yaitu sebesar 82,38%; 94,49%, 47,00%, 55,15%, dan 84,14%. Hanya pada tahun 2023 selama 6 (enam) tahun terakhir, penerimaan melebihi target yaitu sebesar 107,14%. Pada tabel 3.56 dijelaskan rincian penerimaan PNBPs selama tahun 2018 – 2023.

Tabel 3.56 Rincian PNBPs Tahun 2018 – 2023

Layanan		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Litbang **	Target	128.400.000	130.000.000	160.000.000	176.000.000	100.000.000	0
	Realisasi	109.580.000	0	14.968.807	0	0	0
	Persentase	85.34	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
Pendampingan	Target	621.460.000	570.000.000	590.000.000	650.000.000	500.000.000	600.755.000
	Realisasi	446.461.000	779.840.000	293.365.000	236.895.000	464.234.000	747.439.000
	Persentase	71.84	136.81	49.72	36.45	92.85	124.42%
	Target	936.000.000	900.000.000	830.000.000	1.000.000.000	750.000.000	1.051.635.000

Layanan		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengujian	Realisasi	897.811.812	931.158.050	412.414.755	410.822.744	750.832.150	830.319.000
	Persentase	95.92	103.46	49.69	41.08	100.11	78.96%
Kalibrasi	Target	90.000.000	100.000.000	90.000.000	120.000.000	80.000.000	230.000.000
	Realisasi	124.200.065	112.036.500	110.215.000	97.611.000	168.513.200	229.943.000
	Persentase	138.00	112.04	122.46	81.34	210.64	99.98%
Uji Profisiensi	Target	-	-	-	-	-	72.000.000
	Realisasi	-	-	-	-	-	95.495.000
	Persentase	-	-	-	-	-	132.63%
Inspeksi	Target	-	-	-	-	-	309.064.000
	Realisasi	-	-	-	-	-	153.033.000
	Persentase	-	-	-	-	-	49.51%
Validasi Verifikasi Gas Rumah Kaca (VV GRK)	Target	-	-	-	-	-	56.700.000
	Realisasi	-	-	-	-	-	15.750.000
	Persentase	-	-	-	-	-	27.78%
Sertifikasi	Target	3.185.280.000	3.406.000.000	3.256.000.000	3.750.000.000	3.070.000.000	2.022.670.000
	Realisasi	3.261.395.000	3.203.850.000	1.976.682.000	2.776.422.000	2.624.100.000	2.443.596.000
	Persentase	102.39	94.06	60.71	74.04	85.47	120.81%
Pemeriksa Halal	Target						953.540.000
	Realisasi						983.050.000
	Persentase						103.09%
Audit Teknologi	Target						0
	Realisasi						25.000.000
	Persentase						100%
Konsultansi	Target	239.040.000	85.000.000	95.000.000	103.500.000	50.000.000	180.480.000
	Realisasi	21.930.000	-	-	24.900.000	-	135.460.000
	Persentase	9.17	0.00	0.00	24.06	0.00	75.06%
Miniplant Kulit	Target	-	-	-	-	-	358.520.000
	Realisasi	-	-	-	-	-	178.420.828
	Persentase	-	-	-	-	-	49.77%
Miniplant Karet	Target	-	-	-	-	-	58.000.000
	Realisasi	-	-	-	-	-	117.783.118
	Persentase	-	-	-	-	-	203.07%
	Target	964.000.000	300.000.000	1.020.000.000	700.500.000	450.000.000	-

Layanan		2018	2019	2020	2021	2022	2023
JPT Lainnya	Realisasi	216.864.530	161.646.600	31.344.725	38.192.359	228.539.807	10.195.000
	Persentase	22.50	53.88	3.07	5.45	50.79	100.00%
TOTAL	Target	6.164.180.000	5.491.000.000	6.041.000.000	6.500.000.000	5.000.000.000	5.568.042.000
	Realisasi	5.078.242.407	5.188.531.150	2.838.990.287	3.774.264.959	4.207.051.331	5.965.483.946
	Capaian	82.38%	94.49%	47.00%	55.15%	84.14%	107.14%
	Pertumbuhan	10.85%	2.17%	(45.28%)	32.94%	11.47%	41.79%

Dari data tabel 3.56 diatas menunjukkan layanan sertifikasi merupakan penyumbang terbesar dari penerimaan PNBPN enam tahun terakhir yaitu rata-rata di atas 80% dari total pendapatan PNBPN yang diterima tiap tahunnya. Selain sertifikasi, porsi penerimaan PNBPN besar lainnya berasal dari layanan pengujian dengan rata-rata penerimaan PNBPN 78% per tahun. Realisasi penerimaan PNBPN tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.965.483.946 (107,14%). Realisasi tersebut mengalami kenaikan 41,79% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat beberapa layanan baru seperti uji profisiensi, pemeriksa halal, inspeksi teknis, audit teknologi, dan LVV GRK yang berpotensi meningkatkan penerimaan PNBPN selain layanan jasa lama.

Beberapa hal yang menyebabkan peningkatan penerimaan PNBPN adalah:

- Penerimaan PNBPN yang telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga kegiatan yang bersumber dana PNBPN dapat didanai
- Standar Pelayanan Minimum (SPM) layanan lebih cepat sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan
- Kerjasama antar fungsi baik dalam segi monitoring, evaluasi, kebutuhan data/bahan/barang/alat serta koordinasi lebih baik sehingga dapat mendukung layanan

Adapun perkembangan jumlah pelanggan dan pencapaian jumlah Sampel/ Alat/ Sertifikat /Pelatihan / Riset/ Konsultasi dari tahun 2018 – 2023, dapat dilihat pada tabel 3.57

Tabel 3.57 Jumlah Pelanggan Berdasarkan Layanan TA 2018-2023

Layanan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sertifikasi	125	127	89	113	79	119
Pemeriksa Halal	0	0	0	0	14	426
Verifikasi GRK dan TKDN	0	0	0	0	1	191
Kalibrasi	46	44	49	48	52	85
Pengujian	384	376	303	199	204	175
Pelatihan	35	30	28	17	15	40
Uji Profisiensi	0	0	0	0	32	51
Inspeksi Teknis	0	0	0	0	1	9
Miniplant karet	2	2	2	2	2	9
Miniplant kulit	60	60	60	60	70	101
Konsultansi	2	0	2	2	5	4
Audit Teknologi	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>654</b>	<b>639</b>	<b>533</b>	<b>441</b>	<b>475</b>	<b>1210</b>

Tabel 3.57 menunjukkan jumlah pelanggan layanan jasa teknis dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Jumlah pelanggan tahun 2018-2020 cenderung mengalami penurunan, namun mengalami peningkatan di tahun 2022 dan memiliki potensi kenaikan di tahun-tahun selanjutnya. Hal ini juga selaras dengan jumlah sampel/alat/sertifikat/pelatihan/konsultansi/industri pada tahun 2018-2023 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.58.

Tabel 3.58 Jumlah Sampel/ Alat/ Sertifikat /Pelatihan / Riset/ Konsultasi TA 2017-2023

No.	Jenis JPT	Jumlah Sampel/Alat/Sertifikat/Pelatihan/Riset/Konsultasi						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Litbang (Jumlah Litbang PNPB)	3	2	2	1	0	0	0
2	RBPI/Rancang Bangun Perekayasaan Industri (Jumlah RBPI)	0	0	0	0	0	0	0
3	Pelatihan							
	a. Jumlah pelatihan	35	40	50	20	25	24	30
	b. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	493	513	504	769	879	254	464
4	Pengujian							

No.	Jenis JPT	Jumlah Sampel/Alat/Sertifikat/Pelatihan/Riset/Konsultasi						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	a.Jumlah Pelanggan	242	384	376	303	199	204	175
	b.Jumlah sampel uji	2.874	2.558	3.544	1359	1566	1750	2311
5	Konsultansi/Supervisi (Jumlah Konsultansi/Supervisi)	2	2	0	2	2	5	4
6	Kalibrasi (Sertifikat/Alat)							
	a. Jumlah pelanggan	40	46	44	49	48	52	85
	b. Jumlah alat	460	620	608	543	373	586	837
7	Sertifikasi							
	a. Jumlah pelanggan	115	125	127	89	113	79	119
	b. Jumlah sertifikat	57	83	85	57	114	135	62

### 3) Kendala

- a. Realisasi penggunaan PNBPN tidak dapat maksimal karena adanya kelebihan belanja PNBPN tahun sebelumnya yang diperhitungkan sebagai pengurang pada pengajuan MP tahun 2023.
- b. Hasil penerimaan PNBPN yang diterima setelah tanggal 14 Desember 2023 tidak dapat digunakan sebesar Rp 379.557.058

### 4) Rekomendasi

- a. Meningkatkan layanan prima kepada pelanggan dan kegiatan promosi/pemasaran layanan jasa teknis melalui kegiatan pameran, seminar, workshop ataupun pemasaran langsung ke industri serta melakukan evaluasi terhadap industri yang tidak menggunakan layanan BBSPJIKKP lagi. Selain itu, menambah media promosi melalui berbagai media seperti website, Instagram, twitter, Youtube, facebook.
- b. Meningkatkan sistem informasi layanan sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna terutama pelanggan BBSPJIKKP.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dalam layanan jasa teknis kepada pelanggan
- d. Meningkatkan efektivitas monitoring realisasi anggaran baik melalui kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev), Rapat Tinjauan Manajemen dan aplikasi (e- monitoring APBN, ALKI, SMART DJA, eMonev Bappenas) maupun melalui surat peringatan dan perintah

untuk mempercepat realisasi anggaran. Aplikasi ALKI sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan anggaran setiap saat. Koordinator kegiatan dapat setiap saat memonitor capaian kinerja dan realisasi keuangan serta memberikan koreksi apabila terdapat update capaian yang tidak sesuai kepada pihak terkait.

- e. Koordinasi yang baik dengan Bagian/Bidang terkait terutama dalam hal pengadaan belanja modal sehingga realisasi anggaran dapat terpenuhi

### **3.3. ANALISIS SUMBER EFISIENSI SUMBER DAYA SECARA UMUM**

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu organisasi dikatakan efisien apabila dapat mencapai output maksimum dengan menggunakan input yang optimum. Adapun salah satu upaya dalam memaksimalkan capaian tersebut adalah melaksanakan efisiensi sumber daya, supaya sumber daya dapat digunakan secara efektif untuk mencapai target kerja dan pelayanan sesuai tugas dan fungsi pada unit kerja BBSPJIKKP.

Dalam melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program serta Dukungan Manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun TA. 2022/23 secara umum efisiensi yang telah dilaksanakan antara lain:

#### **a. Analisis Efisiensi Berdasarkan Indikator Kinerja**

Analisis ini mengambil pendekatan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan mengukur efektivitas dari kinerja dan efisiensi anggaran BBSPJIKKP TA 2023.

Tabel 3.59 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Berdasarkan Kinerja Anggaran TA. 2023

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Kinerja					Efektivitas	Anggaran			Efisiensi	Indeks Biaya Target (IBT)	Indeks Biaya Realisasi (IBR)	Efisiensi Perjakin/Renstra	Efisiensi IKU
	Target	Realisasi	%	% Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan	Target		Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik</b>														
<b>PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI</b>														
<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>														
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (Persen)	6%	66.03%	1100.42%	1100.42%	Efektif	33,148,000	29,663,814	89.49%	Efisien	552,466,667	44,928,154	91.87%	91.87%
<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>														
1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 (Perusahaan)	2	2	100%	100.00%	Efektif	187,793,000	187,788,681	100.00%	Efisien	93,896,500	93,894,341	0.00%	0.00%
2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri (Perusahaan)	2	2	100%	100.00%		12,379,000	12,378,505	100.00%		6,189,500	6,189,253	0.00%	0.00%
<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>														
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi (Persen)	6.00%	45.84%	764.0%	514.28%	Efektif	75,960,000	74,132,187	97.59%	Efisien	1,266,000,000	161,719,431	87.23%	87.23%
2	Meningkatnya PNB	20.00%	41.89%	209%	209%		85.26%	59.30%	59.30%					



Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		Kinerja				Efektivitas	Anggaran			Efisiensi	Indeks Biaya Target (IBT)	Indeks Biaya Realisasi (IBR)	Efisiensi Perjakin/ Renstra	Efisiensi IKU
		Target	Realisasi	%	% Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	%					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	layanan jasa industri (Persen)						1,859,981,000	1,585,741,039			9,299,905,000	3,785,488,276		
3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan(Persen)	5.00%	48.91%	978%			526,772,000	505,542,182	95.97%		10,535,440,000	1,033,617,219	90.19%	90.19%
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa(Persen)	78.00%	82.28%	105.49%			5,585,046,000	5,513,640,072	98.72%		7,160,315,385	6,701,069,606	6.41%	6.41%
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>														
<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>														
1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (Persen)	100%	100%	100.00%	100.00%	Efektif	14,408,000	14,407,367	100.00%	Efisien	14,408,000	14,407,367	0.00%	
<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>														
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri(Indeks)	3.8	3.849	101.29%	101.29%	Efektif	4,167,000	4,167,000	100.00%	Efisien	1,096,579	1,082,619	1.27%	
<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional</b>														

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		Kinerja				Efektivitas	Anggaran			Efisiensi	Indeks Biaya Target (IBT)	Indeks Biaya Realisasi (IBR)	Efisiensi Perjakin/Renstra	Efisiensi IKU
		Target	Realisasi	%	% Rata-rata Capaian Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	%					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78	106.62%	106.62%	Efektif	14,783,460,000	14,239,232,762	96.32%	Efisien	189,531,538	171,226,945	9.66%	106.62%	
<b>Penguatan Layanan Publik</b>														
1	Nilai minimal indeks layanan publik (Indeks)	3.6	3.90	108.33%	108.33%	Efektif	515,522,000	514,581,394	99.82%	Efisien	143,200,556	131,943,947	7.86%	
<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>														
1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja (Nilai)	77.0	77.25	100.32%	103.46%	Efektif	30,000,000	27,244,905	90.82%	Efisien	389,610	352,685	9.48%	
2	Nilai minimal laporan keuangan (Nilai)	91	97.00	106.59%		Efektif	20,000,000	19,466,540	97.33%		Efisien	219,780	200,686	8.69%
		<b>%Rata-rata Capaian Kinerja</b>		<b>306,17%</b>		<b>Efektif</b>	<b>23,648,636,000</b>	<b>23,252,853,110</b>	<b>98.33%</b>	<b>Efisien</b>				

Keterangan :

Persentase Capaian Kinerja < 100% : Tidak Efektif

Persentase Capaian Kinerja > 100% : Efektif

Persentase Capaian Kinerja Output < Persentase Realisasi Anggaran: Tidak Efisiensi

Persentase Capaian Kinerja Output > Persentase Realisasi Anggaran: Efisien

Berdasarkan Tabel 3.59 terlihat bahwa pada hampir seluruh Indikator Kinerja (IK) terdapat efisiensi. Indeks Biaya Target (IBT) merupakan biaya per satuan target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan Indeks Biaya Realisasi (IBR) merupakan biaya per satuan realisasi kinerja. Nilai IBT dan IBR tertinggi pada TA.2023 sebesar Rp 6.701.069.606 berasal dari IK Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Nilai IBT dan IBR terendah pada TA 2023 sebesar Rp 200.686 berasal dari IK nilai minimal laporan keuangan.

Efisiensi rata-rata yang diperoleh berdasarkan capaian Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap alokasi anggaran yang tersedia adalah masing-masing sebesar 28,30% dan 47,84%. Efisiensi terbesar berada pada IK Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi yaitu sebesar 91,87%. Sedangkan efisiensi terendah yaitu pada IK Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 dan IK Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri dengan efisiensi sebesar 0%. Efisiensi tertinggi diperoleh berdasarkan pada pencapaian peningkatan realisasi produktivitas industri hasil kolaborasi. Sedangkan efisiensi terendah dipengaruhi karena pada tahun 2023 hanya diperoleh capaian output sebesar masing-masing 2 perusahaan untuk perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 dan standardisasi industri.

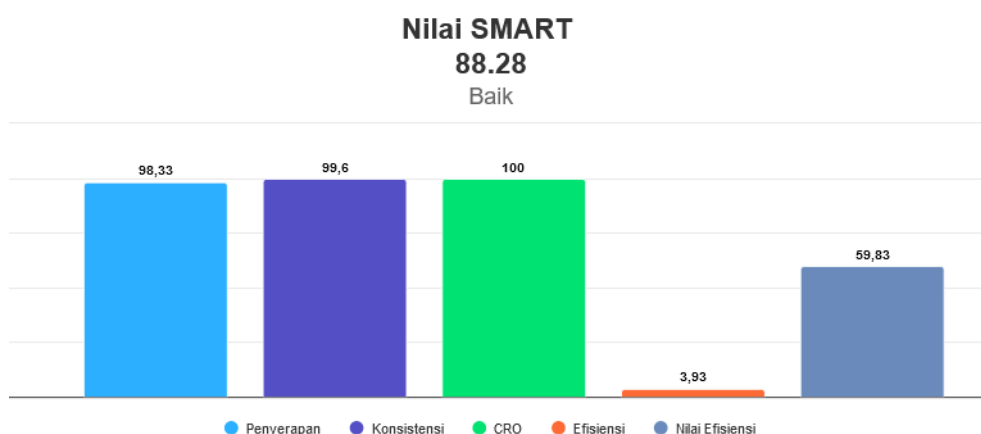
Secara keseluruhan, terlihat pada tabel 3.59 bahwa rata-rata capaian kinerja BBSPJIKKP sebesar 306,17% termasuk dalam kategori efektif dan efisien. Nilai efisiensi perkin adalah 28,60% dan nilai efisiensi indikator IKU adalah 47,84%.

**b. Analisis Efisiensi Kinerja Berdasarkan Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan**

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) atas Aspek Implementasi pada aplikasi SMART DJA terdiri dari empat variabel pengukuran yaitu capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan, pada tahun 2023 nilai kinerja BBSPJIKKP adalah sebesar 88,28 (Baik)

dengan rincian: penyerapan anggaran sebesar 98,33, konsistensi sebesar 99,6, CRO sebesar 100, efisiensi sebesar 3,93, nilai efisiensi sebesar 59,83 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 24.

Nilai kinerja BBSPJIKKP tahun 2022 adalah 88,8 dengan rincian: penyerapan anggaran sebesar 97,45, konsistensi sebesar 99,42, CRO sebesar 100, dan efisiensi sebesar 4,4.



Gambar 24. Nilai Kinerja Anggaran BBSPJIKKP TA 2023

Tabel 3.60 Nilai Kinerja Satker TA 2023 Berdasarkan Aplikasi SMART DJA

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	BSPJI Samarinda	97,16	99,76	84,71	100	19,96	99,89
2	BBSPJIBBT	94,34	72,99	83,31	100	20	100
3	BSPJI Pontianak	93,35	87,56	98,64	100	12,74	81,85
4	BSPJI Medan	91,04	95,75	98,99	100	8,31	70,77
5	BBSPJIPPI	91,01	97,45	99,08	100	8	70,01
6	BBSPJIA	90,79	96,16	94,53	100	9,03	72,58
7	BBSPJIKMN	89,64	98,08	99,42	100	5,91	64,78
8	BBSPJIHPMM	89,6	99,73	99,26	100	5,68	64,19
9	BBSPJIKB	88,79	98,05	99,48	100	4,71	61,79
10	BBSPJIKKP	88,28	98,33	99,6	100	3,93	59,83
11	BSPJI Banjarbaru	88,16	99,88	99,92	100	3,47	58,68
12	BSPJI Padang	88,12	96,28	86,11	100	7,43	68,57
13	BBSPJIT	87,99	99,77	99,57	100	3,35	58,37

No.	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
14	BBSPJIS	87,76	99,62	98,69	100	3,26	58,16
15	BSPJI Ambon	87,41	99,84	99,91	100	2,43	56,08
16	BSPJI Aceh	87,22	99,93	97,99	100	2,64	56,61

### 3.4. Penghargaan yang Diperoleh Tahun 2023

Berikut ini adalah beberapa penghargaan yang dicapai oleh BBSPJIKKP selama tahun 2023 baik secara internal maupun eksternal kementerian, diantaranya yaitu :

1. Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2023

BBSPJIKKP mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Kategori Instansi Vertikal DIY Tahun 2023, penghargaan ini diberikan oleh Komisi Infomasi Daerah D.I. Yogyakarta sebagai wujud apresiasi kepada satker yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik.



Gambar 25. Piagam Penghargaan Sebagai Badan Publik Informatif Kategori Instansi Vertikal DIY Tahun 2023

2. Peringkat III Arsiparis Teladan Kategori Ketrampilan  
BBSPJIKKP memperoleh penghargaan peringkat terbaik III Arsiparis Teladan Kategori Ketrampilan Kementerian Perindustrian atas nama Indiyatsih pada tanggal 17 Maret 2023.



Gambar 26. Piagam Penghargaan Terbaik III Arsiparis Teladan

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Secara umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) selama tahun 2023 telah berhasil melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan baik. Hal ini tercermin dari tercapainya seluruh target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023.

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pada Bab sebelumnya:

1. Seluruh indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis BBSPJIKKP pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan.
2. Total anggaran DIPA BBSPJIKKP tahun 2023 setelah 14 (empatbelas) kali revisi DIPA adalah sebesar Rp. 23.648.636.000,- dan anggaran yang terserap sebesar Rp 23.252.853.110,- atau 98,33%.
3. Jumlah penerimaan anggaran PNBP BBSPJIKKP tahun 2023 adalah sebesar Rp 5.965.483.946,- dengan capaian sebesar 107,14% atas target penerimaan PNBP yang ditetapkan sebesar Rp 5.568.042.000,- .

### **4.2 Permasalahan dan Kendala**

Beberapa kendala yang menghambat pencapaian kinerja dan anggaran:

1. Realisasi penggunaan PNBP tidak dapat maksimal karena adanya kelebihan belanja PNBP tahun sebelumnya yang diperhitungkan sebagai pengurang pada pengajuan MP tahun 2023.
2. Hasil penerimaan PNBP yang diterima setelah tanggal 14 Desember 2023 tidak dapat digunakan sebesar Rp 379.557.058
3. Beberapa peralatan layanan jasa masih memerlukan perbaikan

### **4.3 Saran dan Rekomendasi**

Saran dan rekomendasi yang dapat diberikan guna perbaikan kinerja BBSPJIKKP di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan program dan tahapan yang telah direncanakan

2. Melaksanakan kegiatan tahun 2024 berdasarkan anggaran berbasis kinerja (sesuai capaian kinerja)
3. Memastikan dan mengupayakan agar layanan yang telah selesai agar dapat segera dilakukan pembayaran sebelum batas akhir dari anggaran yang dapat digunakan
4. Memastikan ketersediaan MP dalam pengajuan anggaran agar tidak terjadi kesalah/kelebihan belanja seperti tahun sebelumnya
5. Memastikan dan mengkoordinasikan persyaratan untuk belanja modal khususnya barang impor
6. Meningkatkan efektivitas monitoring realisasi anggaran lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya melalui kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev), Rapat Tinjauan Manajemen dan aplikasi (e-monitoring APBN, ALKI, SMART DJA, eMonev Bappenas) maupun melalui surat peringatan dan perintah untuk mempercepat realisasi anggaran. ALKI pada Intranet Kemenperin sangat membantu dalam memonitoring anggaran dan kegiatan. Koordinator kegiatan dapat setiap saat memonitor capaian kinerja dan realisasi keuangan serta memberikan koreksi apabila terdapat update capaian yang tidak sesuai kepada pihak terkait. Selain itu, BBSPJIKKP juga telah mengembangkan aplikasi keuangan khusus di intranet BBSPJIKKP, misalnya administrasi keuangan dan kepegawaian.
7. Surat teguran dan perintah untuk mempercepat realisasi anggaran tetap diberikan kepada Koordinator Kegiatan minimal setiap triwulan. Selain itu, rapat koordinasi melalui Monev triwulan juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk membahas progress kegiatan, kendala maupun tindak lanjut yang diperlukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan.
8. Koordinasi yang lebih baik lagi dengan Bagian/Bidang terkait terutama dalam hal pengadaan belanja modal sehingga realisasi anggaran dapat terpenuhi.
9. Meningkatkan kegiatan promosi/pemasaran layanan jasa teknis melalui kegiatan pameran, seminar, workshop ataupun pemasaran langsung ke industri serta melakukan evaluasi terhadap industri yang tidak menggunakan layanan BBSPJIKKP lagi.
10. Meningkatkan sistem informasi layanan sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna terutama pelanggan BBSPJIKKP.



# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1**

**PERJANJIAN KINERJA TA 2023**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI**  
**KULIT, KARET, DAN PLASTIK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hagung Eko Pawoko

Jabatan: Kepala Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Andi Rizaldi

Jabatan: Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Jakarta, Oktober 2023**

**Kepala Badan Standardisasi dan  
Kebijakan Jasa Industri**

**Kepala Balai Besar Standardisasi dan  
Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet,  
dan Plastik**

  
**Andi Rizaldi**

  
**Hagung Eko Pawoko**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI**  
**KULIT, KARET, DAN PLASTIK**

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6	Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	2	Perusahaan
		2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2	Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	6	Persen
		2	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	20	Persen
		3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	5	Persen
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	78	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100	Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,8	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	3,6	Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77	Nilai
		2	Nilai minimal laporan keuangan	91	Nilai

Total Anggaran Tahun 2023 : Rp. 22.210.522.000,-  
(Dua puluh dua miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Jakarta, Oktober 2023

**Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri**

**Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik**

  
**Andi Rizaldi**

  
**Hagung Eko Pawoko**

**LAMPIRAN 2**

**PENGUKURAN PERJANJIAN  
KINERJA TA 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6 persen	66,025 persen	Kolaborasi Dalam Rangka Pengembangan Industri Karet	33,148,000	29,663,814	89.489%
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.	2 Perusahaan	2 Perusahaan	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	187,793,000	187,788,681	99.998%
	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri.	2 Perusahaan	2 Perusahaan	Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen	12,379,000	12,378,505	99.996%
Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	6 persen	45,84 Persen	- Jasa Konsultasi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit - Peningkatan Mutu Produk Barang Karet Melalui Pemantauan Proses Produksi	75,960,000	74,132,187	97.594%
	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	20 persen	41,79 Persen	- Jasa pelayanan teknis pengujian - Jasa pelayanan teknis kalibrasi - Jasa Pelayanan Uji Profisiensi - Jasa pelayanan teknis sertifikasi - Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal - Jasa Pelayanan Penyedia Material Acuan Standar - Jasa pelayanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca - Jasa pelayanan sertifikasi profesi - Jasa pelayanan inspeksi teknis	1,859,981,000	1,585,741,039	85.256%
	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan	5 Persen	48,91 Persen	- Pemeliharaan akreditasi lembaga pemeriksa halal - Pemeliharaan akreditasi lembaga inspeksi teknis - Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik - Partisipasi dalam pameran/ promosi - Diseminasi - Pemeliharaan akreditasi lembaga uji profisiensi - Pemeliharaan akreditasi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca - Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi	526,772,000	505,542,182	95.970%
	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	78 Persen	82,28 Persen	- Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi - Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	5,585,046,000	5,513,640,072	98.721%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen	100 Persen	Penerapan SPIP	14,408,000	14,407,367	99.996%
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,8	Indeks 3,849	Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan	4,167,000	4,167,000	100.000%
Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks 78	Indeks 83,16	- Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM - Gaji dan Tunjangan	14,783,460,000	14,239,232,762	96.319%
Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks 3,6	Indeks 3,9	- Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan - Pembuatan Sistem Informasi Training Center dan Sertifikasi Profesi BBSPJIKKP - Penyelenggaraan Kearsipan	515,522,000	514,581,394	99.818%
Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai 77	Nilai 77,25	- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi - Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	30,000,000	27,244,905	90.816%
	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai 91	Nilai 97	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	20,000,000	19,466,540	97.333%

Yogyakarta, 24 Januari 2024  
Kepala BBSPJIKKP,  
  
Hagusung Eko Pawoko



## **LAMPIRAN 3**

# **REALISASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TA 2023**



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	TW I		TW II		TW III		TW IV	
						% Fisik		% Fisik		% Fisik		% Fisik	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6 persen	66,025 persen	1100.42%	10	10	45	45	75	85	100%	100%
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.	2 Perusahaan	2 Perusahaan	100%	20	5	50	30	80	80	100%	100%
		Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri.	2 Perusahaan	2 Perusahaan	100%	25	25	50	50	75	75	100%	100%
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	6 persen	45,84 Persen	764.00%	10	10	50	50,31	80,5	82	100%	100%
		Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	20 persen	41,79 Persen	208.95%	31,72	18,94	47,65	32,43	79,48	73,12	100%	100%
		Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan	5 Persen	48,91 Persen	978.20%	16	10,58	38	38,82	75	75	100%	100%
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	78 Persen	82,28 Persen	105.49%	25	13,3	50	34,7	75	75	100%	100%
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen	100 Persen	100%	20	20	40	40	80	80	100%	100%
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,8	Indeks 3,849	101.29%	20	30	50	50	75	75	100%	100%
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks 78	Indeks 83,16	106.62%	25	25	50	50	75	75	100%	100%
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks 3,6	Indeks 3,9	108.33%	20	20	50	30	80	80	100%	100%
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai 77	Nilai 77,25	100.32%	25	25	50	50	75	75	100%	100%
		Nilai minimal laporan keuangan	Nilai 91	Nilai 97	106.59%	25	25	50	50	75	75	100%	100%

# **LAMPIRAN 4 REALISASI RENSTRA BBSPJIKKP 2021-2024**

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	2021			2022			2023			2024	TOTAL 2021-2024		
	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Target Renstra Sampai 2024	Realisasi sd 2023	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan</b>													
- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (persen)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	66.025	1100.42%	7	6.5	66.025	1015.77%
<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>													
- Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	100.00%	2	4	2	50%
- Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri.	2	2	100	3	3	100	2	2	100.00%	3	10	7	70%
<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa</b>													
- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi (persen)	N/A	N/A	N/A	5	61.12	1222.40	6	45.84	764.00%	7	6	45.84	764.00%
- Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri (persen)	5	29.83	596.60	5	11.47	229.40	20	41.79	208.95%	23	13.25	41.79	315.40%
- Meningkatnya hasil jumlah layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan (persen)							5	48.91	978.20%	7	6	48.91	815.17%
- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (persen)	72	87.91	122.10	75	86.82	115.76	78	82.28	105.49%	80	76.25	82.28	107.91%
<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan</b>													
- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (persen)	91.5	100	109.29	92	100.0	108.70	100	100	100.00%	100	95.88	100	104.30%
<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang</b>													
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri (indeks)	3.70	3.82	103.24	3.75	3.846	102.56	3.80	3.849	101.29%	3.85	3.85	3.849	99.97%
<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang</b>													
- Rata-rata indeks profesionalitas ASN (indeks)	74	68	91.89	76	76.32	100.42	78	83.16	106.62%	81	77.25	83.16	107.65%
<b>Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi</b>													
- Nilai minimal indeks layanan publik (indeks)	3.01	3.25	108	3.51	3.69	105.13	3.60	3.90	108.33%	3.70	3.7	3.90	105.41%
<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>													
- Nilai minimal akuntabilitas kinerja (nilai)	82	85.41	104.16	82.30	81.65	99.21	77	77.25	100.32%	80.10	80.10	77.25	96.44%
- Nilai minimal laporan keuangan (nilai)	90	90.55	100.61	90	98.25	109.17	91	97	106.59%	92	92	97	105.43%

# **LAMPIRAN 5 REALISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TA 2023**

**CAPAIAN KEGIATAN PRIORITAS SATKER BSKJI TA 2023**

Unit	KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/RO(PROYEK)	DIPA			Output			
			PAGU	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
<b>BBSPJIKKP</b>	<b>6077</b>	<b>Pengembangan dan Penyelenggaraan</b>							
	6077.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	75,960,000	74,132,176	97.59%	2	2	Industri	100.00%
	6077.QDI.002	Percepatan Pemanfaatan Teknologi Industri melalui Jasa Konsultasi	75,960,000	74,132,176	97.59%	2	2	Industri	100.00%